



BUKU 4

Katalog BPS: 1304044

ANALISIS TEMATIK ST2013 SUBSEKTOR

DAYASAING DAN PEMETAAN PEREMAJAJAN KOMODITI PERKEBUNAN



BADAN PUSAT STATISTIK



Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM)
Institut Pertanian Bogor

ANALISIS TEMATIK ST2013 SUBSEKTOR

DAYASAING DAN PEMETAAN PEREMAJAAN KOMODITI PERKEBUNAN



© Badan Pusat Statistik

**Analisis Tematik ST2013 Subsektor
Dayasaing dan Pemetaan Peremajaan Komoditi Perkebunan**

ISBN : 978-979-064-873-9
No. Publikasi : 07310.1507
Katalog BPS : 1304044

Diproduksi : © Badan Pusat Statistik
Pengaruh : Dr. Suhariyanto, Dr. Adi Lumaksono, M.A
Penanggung jawab : Dr. Margo Yuwono, S.Si., M.Si.
Editor : Dr. Slamet Sutomo
Koordinator Penulis : Prof. Muhammad Firdaus
Penulis : Dr. Yusman Syaukat, Dr. Lukman Baga, Dr. Aceng Hidayat, Dr. Amzul Rifin,
Dr. Tanti Novianti, Dr. Dwi Rachmina, Ir. Rita Setiawati, M.M., Dian V. Panjaitan, M.Si
Arini Hardjanto, M.Si, Achmad Fadillah, SE, MSc, MSi, Fony Fahrizal, M.Si,
Suwarti, SST, Ema Tusianti, M.T., M.Sc, Sulistina, SE, M.S.E, Hariyanto, SST, M.Si
Desain : Rizal Herwin Wibowo
Fera Kurniawati, S.ST
Dicetak Oleh : CV. Nario Sari

Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015
xx + 221 halaman; 17,6 x 25 cm

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar



Badan Pusat Statistik (BPS) telah mempublikasikan tiga buku analisis hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013), yaitu: Potensi Pertanian Indonesia yang merupakan hasil analisis hasil pencacahan lengkap tahun 2013; Analisis Sosial Ekonomi Petani di Indonesia yang disusun berdasarkan hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian (SPP) 2013; dan Analisis Kebijakan Pertanian: Implementasi dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani dari Perspektif Sensus Pertanian 2013 yang memanfaatkan hasil Pencacahan Lengkap Rumah Tangga Usaha Pertanian dan SPP. Publikasi tersebut mempublikasikan hasil analisis Sensus Pertanian yang bersifat umum.

Dalam rangka mendapatkan analisis lebih mendalam lagi dan bersifat komprehensif, disusunlah publikasi Dayasaing dan Pemetaan Peremajaan Komoditi Perkebunan yang bertujuan menganalisis dayasaing komoditi perkebunan, memetakan keperluan peremajaan tanaman perkebunan, dan merumuskan kebijakan untuk peningkatan dayasaing dan keberlanjutan ekspor komoditi perkebunan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor dan semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan ST2013 hingga tersusunnya buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada segenap pengguna.

Jakarta, Desember 2015
Kepala Badan Pusat Statistik

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suryamin'.

Dr. Suryamin

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Publikasi Analisis Tematik ST2013 Subsektor: DayaSaing dan Pemetaan Peremajaan Komoditi Perkebunan dapat terselesaikan.

Publikasi ini memetakan dayaSaing dan peremajaan 7 (tujuh) komoditi perkebunan utama Indonesia yaitu kelapa, cengkeh, kelapa sawit, karet, kakao, teh, dan kopi. Selain itu publikasi ini juga menghasilkan rumusan strategi peningkatan dayaSaing dan keberlanjutan ekspor komoditi perkebunan.

Kami mengucapkan terimakasih khususnya kepada Badan Pusat Statistik atas kepercayaan dan kerjasamanya bagi pelaksanaan kegiatan ini, serta kepada seluruh pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung bagi kelancaran ini. Kami berharap, publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya di lingkup Badan Pusat Statistik dan pemerintah secara umum sebagai landasan dalam pengambil keputusan bagi penyempurnaan pelaksanaan birokrasi yang telah berjalan selama ini.

Akhir kata, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bogor, Desember 2015
Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor

Dr. Yusman Syaukat

Ringkasan Eksekutif

Perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Peran lain dari subsektor ini adalah penyumbang surplus terhadap neraca perdagangan Indonesia. Akan tetapi, produktivitas tanaman perkebunan Indonesia masih rendah dibandingkan tanaman lain. Hal ini karena tanaman perkebunan di Indonesia banyak yang sudah melewati umur ekonomis, sehingga perlu peremajaan. Untuk itu diperlukan peta daya saing dan peremajaan tanaman perkebunan di setiap provinsi yang menjadi sentra produksi. Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai manfaat dan biaya dari pelaksanaan peremajaan komoditi perkebunan. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis daya saing komoditi perkebunan, memetakan keperluan peremajaan tanaman perkebunan, dan merumuskan kebijakan untuk peningkatan daya saing dan keberlanjutan ekspor komoditi perkebunan.

Analisis daya saing komoditi perkebunan dilakukan dengan metode *Policy Analysis Matrix* (PAM). Komoditi perkebunan yang dianalisis adalah: kelapa, cengkeh, kelapa sawit, karet, kakao, teh, dan kopi. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data sensus pertanian pada tahun 2013. Sedangkan untuk memetakan tanaman perkebunan yang perlu diremajakan dilakukan secara deskriptif. Tanaman perkebunan yang perlu diremajakan adalah tanaman yang sudah melewati umur ekonomisnya atau merupakan tanaman yang tidak menghasilkan (TTM).

Analisis daya saing komoditi perkebunan bertujuan untuk mengetahui keunggulan komparatif maupun kompetitif. Indikator keunggulan komparatif maupun kompetitif diperlihatkan dari hasil perhitungan *private cost ratio* (PCR) dan *domestic resource cost* (DRC). Selain analisis daya saing, penelitian ini juga melakukan analisis sensitivitas dengan metode *switching value*. Tujuannya untuk mengetahui persen perubahan harga output dan input, produktivitas, serta nilai tukar dapat berdaya saing ($DRC < 1$) apabila komoditi tersebut pada awalnya tidak memiliki daya saing.

Tanaman karet yang perlu diremajakan sebanyak 14,61 persen di Sumatera Utara, 15,34 persen di Kalimantan Barat, dan sebanyak 15,78 persen di Kalimantan Tengah. Untuk tanaman kopi yang paling banyak memerlukan peremajaan adalah di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu. Untuk komoditi kelapa sawit yang perlu segera diremajakan adalah di Provinsi Riau, Banten, dan Papua Barat. Kakao di Aceh, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur juga harus diremajakan karena banyak yang merupakan tanaman tidak menghasilkan. Sedangkan untuk cengkeh, yang perlu diremajakan adalah yang ada di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur. Peremajaan teh yang ada di Jawa Barat juga harus dilakukan. Begitu pula dengan kelapa di Kalimantan Barat, Riau, dan Jambi.

Berdasarkan perhitungan dengan metode PAM, dari tujuh komoditi perkebunan yang diteliti ternyata kopi merupakan komoditi dimana hanya sedikit provinsi yang membudidayakannya memiliki daya saing yang rendah secara ekonomi. Sebanyak 26 sentra produksi kopi yang dianalisis dalam penelitian ini, hanya lima provinsi yang memiliki daya saing yang rendah secara ekonomi ($DRC < 1$) yaitu, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Analisis *switching value* menunjukkan bahwa di Pulau Sumatera, Aceh adalah provinsi yang sensitif terhadap penurunan harga output, kenaikan harga input, dan apresiasi nilai tukar. *Switching value* terhadap komoditi kopi di Pulau Jawa dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di provinsi-provinsi di pulau ini yang memiliki daya saing. Bali sensitif terhadap kenaikan harga output, penurunan harga input, dan depresiasi nilai tukar, Jawa Timur sensitif terhadap kenaikan produktivitas. Sedangkan provinsi di luar Pulau Jawa yang sensitif terhadap perubahan keempat variable dalam *switching value* adalah Sulawesi Selatan.

Provinsi yang memiliki daya saing secara ekonomi untuk komoditi kakao sebanyak 11 provinsi dari total 25 provinsi yang dianalisis. Untuk analisis *switching value*, Aceh sensitif terhadap perubahan harga output dan produktivitas, Sumatera Selatan dan Bengkulu sensitif terhadap perubahan harga input dan nilai tukar. Sementara itu di Pulau Jawa, Jawa Tengah sensitif terhadap perubahan keempat variable *switching value* tersebut. Sulawesi Barat yang termasuk kedalam Pulau Sulawesi sensitif terhadap penurunan harga output dan produktivitas.

Daerah produksi teh yang diteliti yaitu Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta kesemuanya memiliki daya saing ekonomi. Berdasarkan analisis *switching value*, Provinsi DI Yogyakarta sensitif terhadap penurunan harga output dan produktivitas, kenaikan harga input dan apresiasi nilai tukar.

Daya saing komoditi cengkeh di 13 provinsi yang dianalisis menunjukkan nilai DRC kurang dari satu, artinya kurang berdaya saing secara ekonomi. Provinsi yang kurang berdaya saing tersebut adalah Aceh, Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Analisis *switching value* pada komoditi cengkeh menunjukkan bahwa dari 13 provinsi, Sulawesi Barat paling sensitif terhadap penurunan harga output dan produktivitas, kenaikan harga input, dan apresiasi nilai tukar.

Komoditi kelapa berdaya saing di Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Sebanyak Sembilan provinsi yang dianalisis, Kalimantan Timur merupakan provinsi, yang paling sensitif terhadap penurunan harga output dan produktivitas, kenaikan harga input, dan apresiasi nilai tukar.

Analisis daya saing untuk komoditi karet dan kelapa sawit menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah yang tidak memiliki daya saing secara ekonomi. Berdasarkan analisis *switching value* untuk karet, Provinsi Jambi adalah yang paling sensitif terhadap harga output, produktivitas, dan nilai tukar, sedangkan Bengkulu sensitif terhadap harga input di Pulau Sumatera. Komoditi karet di Pulau Jawa sensitif untuk perubahan harga output, produktivitas, dan nilai tukar pada Provinsi Jawa Barat. Harga output paling sensitif pada Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur merupakan provinsi yang paling sensitif terhadap perubahan harga input, perubahan produktivitas dan nilai tukar sensitif pada provinsi Kalimantan Barat untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Analisis *switching value* untuk komoditi kelapa sawit menghasilkan Riau sebagai provinsi yang paling sensitif terhadap penurunan harga output dan produktivitas, kenaikan harga input, dan apresiasi nilai tukar di Pulau Sumatera, sementara untuk Pulau Jawa adalah Banten. Provinsi Kalimantan Timur sensitif terhadap penurunan harga output, kenaikan harga input, penurunan produktivitas dan apresiasi nilai tukar sensitif mempengaruhi daya saing kelapa sawit di Kalimantan Tengah.

Hasil PAM menunjukkan bahwa daya saing ketujuh produk perkebunan tersebut mempunyai daya saing yang berbeda-beda untuk masing-masing provinsi. Hal ini menunjukkan tiap daerah memiliki kekhasan yang berbeda untuk masing-masing komoditi baik dari sisi ekologis maupun dari sisi ekonomi dalam menunjang daya saing suatu komoditi tertentu. Pada daerah yang memiliki daysaing pada komoditi tertentu dapat melakukan spesialisasi pada komoditi tersebut dengan membuat program-program yang berkaitan dengan komoditi tersebut sehingga di masa yang akan datang daya saingnya akan semakin meningkat. Pada komoditi yang tidak memiliki daya saing, dapat dikaji kembali kenapa komoditi tersebut tidak memiliki daya saing, apakah dari sisi ekologis maupun dari sisi ekonomi.

Dari hasil analisis *switching value* terlihat bahwa pada hampir semua komoditi dan provinsi sensitif terhadap perubahan harga output. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan program-program terutama di tingkat petani agar dapat melindungi dari penurunan harga. Salah satu program yang dapat dilaksanakan adalah dengan pembentukan kelompok sehingga petani dapat meningkatkan *bargaining power* dalam berhadapan dengan pembeli atau pedagang. Program lainnya adalah dengan membuat produk yang dihasilkan adalah produk premium. Produk premium ini akan mendapatkan pasar yang spesifik (*niche market*) sehingga permintaannya menjadi inelastis. Permintaan yang inelastis menyebabkan peningkatan harga jual tidak akan terlalu berpengaruh terhadap permintaan komoditi tersebut. Produk premium ini memerlukan saluran pemasaran yang khusus sehingga tidak tercampur dengan produk lainnya, apabila tercampur terdapat kecenderungan harga yang diterima akan sama dengan produk yang biasa. Produk premium ini dapat juga dilakukan dengan penanaman varietas yang spesifik, perlakuan yang spesifik (i.e organik), pengolahan, sertifikasi atau lainnya.

Beberapa komoditi sensitif terhadap perubahan harga input. Pada komoditi perkebunan, berbeda dengan komoditi pangan, input tidak disubsidi (seperti pupuk). Hal ini menyebabkan harga input yang sesuai dengan harga pasar sehingga penggunaan input perlu digunakan secara efisien. Ketujuh komoditi ini adalah produk ekspor sehingga harganya umumnya akan mengikuti fluktuasi harga internasional. Namun seringkali transmisi harga dari harga internasional dilakukan secara tidak sempurna terutama pada saat kenaikan harga. Hal ini dapat diatasi dengan membuat pasar yang transparan terutama dengan informasi harga yang terbuka. Sehingga petani dapat menentukan kepada siapa akan menjual produknya dan mendapatkan insentif untuk menjual produk dengan kualitas yang baik karena akan meningkatkan harga.

Peremajaan tanaman diperlukan untuk menghindari terjadinya penurunan produktivitas pada tanaman yang sudah menua. Namun pada satu sisi kegiatan peremajaan membutuhkan biaya yang sangat besar, dan pendapatan yang hilang ketika dilakukan peremajaan pada sisi yang lain. Perlu dilakukan program-program pembiayaan yang dapat mengatasi kedua masalah tersebut. Peremajaan juga dapat dikaitkan dengan pemetaan daya saing komoditi. Pada komoditi yang tidak mempunyai daya saing dapat digantikan dengan komoditi yang memiliki daya saing setelah memperhatikan kesesuaian secara ekologis.

Implikasi Kebijakan berdasarkan hasil penelitian ini antara lain; 1) Dari data Sensus Pertanian 2013, untuk perkebunan rakyat dapat ditentukan daerah yang urgens dilakukan peremajaan perkebunan. Sebagai contoh karet di Kalimantan; kopi di Sumatera; kakao di Sulawesi; sawit di Riau, dan lain-lain, 2) Daerah dimana tanaman perkebunan tidak berdayasaing seperti kopi dan kakao, perlu dilakukan upaya peningkatan produktivitas seperti penggunaan bibit unggul, pemupukan yang tepat, serta pengendalian hama dan penyakit.

<http://www.bps.go.id>

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	9
1.3. Ruang Lingkup	9
1.4. Output yang Diharapkan	9
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
2.1. Peremajaan Tanaman Perkebunan	13
2.2. Konsep Daya saing	15
2.2.1. Keunggulan Komparatif	16
2.2.2. Keunggulan Kompetitif	17
2.3. Konsep Kebijakan Pemerintah	18
2.3.1. Kebijakan Output	19
2.3.2. Kebijakan Input	21
2.4. Matriks Kebijakan Pemerintah (<i>Policy Analysis Matrix</i>)	22
2.5. Harga Bayangan (<i>Social Opportunity Cost</i>)	23
2.6. Analisis Sensitivitas	24
2.7. Kebijakan Pengembangan Komoditi Perkebunan Strategis	24
2.8. Kajian Empirik Peremajaan Perkebunan	25
2.9. Kerangka Pemikiran	28
III. METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis dan Sumber Data	33

3.2. Policy Analysis Matrix (PAM)	33
3.1.1. Penentuan Harga Bayangan	36
3.1.2. Analisis Switching Value	40
IV. STRUKTUR ONGKOS USAHATANI KOMODITI PERKEBUNAN	43
4.1. Struktur Ongkos Usahatani Karet	45
4.2. Struktur Ongkos Usahatani Kopi	46
4.3. Struktur Ongkos Usahatani Kelapa Sawit	46
4.4. Struktur Ongkos Usahatani Kakao	47
4.5. Struktur Ongkos Usahatani Cengkeh	48
4.6. Struktur Ongkos Usahatani Teh	49
4.7. Struktur Ongkos Usahatani Kelapa	50
V. ANALISIS DAYASAING USAHATANI KOMODITI PERKEBUNAN	53
5.1. Analisis Daya Saing Usahatani Karet	55
5.1.1. Analisis Daya Saing Usahatani Karet di Indonesia	55
5.1.2. Analisis Sensitivitas Daya Saing Usahatani Karet di Indonesia	58
5.2. Analisis Daya Saing Komoditi Kopi	59
5.2.1. Analisis Daya Saing Komoditi Kopi di Indonesia	59
5.2.2. Analisis Sensitivitas Daya Saing Komoditi Kopi di Indonesia	62
5.3. Analisis Daya Saing Usahatani Kelapa Sawit	64
5.3.1. Analisis Daya Saing Usahatani Kelapa Sawit di Indonesia	64
5.3.2. Analisis Sensitivitas Daya Saing Usahatani Kelapa Sawit di Indonesia...	66
5.4. Analisis Daya Saing Komoditi Kakao	68
5.4.1. Analisis Daya Saing Komoditi Kakao di Indonesia	68
5.4.2. Analisis Sensitivitas Daya Saing Komoditi Kakao di Indonesia	70
5.5. Analisis Daya Saing Usahatani Cengkeh	72
5.5.1. Analisis Daya Saing Usahatani Cengkeh di Indonesia	72
5.5.2. Analisis Sensitivitas Daya Saing Usahatani Cengkeh di Indonesia	74
5.6. Analisis Daya Saing Usahatani Teh	75
5.6.1. Analisis Daya Saing Usahatani Teh di Indonesia	75
5.6.2. Analisis Sensitivitas Daya Saing Usahatani Teh di Indonesia	77
5.7. Analisis Daya Saing Usahatani Kelapa	77
5.7.1. Analisis Daya Saing Usahatani Kelapa di Indonesia	77
5.7.2. Analisis Sensitivitas Daya Saing Usahatani Kelapa di Indonesia	80

VI. ANALISIS PEREMAJAAN TANAMAN PERKEBUNAN	81
6.1. Analisis Peremajaan Usahatani Karet	84
6.2. Analisis Peremajaan Usahatani Kopi	89
6.3. Analisis Peremajaan Usahatani Kelapa sawit	93
6.4. Analisis Peremajaan Usahatani Kakao	96
6.5. Analisis Peremajaan Usahatani Cengkeh	100
6.6. Analisis Peremajaan Usahatani Teh	103
6.7. Analisis Peremajaan Usahatani Kelapa	106
VII RINGKASAN DAN SINTESIS HASIL PENELITIAN.....	109
7.1. Ringkasan	111
7.2. Sintesis Hasil Penelitian	114
VIII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	117
8.1. Kesimpulan	119
8.2. Implikasi Kebijakan	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN.....	

Daftar Tabel

Tabel 1. 1.	Nilai PDB Sektor Pertanian (Milyar Rupiah) dan Kontribusi Tiap Subsektor Tahun 2011-2013.....	4
Tabel 1. 2.	Volume dan Nilai Ekspor Komoditi Perkebunan Indonesia Tahun 2011-2013.....	5
Tabel 1. 3.	Jumlah Rumah Tangga (RT) Usaha Perkebunan Tanaman Tahunan Tahun 2013	5
Tabel 1. 4.	Kinerja Komoditi Perkebunan Rakyat di Indonesia Tahun 2011-2013.....	6
Tabel 1. 5.	Umur Tanaman Perkebunan di Indonesia Tahun 2013 (Tahun)	7
Tabel 2. 1.	Klasifikasi Kebijakan Komoditi.....	18
Tabel 3. 1.	Matriks PAM.....	34
Tabel 5. 1.	Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Indonesia Tahun 2014.....	57
Tabel 5. 2.	Analisis <i>Switching Value</i> untuk Komoditi Karet di Indonesia Tahun 2014 (Persen)	59
Tabel 5. 3.	Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Indonesia Tahun 2014	61
Tabel 5. 4.	Analisis <i>Switching Value</i> Untuk Komoditi Kopi di Indonesia Tahun 2014 (Persen)	63
Tabel 5. 5.	Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2014.....	65
Tabel 5. 6.	Analisis <i>Switching Value</i> untuk Komoditi Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2014 (Persen)	67
Tabel 5. 7.	Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Indonesia Tahun 2014	69
Tabel 5. 8.	Analisis <i>Switching Value</i> Untuk Komoditi Kakao di Indonesia Tahun 2014 (Persen)	71
Tabel 5. 9.	Hasil Analisis PAM Usahatani Cengkeh di Indonesia Tahun 2014.....	73
Tabel 5. 10.	Analisis <i>Switching Value</i> untuk Komoditi Cengkeh di Indonesia Tahun 2014 (Persen)	74
Tabel 5. 11.	Hasil Analisis PAM Usahatani Teh di Indonesia Tahun 2014.....	76
Tabel 5. 12.	Analisis <i>Switching Value</i> untuk Komoditi Teh di Indonesia Tahun 2014 (Persen)	77

Tabel 5. 13.	Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa di Indonesia Tahun 2014.....	78
Tabel 5. 14.	Analisis <i>Switching Value</i> untuk Komoditi Kelapa di Indonesia Tahun 2014 (Persen)	80
Tabel 6. 1.	Klasifikasi Umur Tanaman Komoditi Berkebunan (Tahun).....	83
Tabel 6. 2	Jumlah Pohon Karet Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Indonesia, Tahun 2014.....	85
Tabel 6. 3.	Jumlah Pohon Karet Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Sumatera Tahun 2014 (Persen).....	87
Tabel 6. 4.	Jumlah Pohon Karet Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2014 (Persen)	88
Tabel 6. 5.	Jumlah Pohon Karet Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Lainnya Tahun 2014 (Persen)	88
Tabel 6. 6.	Jumlah Pohon Kopi Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Indonesia, Tahun 2014.....	90
Tabel 6. 7.	Jumlah Pohon Kopi Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Sumatera Tahun 2014 (Persen).....	91
Tabel 6. 8.	Jumlah Pohon Kopi Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2014 (Persen)	92
Tabel 6. 9.	Jumlah Pohon Kopi Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Lainnya Tahun 2014 (Persen)	92
Tabel 6. 10.	Jumlah Pohon Kelapa sawit Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Indonesia, Tahun 2014.....	93
Tabel 6. 11.	Persentase Jumlah Pohon Kelapa sawit Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Sumatera Tahun 2014 (Persen)	95
Tabel 6. 12.	Persentase Jumlah Pohon Kelapa sawit Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Banten Tahun 2014 (Persen).....	95
Tabel 6. 13.	Persentase Jumlah Pohon Kelapa sawit Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Lainnya Tahun 2014 (Persen).....	96
Tabel 6. 14.	Jumlah Pohon Kakao Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Indonesia, Tahun 2014.....	97
Tabel 6. 15.	Jumlah Pohon Kakao Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Sumatera Tahun 2014 (Persen).....	98
Tabel 6. 16.	Jumlah Pohon Kakao Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2014 (Persen)	99
Tabel 6. 17.	Jumlah Pohon Kakao Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Lainnya Tahun 2014 (Persen)	99

Tabel 6. 18.	Jumlah Pohon Cengkeh Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Indonesia, Tahun 2014.....	100
Tabel 6.19.	Persentase Jumlah Pohon Cengkeh Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Sumatera Tahun 2014 (Persen)	102
Tabel 6.20.	Persentase Jumlah Pohon Cengkeh Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2014 (%)....	102
Tabel 6.21.	Persentase Jumlah Pohon Cengkeh Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Lainnya Tahun 2014 (Persen)	102
Tabel 6.22.	Jumlah Pohon Teh Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Indonesia, Tahun 2014.....	103
Tabel 6.23.	Jumlah Pohon Kelapa Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Indonesia, Tahun 2014.....	106
Tabel 6. 24	Persentase Jumlah Pohon Kelapa Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Indonesia Tahun 2014	108

<http://www.bps.go.id>

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Dampak Subsidi Positif Terhadap Produsen dan Konsumen Barang Impor	19
Gambar 2.2. Subsidi dan Pajak pada Input <i>Tradable</i>	21
Gambar 2.3. Dampak Subsidi dan Pajak pada Input Domestik	22
Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran Penelitian	29
Gambar 4. 1. Struktur Ongkos Usahatani Karet Per Musim Tanam per Hektar	45
Gambar 4. 2. Struktur Ongkos Pengeluaran per Hektar dari Usaha Perkebunan Tanaman Kopi Tahun 2014.....	46
Gambar 4. 3. Struktur Ongkos Usahatani Kelapa Sawit Per Musim Tanam per Hektar Tahun 2014.....	47
Gambar 4. 4. Struktur Ongkos Usahatani Kakao Per Musim Tanam per Hektar Tahun 2014.....	48
Gambar 4. 5. Struktur Ongkos Usahatani Cengkeh Per Musim Tanam per Hektar Tahun 2014.....	49
Gambar 4. 6. Struktur Ongkos Usahatani Teh Per Musim Tanam per Hektar Tahun 2014.....	50
Gambar 4. 7. Struktur Ongkos Usahatani Kelapa Per Musim Tanam per Hektar Tahun 2014.....	51
Gambar 5. 1. Peta Daya Saing Perkebunan Karet Indonesia Tahun 2014.....	56
Gambar 5. 2. Peta Daya Saing Perkebunan Kopi Tahun 2014.....	60
Gambar 5. 3. Peta Daya Saing Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2014	64
Gambar 5. 4. Peta Daya Saing Perkebunan Kakao Tahun 2014	68
Gambar 5. 5. Peta Daya Saing Perkebunan Cengkeh Tahun 2014.....	72
Gambar 5. 6. Peta Daya Saing Perkebunan Teh Indonesia Tahun 2014	75
Gambar 5. 7. Peta Daya Saing Perkebunan Kelapa Tahun 2014	78
Gambar 6. 1. Peta Keperluan Peremajaan Komoditi Karet Tahun 2014.....	86
Gambar 6. 2. Peta Keperluan Peremajaan Komoditi Kopi Tahun 2014	91
Gambar 6. 3. Peta Keperluan Peremajaan Komoditi Kelapa sawit Tahun 2014	94
Gambar 6. 4. Peta Keperluan Peremajaan Komoditi Kakao Tahun 2014	98

Gambar 6. 5. Peta Keperluan Peremajaan Komoditi Cengkeh Tahun 2014..... 101
Gambar 6. 6. Peta Keperluan Peremajaan Komoditi Teh Tahun 2014..... 104
Gambar 6. 7. Peta Keperluan Peremajaan Komoditi Kelapa Tahun 2014..... 107

<http://www.bps.go.id>



1

Pendahuluan

BAB 1

Pendahuluan

“Perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB.”



1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini karena kontribusinya sebagai sumber pendapatan, penyedia bahan pangan, penyedia bahan baku industri, sumber devisa, dan menyerap tenaga kerja. Sektor pertanian meliputi beberapa sub sektor yaitu, sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sumbangan subsektor perkebunan ini cenderung meningkat selama periode 2011-2013 dengan rata-rata sebesar 15,89 persen. Subsektor perkebunan dibagi menjadi dua klasifikasi tanaman, yaitu tanaman tahunan dan tanaman semusim.

Tanaman semusim adalah tanaman berumur pendek yang pada umumnya berumur kurang dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan sekali panen langsung dibongkar. Contoh tanaman perkebunan semusim adalah tebu dan tembakau. Sedangkan tanaman tahunan adalah tanaman yang berumur lebih dari satu tahun, pada umumnya pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar dalam sekali panen. Contoh tanaman perkebunan tahunan adalah kakao, karet, kelapa sawit, kopi, aren, cengkeh, jambu mete, kelapa, lada, pala, sagu, dan teh. Tanaman tahunan sebagian besar menjadi andalan ekspor Indonesia. Saat ini, komoditas primadona ekspor antara lain kopi, kelapa sawit, karet, kakao, teh, cengkeh, dan kelapa.

Tabel 1.1.
Nilai PDB
Sektor
Pertanian
(Milyar Rupiah)
dan Kontribusi
Tiap Subsektor
Tahun
2011-2013

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	Rata-rata Pangsa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PERTANIAN	315.036,80	328.279,70	339.560,80	
a. Tanaman Bahan Makanan	154.153,90	158.910,10	161.925,50	48,93
	(48,93)	(48,41)	(47,69)	
b. Tanaman Perkebunan	49.260,40	52.325,40	54.629,30	15,64
	(15,64)	(15,94)	(16,09)	
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	40.040,30	41.918,60	43.902,30	12,71
	(12,71)	(12,77)	(12,93)	
d. Kehutanan	17.395,50	17.423,00	17.442,50	5,52
	(5,52)	(5,31)	(5,14)	
e. Perikanan	54.186,70	57.702,60	61.661,20	17,20
	(17,20)	(17,58)	(18,16)	

Sumber: BPS, 2015 (diolah)

Keterangan: Angka dalam () Menunjukkan Pangsa Subsektor Terhadap Sektor Pertanian (Persen)

Di sisi lain, data pada Tabel 1.2 menunjukkan kinerja ekspor komoditi perkebunan Indonesia, dimana volume ekspor menurun untuk komoditi cengkeh dan teh. Sedangkan dari sisi nilai ekspor untuk dua komoditi tersebut mengalami peningkatan. Untuk komoditi lain seperti kakao, kelapa, karet, dan kelapa sawit volume ekspornya meningkat sementara nilai ekspornya menurun. Hanya komoditi kopi yang volume dan ekspornya mengalami peningkatan. Kondisi ini terjadi pada periode 2011-2013 untuk 7 komoditi perkebunan yang dianalisis dalam kajian ini. Secara umum, komoditi-komoditi tersebut merupakan andalan ekspor Indonesia dan mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Namun keberlanjutan kontribusi tersebut menjadi pertanyaan mengingat usia sebagian besar tanaman perkebunan sudah cukup tua.

Sebagai komoditas ekspor, keberlanjutannya erat kaitannya dengan kemampuannya bersaing di pasar ekspor. Dalam bersaing di pasar ekspor/pasar global ada dua strategi pokok yang dapat dipilih, yaitu "*cost minimization strategy*" dan "*product development strategy*". Indonesia memilih strategi yang pertama. Salah satu upaya meminimumkan ongkos produksi adalah dengan meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan. Tanaman dengan produktivitas rendah cenderung biaya produksinya lebih tinggi dari tanaman yang produktivitasnya tinggi. Tanaman berumur tua produktivitasnya rendah sehingga peremajaan menjadi hal yang *urgen* untuk dilakukan.

Komoditi	Tahun	Volume Ekspor (000 Ton)	Nilai Ekspor (Juta US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)
Cengkeh	2011	5,4	15,1
	2012	5,9	24,8
	2013	5,2	25,4
Kakao	2011	410,2	1.172,00
	2012	387,8	1.053,5
	2013	414,1	1.151,50
Kelapa	2011	1.199,8	1.060,7
	2012	1.651,6	1.245,3
	2013	1.295,4	762,4
Kopi	2011	346,5	963,40
	2012	448,6	1.249,50
	2013	534	1.174,00
Karet	2011	2.556,2	11.135,80
	2012	2.444,5	7.861,90
	2013	2.702	6.907,00
Kelapa Sawit	2011	1.6436	17.261,00
	2012	18.850,8	17.602,20
	2013	20.578	15.838,90
Teh	2011	75,4	152,1
	2012	70,1	156,8
	2013	70,8	157,5

Tabel 1.2.

Volume dan Nilai Ekspor Komoditi Perkebunan Indonesia Tahun 2011-2013

Sumber: BPS dan Ditjenbun, 2015

Peran lain subsektor perkebunan selain berkontribusi terhadap PDB adalah penyerapan subsektor ini terhadap rumah tangga yang relatif besar dalam kegiatan perkebunan, yaitu sebanyak 15.264.798 rumah tangga. Besarnya peran perkebunan terhadap perekonomian ditunjang dengan ketersediaan lahan yang luas dan sumberdaya manusia yang cukup. Komoditi kelapa merupakan jenis tanaman perkebunan yang paling banyak dilakukan oleh rumahtangga petani (Tabel 1.3) dengan pangsa sebesar 43,01 persen. Apabila dibandingkan dengan rata-rata luas tanam per rumahtangga, maka kelapa adalah yang terendah, yaitu seluas 2.440 m². Jumlah rumahtangga yang berkontribusi dalam

kegiatan tanaman teh adalah yang paling sedikit jumlahnya. Hal ini disebabkan luas tanam teh yang dikelola oleh rumah tangga merupakan yang paling kecil dibandingkan tujuh komoditi perkebunan lainnya.

Jenis Tanaman	Jumlah RT	Pangsa RT thdp Total RT Tanaman Tahunan	Luas Tanam (Ha)	Rata-rata Luas Tanam/ Rumah Tangga (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cengkeh	1.623.089	13,71	493.668,11	0,30
Kakao	2.186.755	18,48	1.097.186,98	0,50
Karet	2.888.542	24,40	4.542.093,81	1,57
Kelapa Sawit	1.458.319	12,32	3.133.710,90	2,15
Kelapa	5.090.583	43,01	1.242.318,53	0,24
Kopi	1.962.044	16,58	1.063.427,06	0,54
Teh	55.466	0,47	17.885,40	0,32

Tabel 1.3.

Jumlah Rumah Tangga (RT) Usaha Perkebunan Tanaman Tahunan Tahun 2013

Sumber: Sensus Pertanian 2013, diolah

Keterangan: Jumlah total RT usaha tanaman tahunan adalah 11.835.944 RT

Kinerja luas lahan, produksi, dan produktivitas dari sebagian besar komoditi perkebunan tersebut menunjukkan peningkatan selama periode 2011-2013, kecuali untuk kelapa dan teh. Penambahan luas lahan untuk penanaman komoditi perkebunan relatif rendah setiap tahunnya sehingga produksi juga tidak banyak meningkat. Peningkatan produksi per luas lahan (produktivitas) hanya berkisar antara 1-5 persen, kecuali untuk komoditi cengkeh yang mencapai 47 persen. Walaupun luas lahan untuk penanaman cengkeh ini hanya meningkat sebesar 3 persen, akan tetapi produksinya meningkat sebesar 51 persen (Tabel 1.4).

Kelapa sawit sebagai komoditi unggulan ekspor Indonesia memiliki pertumbuhan produktivitas relatif rendah yaitu 0,28 persen. Walaupun kinerja produktivitas relatif rendah, namun pertumbuhan produksi berada di urutan kedua setelah cengkeh. Pertumbuhan produktivitas kelapa merupakan yang terendah diantara tujuh komoditi perkebunan yang diteliti yaitu sebesar -2,41 persen, hal ini disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan luas lahan dan juga produksi kelapa masing-masing sebesar -3,00 persen dan -3,86 persen. Teh juga menunjukkan kinerja pertumbuhan yang rendah, hal ini disebabkan sedikitnya daerah penghasil teh di Indonesia, begitu juga dengan kelapa yang hanya memiliki sembilan sentra produksi di Indonesia berdasarkan Sensus Pertanian (ST) 2013.

Komoditi	Tahun	Luas Lahan (000 Ha)	Produksi (000 Ton)	Produktivitas (000 Ton/000 Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cengkeh	2011	476,70	70,70	0,15
	2012	485,30	97,80	0,20
	2013	493,32	107,65	0,22
Kakao	2011	1.638,30	644,70	0,39
	2012	1.693,30	687,20	0,41
	2013	1.660,77	665,40	0,40
Kelapa	2011	3.725,80	3.132,80	0,84
	2012	3.740,30	3.148,80	0,84
	2013	3.614,67	3.012,53	0,83
Kopi	2011	1.185,00	616,40	0,52
	2012	1.187,70	661,80	0,56
	2013	1.194,08	645,35	0,54
Karet	2011	2.931,80	3.132,80	1,07
	2012	2.987,00	3.148,80	1,05
	2013	3.026,02	3.012,53	1,00
Kelapa Sawit	2011	3.752,50	10.557,50	2,81
	2012	4.137,60	11.037,20	2,67
	2013	4.356,09	12.012,87	2,76
Teh	2011	56,00	51,50	0,92
	2012	56,30	51,70	0,92
	2013	56,09	51,74	0,92

Tabel 1.4.
Kinerja Komoditi Perkebunan Rakyat di Indonesia Tahun 2011-2013

Sumber: BPS, 2015 (diolah)

Komoditi perkebunan merupakan komoditi tahunan yang memiliki umur ekonomis dalam memproduksi. Setelah melewati umur ekonomis tersebut maka produktivitasnya cenderung menurun. Berdasarkan beberapa sumber disebutkan bahwa umur komoditi perkebunan di Indonesia sudah melewati batas umur ekonomisnya (Tabel 1.5). Dengan kata lain, walaupun masih dalam umur produktif, akan tetapi rata-rata usia tanaman perkebunan di Indonesia sudah tua. Rata-rata umur komoditi perkebunan Indonesia untuk tujuh komoditi yang diteliti antara 25-30 tahun. Kelapa memiliki rentang umur produktif yang paling lama yaitu 60 tahun, sementara itu kelapa sawit serta kopi memiliki rentang umur produktif yang relatif pendek yaitu 35 tahun.

Jenis Tanaman	Panen pertama	Umur Tanaman dewasa	Umur Produktif	Bagian yg dipanen	Rata-rata Umur Saat ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kopi	3	5-6	12-50	buah	30
Teh	3	6	50	daun	-
Kelapa sawit	3-4	8-9	35	buah	30
Karet	4 – 7	8-11	35	getah	25
Kakao	4-8	15 - 20	50	biji	25
Kelapa	4-6	8-15	60	buah	-
Cengkeh	5 – 7	15	50	Tunas Bunga	15

Tabel 1.5
Umur Tanaman Perkebunan di Indonesia Tahun 2013 (Tahun)

Salah satu upaya untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan produktivitas komoditi perkebunan yaitu dengan *replanting* (peremajaan). *Replanting* adalah penggantian tanaman tidak produktif (tua/rusak) dengan tanaman baru, baik secara keseluruhan ataupun bertahap.

Peremajaan perkebunan umumnya masih belum banyak dilakukan pada perkebunan rakyat karena kepemilikan modal yang terbatas. Terlebih lagi apabila mata pencaharian petani hanya bersumber dari perkebunan saja, maka ketika dilakukan peremajaan petani dapat kehilangan pendapatannya. Tanaman perkebunan yang sudah tua dapat memberikan kerugian bagi petani dari sisi biaya yang dikeluarkan dan juga pendapatan yang diterima petani. Biaya usaha tani tanaman perkebunan semakin besar dikarenakan adanya perawatan serta pemupukan yang perlu ditingkatkan agar mampu meningkatkan hasil produksi. Petani juga akan menerima pendapatan yang semakin kecil karena produksi yang dihasilkan semakin menurun sedangkan biaya produksi semakin besar.

Manfaat lain dari peremajaan yaitu peningkatan daya saing dari komoditi perkebunan karena adanya jaminan kontinuitas dari produktivitas walaupun luas lahan yang tidak dapat ditambah. Sebagaimana diketahui bahwa luas lahan untuk pertanian semakin lama semakin berkurang dan berubah fungsinya, umumnya menjadi perumahan serta industri. Adanya peremajaan tanaman perkebunan merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan produktivitas. Kajian ini menghubungkan kedua hal tersebut, yaitu antara daya saing dan peremajaan komoditi perkebunan. Komoditi perkebunan yang dikaji dalam penelitian ini akan dianalisis apakah memiliki daya saing atau tidak. Analisis daya saing dibutuhkan untuk mengetahui apakah komoditi perkebunan tersebut harus direjamakan atau tidak. Jika masih memiliki daya saing maka komoditi perkebunan tersebut layak untuk diremajakan kembali. Sebaliknya, peremajaan yang dilakukan dapat meningkatkan/mempertahankan daya saing komoditi perkebunan tersebut.

Namun demikian, penggantian tanaman (peremajaan tanaman) ini membutuhkan dana yang besar. Sementara petani yang melakukan peremajaan tidak bisa langsung mendapatkan pendapatan karena tanamannya belum menghasilkan sampai tanaman berumur 3-5 tahun. Perkebunan di Indonesia didominasi oleh perkebunan rakyat yang pada umumnya berskala kecil dan dikelola oleh para petani yang pada umumnya relatif miskin. Perkebunan rakyat ini sangat membutuhkan dukungan pemerintah agar produk perkebunan yang dihasilkannya mampu bersaing di pasar ekspor. Masalahnya adalah apakah kebijakan-kebijakan pemerintah bersifat *supportif* bagi kemampuan bersaing produk perkebunan rakyat. Oleh karena itu, analisis daya saing dan peremajaan tanaman membutuhkan pertimbangan yang matang melalui perhitungan kelayakan peremajaan. Berdasarkan analisis kelayakan dapat diketahui apakah kegiatan peremajaan akan menguntungkan atau tidak bagi yang melaksanakannya.

Selain faktor dana dan berkurangnya pendapatan yang menjadi pertimbangan, terdapat faktor lain yang mempengaruhi keputusan peremajaan tanaman. Diantaranya faktor jumlah produksi dan nilai ekonomi (Boerhendhy dan Amypalupy, 2010), faktor ketersediaan bibit, fluktuasi harga faktor produksi, administrasi (Jenahar, 2003), faktor internal dan eksternal seperti harga jual, iklim, serta suku bunga (Sutarna, 2000).

1.2. Tujuan

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai manfaat dan biaya dari pelaksanaan peremajaan komoditi perkebunan. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis daya saing komoditi perkebunan
2. Memetakan keperluan peremajaan tanaman perkebunan
3. Merumuskan kebijakan untuk peningkatan daya saing dan keberlanjutan ekspor komoditi perkebunan.

1.3. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai daya saing komoditi perkebunan dengan metode *Policy Analysis Matrix* (PAM) dan pemetaan peremajaan komoditi perkebunan. Komoditi perkebunan yang akan dianalisis adalah: kelapa, cengkeh, kelapa sawit, karet, kakao, teh, dan kopi. Setelah dilakukan analisis dengan metode PAM, dapat diketahui suatu komoditi berdayasaing atau tidak yang kemudian hasil analisis ini digunakan untuk membuat suatu implikasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data Sensus Pertanian tahun 2013 dan Survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan (SKB-2014). Analisis akan dilakukan pada tingkat propinsi untuk masing-masing komoditi perkebunan.

1.4. Output yang Diharapkan

Hasil dari penelitian ini diharapkan adanya peta tematik daya saing dan peremajaan komoditi perkebunan yang terpilih. Secara lebih lengkap, output dari penelitian ini adalah:

1. Peta tematik daya saing 7 (tujuh) komoditi perkebunan utama Indonesia.
2. Peta tematik peremajaan 7 (tujuh) komoditi perkebunan utama Indonesia.
3. Rumusan strategi peningkatan daya saing dan keberlanjutan ekspor komoditi perkebunan.

2

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

BAB 2

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

“Produktivitas tanaman perkebunan sangat diperlukan sebagai tolok ukur potensi ekonomi kebun.”



2.1. Peremajaan Tanaman Perkebunan

Menurut Rajino (1984), pada perkebunan yang mengusahakan tanaman tahunan (*perennial crops*) biasanya dibedakan antara pengertian peremajaan tanaman (*replanting*) dan penanaman baru (*new planting*). Perbedaan pengertian tersebut didasarkan atas pelaksanaan fisiknya. *Replanting* dilakukan di atas lahan bekas tanaman lama/tua yang serupa, sedangkan *new planting* dilakukan di atas lahan baru. Pada dasarnya maksud dari peremajaan tanaman, adalah mengganti tanaman tua dengan tanaman baru yang memiliki produktivitas tinggi, kualitas tinggi dan secara ekonomi jauh lebih menguntungkan daripada tanaman semula.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan peremajaan adalah produktivitas kebun. Menurut Rajino (1984) peranan produktivitas kebun sangat besar dalam rangka perhitungan untung rugi perusahaan perkebunan. Angka produktivitas ini biasa digunakan sebagai tolok ukur untuk menentukan profitabilitas kebun. Oleh karena itu banyak analisis yang menggunakan angka produktivitas terendah sebagai titik impas (*Break Event Point*), di bawah titik itu berarti kebun dalam keadaan rugi. Meskipun angka produktivitas dan titik impas bersifat relatif, tetapi berbeda untuk kebun satu dan lainnya tergantung kepada tingkat biaya produksi di masing-masing kebun. Namun sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk menentukan peremajaan alat modal perkebunan, produktivitas tanaman sangat diperlukan sebagai tolok ukur potensi ekonomi kebun.

Pertimbangan yang paling penting untuk menetapkan kebijaksanaan peremajaan ini adalah biaya produksi, penerimaan (*revenue*) dan keuntungan (*profit*). Apabila biaya produksi sama besar dengan penerimaan yang diperoleh perusahaan, maka keuntungan nol. Ini berarti untuk tahun-tahun berikutnya kondisi kebun sudah merugi. Untuk menghindari hal itu, usaha yang dilakukan adalah dengan menekan biaya produksi atau peningkatan penerimaan kebun melalui peningkatan produktivitas pertanian.

Penerimaan kebun akan meningkat apabila produktivitas naik, jumlah produk yang dapat terjual bertambah, dan harga jual naik atau sekurang-kurangnya tetap. Penurunan harga jual per satuan produk akan dapat tertutupi oleh peningkatan produktivitas sampai batas tertentu. Hal ini akan terjadi apabila dilakukan peremajaan tanaman dengan menggunakan klon-klon unggul.

Saat optimum peremajaan adalah pada waktu dilakukannya peremajaan, perusahaan akan memperoleh keuntungan tertinggi dalam satuan tahun. Penentuan saat optimum pelaksanaan peremajaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan yang melakukan peremajaan. Menentukan saat optimum peremajaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara teknis dan secara ekonomis.

Penentuan saat optimum peremajaan secara teknis didasarkan kepada produktivitas tanaman tanpa memperhitungkan harga input, harga output atau keuntungan. Penentuan saat optimum peremajaan secara ekonomis mempertimbangkan arus tunai (*cash flow*) perusahaan. Penentuan saat optimum peremajaan merupakan kegiatan yang menentukan batas umur ekonomis dengan tujuan mempertahankan kontinuitas perusahaan agar tercapai kondisi yang optimal sepanjang kegiatan perusahaan berlangsung.

Umur optimum peremajaan yaitu tahun dimana sebaiknya peremajaan dilakukan dan apabila melewati tahun tersebut maka akan terjadi kerugian. Penentuan saat atau umur optimum peremajaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan batas umur ekonomis dengan mempertahankan kontinuitas atau keberlanjutan produksi agar tercapai kondisi yang optimal sepanjang kegiatan produksi berlangsung.

Banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan umur optimum peremajaan. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu metode yang digunakan Faris. Faris (1960) dalam Sutarna (2002) membahas penentuan optimum peremajaan dengan tiga tipe atau konsep dari aset produksi yang dimiliki. Terdapat tiga konsep peremajaan yang dikemukakan oleh Faris dalam Ernah (2010) dan Ismail dan Mamat (2002) yaitu :

1. Produksi jangka pendek dengan penerimaan yang diwujudkan dengan cara penjualan aset. Konsep pertama ini biasanya digunakan pada produksi jangka

pendek yaitu kira-kira mencapai waktu enam bulan. Penerimaan usaha yang berproduksi pada jangka pendek akan diperoleh dengan cara menjual asetnya yaitu tanaman itu sendiri. Peremajaan optimum pada konsep pertama ini ditentukan dengan mengetahui nilai tambahan penerimaan bersih (*Marginal Net Revenue* (MNR) sama dengan penerimaan bersih rata-rata (*Average Net Revenue*).

2. Produksi jangka panjang dengan penerimaan yang diwujudkan dengan cara menjual aset yang dimiliki. Produksi jangka panjang ini merupakan kegiatan produksi yang kira-kira mencapai umur usaha 50 tahun. Konsep kedua dimaksudkan dengan penerimaan usaha jangka panjang diperoleh dengan cara menjual aset pada akhir pengusahaan aset tersebut. Konsep kedua ini biasanya digunakan pada tanaman tahunan yang hasil kebunnya hanya satu kali produksi seperti jati atau gaharu. Penerimaan penjualan kayu pada pengusahaan kebun jati diperoleh pada saat tanaman jati ditebang. Selama jati belum ditebang maka tidak akan ada penerimaan yang akan diperoleh. Prinsip yang digunakan pada konsep kedua yaitu peremajaan optimum yang dapat ditentukan pada saat tambahan penerimaan bersih (MNR) aset tanaman sama atau mendekati dengan nilai amortisasi tertinggi dari pendapatan bersih dari kegiatan selanjutnya (*Anticipated of net revenue*).
3. Produksi jangka panjang yang diwujudkan dengan cara penjualan hasil sepanjang hidup aset. Konsep ketiga ini menjelaskan bahwa penerimaan suatu usaha jangka panjang diperoleh dari hasil produksi sepanjang umur aset. Konsep ini biasanya digunakan untuk menentukan umur optimum peremajaan pada tanaman perkebunan seperti kopi, karet, teh, kelapa sawit, dan kakao. Prinsip peremajaan optimum pada konsep ketiga yaitu penerimaan bersih (*net revenue*) tahunan merupakan tambahan penerimaan bersih (*marginal net revenue*), sehingga peremajaan optimum terjadi pada saat keuntungan bersih per tahun sama dengan amortisasi dari nilai kini keuntungan selama masa pengusahaan (*amortisasi of net revenue* (ANR)).

2.2. Konsep Daya Saing

Dayasaing akan menentukan posisi suatu komoditi di pasar persaingan. Salah satu indikator daya saing adalah pangsa pasar (Martin *et al.* 1991). Jika pangsa pasar suatu komoditi meningkat berarti daya saing komoditi itu meningkat. Oleh karena itu, daya saing secara umum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pangsa pasar dan pertumbuhan pasar.

"Dayasaing dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pangsa pasar dan pertumbuhan pasar."

Dayasaing merupakan kemampuan suatu produsen untuk memproduksi suatu komoditi dengan biaya yang cukup rendah sehingga kegiatan produksi tersebut menguntungkan pada tingkat harga yang terjadi di pasar internasional. Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur daya saing suatu komoditi adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan dan efisiensi dari perusahaan komoditi tersebut. Tingkat keuntungan dapat dilihat dari keuntungan privat dan keuntungan sosial, sedangkan efisiensi perusahaan komoditi dapat dilihat dari tingkat keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

2.2.1. Keunggulan Komparatif

Menurut Tarigan (2005), istilah *comparative advantage* (keunggulan komparatif), mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo (1917) saat membahas perdagangan antara dua negara. Dalam teori tersebut, Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara yang saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, maka kedua negara tersebut akan mendapatkan keuntungan.

Dalam ekonomi regional, keunggulan komparatif suatu komoditi bagi suatu daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Dengan kata lain, keunggulan komparatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah.

Pengetahuan akan keunggulan komparatif suatu daerah dapat digunakan para penentu kebijakan untuk mendorong perubahan struktur perekonomian daerah ke arah sektor yang mengandung keunggulan komparatif. Jadi, apabila sektor yang memiliki keunggulan komparatif bagi suatu daerah telah diketahui lebih dahulu, pembangunan sektor itu dapat segera dilaksanakan tanpa menunggu tekanan mekanisme pasar yang sering berjalan lambat.

Konsep keunggulan komparatif sering kali digunakan untuk menerangkan spesialisasi suatu negara dalam memproduksi suatu barang dan jasa. Selain itu, konsep ini dapat juga dilakukan untuk wilayah yang lebih kecil seperti provinsi. Dalam model disebutkan bahwa sekalipun suatu negara mengalami kerugian atau ketidakunggulan absolut dalam memproduksi suatu komoditi jika dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat berlangsung. Negara yang kurang efisien akan berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditi yang mempunyai keunggulan komparatif, sebaliknya negara tersebut akan mengimpor komoditi yang memiliki keunggulan absolut lebih besar. Dari komoditi inilah negara tersebut akan mengalami kerugian komparatif (Salvatore, 1997).

Model Ricardian ini mengasumsikan bahwa tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi. Teori tenaga kerja menyatakan bahwa nilai atau harga dari suatu komoditi dapat diperoleh dari jumlah waktu tenaga kerja yang dipakai untuk memproduksi komoditi. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa (1) hanya tenaga kerjalah faktor produksi yang digunakan dalam proporsi yang tetap sama dalam produksi semua komoditi, (2) tenaga kerja homogen.

Pada tahun 1933, Heckscher dan Ohlin (H-O) melakukan pengembangan terhadap konsep keunggulan komparatif. Hal ini didasarkan kepada pengaruh timbal balik perbedaan sumberdaya antara negara-negara atau daerah-daerah. Melalui model ini dinyatakan bahwa perdagangan internasional atau daerah dipengaruhi oleh perbedaan sumberdaya antar negara. Teori H-O menganggap bahwa tiap negara akan mengekspor komoditi yang secara relatif mempunyai faktor produksi berlimpah dan murah, serta mengimpor komoditi yang secara relatif mempunyai faktor produksi yang relatif langka dan mahal. Penggunaan teori Ricardian dan H-O biasanya didasarkan kepada model sederhana dengan asumsi (1) hanya ada dua negara, dua komoditi, dan menggunakan satu atau dua faktor produksi, (2) tidak ada mobilitas faktor produksi, (3) penawaran faktor tetap, (4) keseimbangan dalam pembayaran (*balance of payment*), (5) tidak ada barang antara dan barang yang tidak diperdagangkan (Salvatore, 1997).

2.2.2. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif (*Competitive Advantage*) merupakan alat untuk mengukur daya saing suatu aktivitas berdasarkan kepada kondisi perekonomian aktual. Adanya konsep keunggulan kompetitif didasarkan kepada asumsi bahwa perekonomian yang tidak mengalami distorsi sama sekali sulit ditemukan di dunia nyata, dan keunggulan komparatif suatu aktifitas ekonomi dilihat dari sudut pandang individu yang berkepentingan langsung.

Secara operasional keunggulan kompetitif dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memasok barang dan jasa pada waktu, tempat, dan bentuk yang diinginkan konsumen, baik di pasar domestik maupun internasional pada harga yang sama atau lebih baik dari yang ditawarkan pesaing untuk memperoleh laba paling tidak sebesar ongkos penggunaan (*opportunity cost*) sumberdaya.

2.3. Konsep Kebijakan Pemerintah

“Kebijakan yang ditetapkan pemerintah pada suatu komoditi ada dua bentuk yaitu berupa subsidi dan hambatan perdagangan.”

Kebijakan pemerintah ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor ataupun sebagai usaha dalam melindungi produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. Kebijakan tersebut biasanya diberlakukan untuk input dan output yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara harga input dan harga output yang diminta produsen (harga privat) dengan harga yang sebenarnya terjadi jika dalam kondisi perdagangan bebas (harga sosial). Kebijakan yang ditetapkan pemerintah pada suatu komoditi ada dua bentuk yaitu berupa subsidi dan hambatan perdagangan. Kebijakan subsidi terdiri dari subsidi positif dan subsidi negatif (pajak), sedangkan hambatan perdagangan berupa tarif dan kouta.

Menurut Monke dan Pearson (1989), kebijakan perdagangan dengan subsidi berbeda dalam tiga aspek yaitu pada budget pemerintah, tipe alternatif kebijakan, dan tingkat kemampuan penerapan kebijakan. Adapun beberapa tipe alternatif kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Menurut Salvatore (1997), subsidi adalah pembayaran dari atau untuk pemerintah. Pembayaran dari pemerintah disebut subsidi positif dan pembayaran untuk pemerintah disebut subsidi negatif (pajak). Subsidi bertujuan untuk melindungi konsumen atau produsen dengan menciptakan harga domestik agar berbeda dengan harga internasional. Kebijakan perdagangan adalah pembatasan yang diterapkan pada impor atau ekspor suatu komoditi. Salah satu kebijakan perdagangan adalah kuota yang diterapkan dengan tujuan supaya produsen tidak menjual seluruh produknya ke pasar internasional. Hal ini karena harga di pasar internasional lebih tinggi sehingga akan merugikan konsumen dalam negeri karena ketersediaan barang di dalam negeri berkurang. Kebijakan subsidi dapat diterapkan untuk setiap komoditi yang *tradable* maupun yang *non-tradable*. Sedangkan kebijakan perdagangan hanya diterapkan untuk barang-barang yang diperdagangkan (*Tradable*).

Instrumen Kebijakan Subsidi	Dampak pada Produsen Subsidi kepada Produsen	Dampak pada Konsumen Subsidi kepada Konsumen
(1)	(2)	(3)
a. Tidak merubah harga pasar dalam negeri	a. Pada barang impor (S+PI;S-PI)	a. Pada barang ekspor (S+CE;S-CE)
b. Merubah harga pasar dalam negeri	b. Pada barang ekspor (S+PE;S-PE)	b. Pada barang impor (S+CI; S-CI)
Kebijakan perdagangan (semua yang dapat merubah harga pasar dalam negeri).	Hambatan pada barang-barang impor (TPI)	Hambatan pada barang-barang ekspor (TPE)

Tabel 2.1.
Klasifikasi Kebijakan Komoditi

Keterangan :

S+ : Subsidi

S- : Pajak

PE : Produsen untuk barang ekspor

PI : Produsen untuk barang impor

CE : Konsumen untuk barang ekspor

CI : Konsumen untuk barang impor

TPE : Hambatan kepada produsen untuk barang ekspor

TPI : Hambatan kepada produsen barang impor

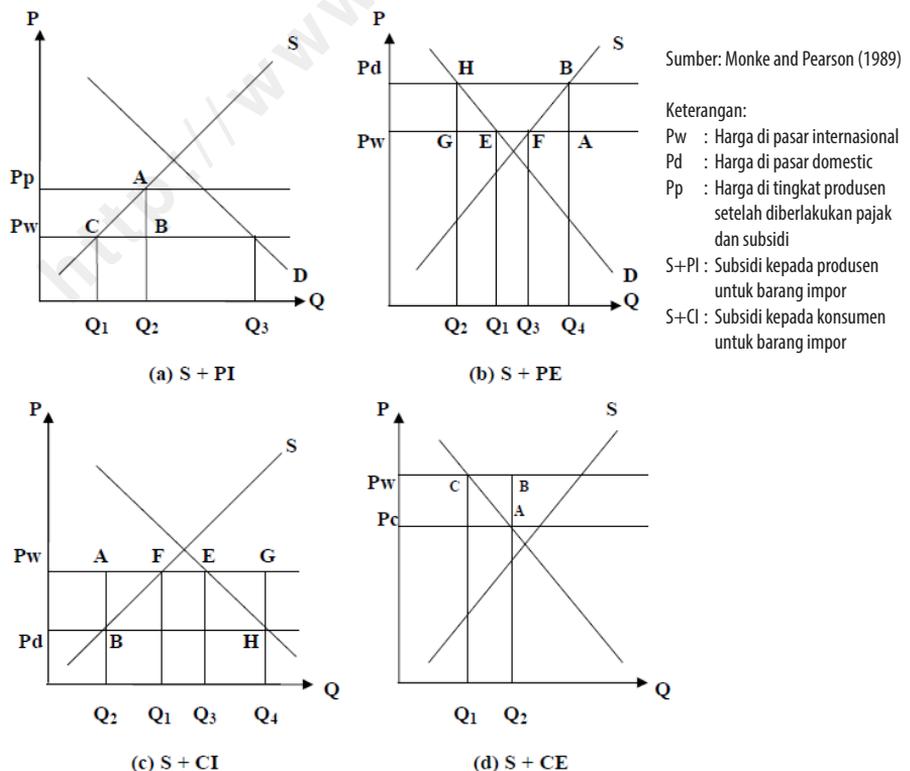
Sumber: Monke and Pearson, 1989

Penjelasan dari delapan alternatif kebijakan akan dibagi menjadi dua bagian yang besar, yaitu kebijakan pemerintah dalam subsidi (poin a sampai poin f), dan intervensi pemerintah yaitu hambatan perdagangan (poin g sampai poin h).

- Subsidi positif kepada produsen barang impor (S + PI)
- Subsidi positif kepada produsen barang ekspor (S + PE)
- Pajak negatif kepada produsen barang impor (S - PI)
- Pajak negatif kepada produsen barang ekspor (S - PE)
- Subsidi positif kepada konsumen barang impor (S + CI)
- Subsidi negatif kepada konsumen barang impor (S - CI)
- Subsidi positif kepada konsumen barang ekspor (S + CE)
- Pajak negatif kepada konsumen barang ekspor (S - CE)

2.3.1. Kebijakan Output

Kebijakan terhadap output baik berupa subsidi maupun pajak dapat diterapkan pada barang ekspor maupun impor. Kebijakan pemerintah terhadap output dijelaskan dengan menggunakan Transfer Output (TO) dan Koefisien Proteksi Output Nominal (*Nominal Protection Coefficient on Output/ NPCO*). Dampak dari subsidi positif terhadap produsen dan konsumen pada barang impor dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1.
Dampak Subsidi Positif Terhadap Produsen dan Konsumen Barang Impor

Gambar 2.1 (a) merupakan gambar subsidi positif untuk produsen barang impor dimana harga yang diterima oleh produsen domestik lebih tinggi dari harga di pasar internasional. Hal ini menyebabkan output produksi dalam negeri meningkat dari Q_1 menjadi Q_2 sedangkan konsumsi tetap pada Q_3 . Harga yang diterima konsumen akan tetap sama dengan harga di pasar dunia. Subsidi ini akan menyebabkan jumlah impor turun dari Q_3-Q_1 menjadi Q_3-Q_2 . Tingkat subsidi per output sebesar $(P_p - P_w)$ pada output Q_2 , maka transfer total dari pemerintah kepada produsen sebesar $Q_2 \times (P_p - P_w)$ atau $P_p ABP_w$. Subsidi menyebabkan barang yang seharusnya diimpor menjadi diproduksi sendiri dengan biaya korbanan sebesar $Q_1 CAQ_2$, sedangkan *opportunity cost* yang diperoleh jika barang tersebut diimpor adalah sebesar $Q_1 CBQ_2$. Dengan adanya subsidi tersebut, maka akan terjadi kehilangan efisiensi sebesar CAB.

Gambar 2.1 (b) menunjukkan subsidi untuk produsen barang ekspor. Adanya subsidi dari pemerintah menyebabkan harga yang diterima produsen lebih tinggi dari harga yang berlaku di pasar dunia. Harga yang tinggi berakibat pada peningkatan output produksi dalam negeri dari Q_3 ke Q_4 , sedangkan konsumsi menurun dari Q_1 ke Q_2 sehingga jumlah ekspor meningkat dari Q_3 ke Q_4 . Tingkat subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebesar GABH.

Gambar 2.1 (c) menunjukkan subsidi positif untuk konsumen untuk output yang diimpor. Kebijakan subsidi sebesar $P_w - P_d$ kepada konsumen menyebabkan produksi menurun dari Q_1 menjadi Q_2 sedangkan konsumsi akan meningkat dari Q_3 menjadi Q_4 karena kebijakan subsidi akan merubah harga dalam negeri menjadi lebih rendah. Subsidi ini akan menyebabkan peningkatan impor dari Q_3-Q_1 menjadi Q_4-Q_2 . Transfer pemerintah terdiri dari dua bagian, yaitu transfer dari pemerintah ke konsumen sebesar ABGH dan transfer dari produsen ke konsumen sebesar $P_w AP_d$. Dengan demikian akan terjadi kehilangan efisiensi ekonomi pada sisi konsumsi dan produksi. Di sisi produksi, output turun dari Q_2 menjadi Q_1 menyebabkan hilangnya pendapatan sebesar $Q_2 FAQ_1$ atau sebesar $P_w \times (Q_2 - Q_1)$, sehingga terjadi inefisiensi ekonomi sebesar AFB. Di sisi konsumsi *opportunity cost* akibat peningkatan konsumsi adalah sebesar $P_w \times (Q_4 - Q_3)$ atau sebesar $Q_3 EGHQ_4$ dengan kemampuan membayar konsumen sebesar $Q_3 EHQ_4$ sehingga terjadi inefisiensi sebesar EGH. Dengan demikian total inefisiensi yang terjadi adalah sebesar AFB dan EGH.

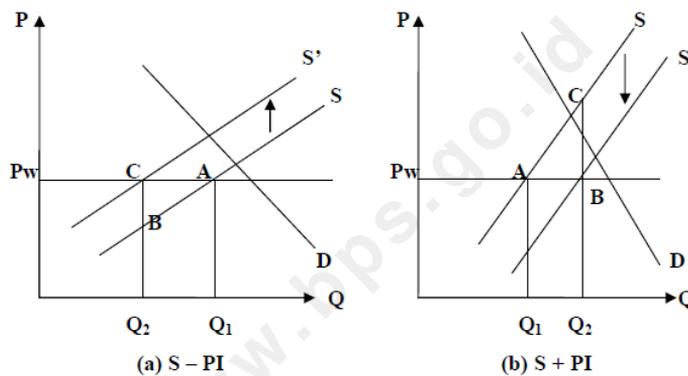
Gambar 2.1 (d) menunjukkan subsidi untuk barang ekspor, pada grafik tersebut harga dunia (P_w) lebih besar dari harga yang diterima produsen (P_p). Harga yang lebih rendah menyebabkan konsumsi barang ekspor menjadi meningkat dari Q_1 menjadi Q_2 . Perubahan ini akan menyebabkan *opportunity cost* sebesar $P_w \times (Q_2 - Q_1)$ atau area yang sama dengan kemampuan membayar konsumen yaitu $Q_1 CAQ_2$, dengan inefisiensi yang terjadi yaitu sebesar CBA.

2.3.2. Kebijakan Input

Kebijakan pemerintah dapat diterapkan pada input *tradable* dan *non-tradable*. Kebijakan pada kedua input tersebut dapat berupa subsidi positif maupun negatif (pajak) sedangkan kebijakan hambatan perdagangan hanya berlaku pada input *tradable* karena input domestik hanya diterapkan pada komoditas yang diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri.

a. Kebijakan Input *Tradable*

Kebijakan pada input *tradable* dapat berupa subsidi, pajak, dan hambatan perdagangan. Pengaruh subsidi dan pajak pada input *tradable* ditunjukkan pada Gambar 2.2 berikut ini.



Gambar 2.2.
Subsidi dan Pajak pada Input *Tradable*

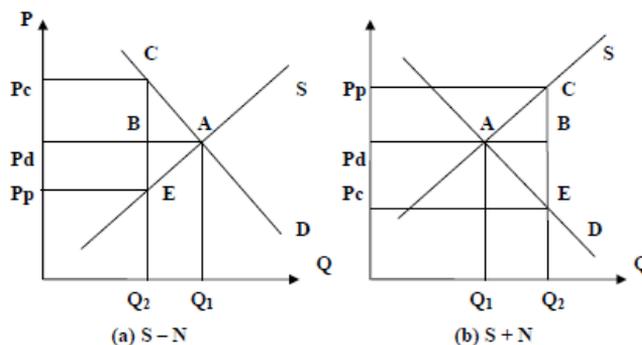
Sumber: Monke and Pearson (1989)

Gambar 2.2 (a) menunjukkan pengaruh pajak terhadap input *tradable* yang digunakan. Adanya pajak pada input menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga output domestik turun dari Q₁ menjadi Q₂ dan kurva penawaran (supply) bergeser ke atas. Efisiensi ekonomi yang hilang adalah sebesar ABC yang merupakan perbedaan antara nilai output yang hilang yaitu Q₁CAQ₂ dengan biaya produksi output sebesar Q₂BCQ₁.

Gambar 2.2 (b) menunjukkan dampak subsidi pada input *tradable* yang digunakan. Adanya subsidi pada input *tradable* menyebabkan biaya produksi semakin rendah sehingga kurva penawaran bergeser ke bawah (S') dan produksi meningkat dari Q₁ menjadi Q₂. Efisiensi yang hilang dari produksi adalah sebesar ABC yaitu perbedaan antara biaya produksi yang bertambah setelah meningkatnya output dengan peningkatan nilai output.

b. Kebijakan Input *Non-Tradable*

Kebijakan pemerintah pada input *non-tradable* meliputi kebijakan pajak dan subsidi. Ilustrasi mengenai kebijakan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3.
Dampak
Subsidi dan
Pajak pada
Input Domestik

Sumber: Monke and Pearson (1989)

Gambar 2.3 (a) menunjukkan bahwa sebelum diberlakukannya pajak terhadap input, harga dan jumlah keseimbangan dari penawaran input non *tradable* berada pada P_d dan Q_1 . Adanya pajak sebesar $P_d - P_p$ menyebabkan produk yang dihasilkan turun menjadi Q_2 . Harga yang diterima produsen turun menjadi P_p dan harga yang diterima konsumen naik menjadi P_c . Efisiensi ekonomi yang hilang dari produsen sebesar BCA dan dari konsumen hilang sebesar DBA.

Gambar 2.3 (b) menunjukkan bahwa sebelum diberlakukan subsidi terhadap input, harga dan jumlah keseimbangan dari permintaan dan penawaran input *non-tradable* berada pada P_d dan Q_1 . Subsidi akan menyebabkan produksi meningkat dari Q_1 menjadi Q_2 . Harga yang diterima produsen akan naik menjadi P_p sedangkan harga yang diterima oleh konsumen akan turun menjadi P_c . Efisiensi yang hilang dari produsen adalah sebesar ACB dan dari konsumen adalah sebesar ABE. Kehilangan efisiensi dapat dilihat dari perbandingan antara peningkatan nilai output dengan meningkatnya ongkos produksi dan meningkatnya keinginan konsumen untuk membayar.

2.4. Matriks Kebijakan Pemerintah (*Policy Analysis Matrix*)

Menurut Monke dan Pearson (1989), PAM (*Policy Analysis Matrix*) adalah alat yang digunakan untuk menganalisis pengaruh intervensi pemerintah dan dampaknya pada sistem komoditi. Sistem komoditi meliputi empat aktivitas yaitu aktivitas usaha tani (farm production), penyampaian dari usahatani ke pengolah, pengolahan, dan pemasaran. Metode PAM dapat digunakan untuk mengidentifikasi tiga hal, yaitu analisis keuntungan (Privat dan Sosial), analisis daya saing (keunggulan komparatif dan kompetitif), serta analisis dampak kebijakan pemerintah.

"Sistem komoditi meliputi empat aktivitas."

Ada beberapa asumsi yang digunakan dalam metode PAM, diantaranya:

1. Perhitungan berdasarkan harga privat (*privat cost*) yaitu harga yang benar-benar terjadi dan diterima oleh produsen dan konsumen atau harga yang benar-benar terjadi setelah adanya kebijakan.
2. Perhitungan berdasarkan harga sosial (*sosial cost*) atau harga bayangan (*shadow price*) yaitu harga pada kondisi pasar persaingan sempurna atau harga yang terjadi apabila tidak ada kebijakan.
3. Output bersifat *tradable* (dapat diperdagangkan) dan input dapat dipasarkan ke dalam komponen asing dan domestik.
4. Eksternalitas positif dan negatif dianggap saling meniadakan (Eksternalitas=0).

2.5. Harga Bayangan (*Social Opportunity Cost*)

Harga bayangan adalah harga yang akan menghasilkan alokasi sumberdaya terbaik sehingga akan memberikan pendapatan nasional tertinggi (Pearson et al. 2005). Kondisi biaya imbalan sama dengan harga pasar akan sangat sulit ditemukan maka untuk memperoleh nilai yang mendekati biaya imbalan atau harga sosial, perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga pasar yang berlaku. Alasan penggunaan harga bayangan adalah sebagai berikut:

1. Harga bayangan tidak mencerminkan korbanan yang dikeluarkan jika sumber daya tersebut dipakai untuk kegiatan lainnya.
2. Harga yang berlaku di pasar tidak menunjukkan apa yang sebenarnya diperoleh masyarakat melalui suatu produksi dari aktivitas tersebut.

Penentuan harga dasar yang terjadi belum tentu dapat dipakai langsung dalam analisis ekonomi karena tidak mencerminkan biaya imbalan sosial (*opportunity cost*). Suatu komoditi akan mempunyai biaya imbalan sama dengan biaya pasar jika berada pada pasar persaingan sempurna. Oleh karena itu, untuk memperoleh suatu nilai yang mendekati nilai biaya imbalan sosial diperlukan penyesuaian.

Penyesuaian menggunakan acuan seperti yang dilakukan Gittinger (1986). Dalam penelitian terhadap perusahaan komoditi terdapat komponen input yang berasal bukan dari domestik. Berdasarkan perhitungan tersebut digunakan pendekatan CIF (*Cost Insurance and Freight*) yang berarti bahwa biaya tataniaga dari produksi ditiadakan sehingga hanya menekankan harga perbatasan untuk output yang diimpor.

"Harga bayangan adalah harga yang akan menghasilkan alokasi sumberdaya terbaik."

2.6. Analisis Sensitivitas

"Analisis sensitivitas membantu menentukan unsur-unsur kritis yang berperan dalam menentukan hasil proyek."

Analisis sensitivitas bertujuan untuk melihat bagaimana perubahan faktor produktivitas, harga, dan kurs mata uang rupiah terhadap daya saing komoditi perkebunan. Menurut Kadariyah (1999), analisis sensitivitas dilakukan dengan cara: (1) Mengubah besarnya faktor-faktor yang penting, masing-masing terpisah atau beberapa dalam kombinasi dengan suatu persentase dan menentukan seberapa besar kepekaan hasil perhitungan terhadap perubahan-perubahan tersebut, (2) Menentukan seberapa besar faktor yang berubah sehingga hasil perhitungan membuat proyek tidak dapat diterima.

Analisis sensitivitas membantu menentukan unsur-unsur kritis yang berperan dalam menentukan hasil proyek. Analisis sensitivitas mengubah suatu faktor kemudian menentukan pengaruh dari perubahan tersebut terhadap hasil analisis. Kelemahan dari analisis sensitivitas adalah :

1. Tidak digunakan untuk pemilihan proyek karena merupakan analisis parsial yang hanya mengubah satu parameter pada saat tertentu.
2. Hanya mencatat apa yang terjadi jika faktor berubah-ubah dan bukan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu proyek.

Analisis sensitivitas dilakukan karena metode sebelumnya yaitu *Policy Analysis Matrix* hanya memberlakukan satu tingkat harga padahal dalam keadaan sebenarnya tingkat harga yang berlaku untuk input dan output sangat variatif. Oleh karena itu, analisis sensitivitas penting untuk dilakukan.

2.7 Kebijakan Pengembangan Komoditi Perkebunan Strategis

"Arah Kebijakan pengembangan komoditi perkebunan berdasarkan UU No. 18/2004 tentang Perkebunan."

Arah Kebijakan pengembangan komoditi perkebunan berdasarkan UU No. 18/2004 tentang Perkebunan, mengenai kawasan pengembangan perkebunan, yaitu wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan.

Adapun program pembangunan perkebunan hasil restrukturisasi program pembangunan perkebunan tahun 2010–2014 adalah "peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan". Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, penanganan pascapanen dan pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan.

Fokus pemerintah dari 127 komoditi binaan perkebunan program pembangunan perkebunan tahun 2010–2014 pengembangan difokuskan pada 15 komoditi strategis unggulan nasional yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao,

Kopi, Lada, Jambu Mete, Teh, Cengkeh, Jarak Pagar, Kemiri Sunan, Kapas, Tembakau dan Nilam. Fasilitasi dan Pembinaan dilakukan oleh PEMDA terhadap komoditi spesifik dan potensial di wilayahnya masing-masing serta 15 komoditi utama.

Fokus Pemerintah dalam pengembangan kawasan adalah Swasembada Gula Nasional, pengembangan komoditi ekspor khususnya kakao, karet dan kelapa sawit dalam rangka mendukung implementasi MP3EI.

2.8. Kajian Empirik Peremajaan Perkebunan

"Produktivitas tinggi dapat tercapai apabila saat melakukan peremajaan menggunakan klon unggul (Ernah, 2010)."

Tanaman perkebunan seperti kelapa, cengkeh, kelapa sawit, karet, kakao, teh dan kopi rata-rata memiliki umur ekonomis hingga puluhan tahun. Setelah umur ekonomis habis perlu dilakukan peremajaan agar tanaman perkebunan dapat berproduksi kembali. Peremajaan adalah mengganti tanaman tua dengan tanaman baru yang memiliki produktivitas dan kualitas tinggi serta secara ekonomi lebih menguntungkan dibandingkan tanaman sebelumnya (Ernah, 2010).

Peremajaan perkebunan merupakan salah satu kegiatan utama pemerintah baik pusat maupun daerah karena kontribusi sub sektor perkebunan terhadap nilai ekspor sektor pertanian Indonesia adalah yang terbesar mencapai 88 persen pada tahun 2013 (Kementerian Pertanian, 2014). Hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan peremajaan perkebunan adalah biaya produksi, penerimaan dan margin keuntungan. Keuntungan perkebunan dapat diperoleh apabila biaya rendah atau penerimaan tinggi yang bisa didapatkan melalui peningkatan produktivitas. Produktivitas tinggi dapat tercapai apabila saat melakukan peremajaan menggunakan klon unggul (Ernah, 2010).

Kegiatan peremajaan tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan harapan, karena adanya hambatan yang berasal dari pelaku usahatani itu sendiri. Kesulitan yang dihadapi petani adalah kurangnya modal untuk biaya penebangan, pembukaan lahan, dan pemagaran. Selain itu, peremajaan perkebunan juga dipengaruhi oleh musim pembukaan lahan yaitu musim kemarau (Boerhendly dan Agustina, 2006). Walaupun terdapat kendala dalam peremajaan perkebunan, namun kegiatan tersebut harus dilakukan untuk menjamin keberlangsungan hidup para petani yang menggantungkan hidupnya di sektor perkebunan. Terdapat berbagai macam komoditi perkebunan, akan tetapi komoditi yang dikaji dalam penelitian ini hanya mencakup kelapa, cengkeh, kelapa sawit, karet, kakao, teh dan kopi.

Peremajaan perkebunan karet sebagai wujud untuk mengembangkan pertanian di Provinsi Jambi menjadi agenda utama pemerintah daerah setempat sejak tahun 2006 hingga 2010 (Sihotang *et al*, 2009). Kegiatan peremajaan tersebut dilakukan karena karet merupakan tanaman perkebunan utama di Jambi dan menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian penduduk Jambi. Karet akan menghasilkan setelah lima tahun dan memiliki umur ekonomis selama 30 tahun (Boerhendly dan Agustina, 2006; Sihotang *et al*, 2009). Setelah habis umur ekonomis karet, maka kayu karet dapat menjadi alternatif peremajaan perkebunan karet karena hasil olahan kayu karet sama baiknya dengan kayu lainnya (Boerhendly dan Agustina, 2006).

Pola peremajaan perkebunan karet yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Jambi adalah peremajaan partisipatif berbasis agribisnis dan agroindustri. Pemberdayaan partisipatif juga melibatkan pemda Kabupaten dan Provinsi Jambi, selain petani sebagai aktor utama dalam program peremajaan perkebunan karet. Petani sangat menentukan keberhasilan program ini. Selain petani, peran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten juga penting, yaitu menyediakan pedoman pembinaan secara keseluruhan dan bermitra dengan perusahaan swasta dalam pengadaan dan pendistribusian bibit dan faktor produksi lainnya (Sihotang *et al*, 2009).

Metode dan waktu peremajaan perkebunan kelapa berbeda dengan perkebunan karet. Kelapa memiliki umur ekonomis selama 50 tahun dan setelahnya tidak lagi menguntungkan karena biaya panen meningkat seiring pertambahan tinggi pohon sehingga pendapatan yang diperoleh menurun. Oleh karena itu, peremajaan kelapa sebaiknya dilakukan setelah berumur 50 tahun.

Peremajaan perkebunan kelapa yang paling efektif dengan tebang bertahap sebesar 20 persen per tahun yang diikuti dengan penanaman tanaman sela diantara kelapa (polikultur) dengan jarak dan sistem tanam kelapa 6 x 16 meter (Benhdard, 2005). Menurut Benhdard (2005) sistem tebang bertahap efektif karena fleksibel dalam memilih tanaman sela yang sesuai iklim dan pasar serta dapat terus menghasilkan. Penanaman tanaman sela dalam perkebunan kelapa berarti memiliki dua tanaman atau lebih pada satu lahan perkebunan, sehingga petani memperoleh pendapatan dari kedua tanaman tersebut atau jika salah satu harga dari tanaman menurun, maka dapat ditutupi dari hasil tanaman lainnya.

Komoditi tanaman perkebunan lainnya adalah kakao. Kakao merupakan salah satu tanaman perkebunan unggulan Indonesia. Sama seperti jenis tanaman perkebunan lainnya, perkebunan kakao juga membutuhkan peremajaan karena kondisi tanaman kakao yang sudah tua dan tidak lagi menguntungkan. Waktu optimum peremajaan kakao menurut Ernah (2010) yaitu saat kakao mencapai umur 44 tahun di Perkebunan Rajamandala dengan pola optimum peremajaan sebesar 2.2 persen dari luas areal yang akan diremajakan. Waktu optimum

peremajaan kakao berbeda-beda antar tempat karena adanya pengaruh faktor luar seperti iklim, jenis tanah, topografi, penerapan teknologi dan manajemen. Berbeda komoditinya, maka berbeda pula cara meremajakan perkebunannya seperti pada kakao dan kelapa sawit.

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan andalan Indonesia karena menyumbang devisa terbesar dari sektor pertanian. Prospek yang baik dari perkebunan kelapa sawit membuat masyarakat banyak membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Hal ini berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, namun bila tidak diiringi dengan perawatan dan peremajaan kebun, maka perkebunan tersebut tidak lagi menghasilkan.

Secara umum paket teknologi peremajaan perkebunan besar kelapa sawit, telah cukup tersedia dan dianut selama ini, yaitu metode tebang total. Dalam rangka kesinambungan siklus produksi dan *cash flow*, maka ditempuh cara pelaksanaan peremajaan sekitar 4 persen dari total luas areal per-tahun. Namun pendekatan yang dimaksud tidak mungkin dapat terlaksana pada perkebunan rakyat. Pelaksanaan peremajaan pada perkebunan rakyat kelapa sawit banyak hal yang harus dicermati, yaitu terjadinya kehilangan pendapatan pada periode TBM dan biaya peremajaan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah telah mengadakan kegiatan peremajaan kelapa sawit untuk perkebunan rakyat sejak tahun 2011 berupa pemberian bantuan dana kegiatan pengembangan model peremajaan perkebunan rakyat kelapa sawit (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2013a).

Kopi merupakan komoditi penting perkebunan yang diperdagangkan secara internasional. Indonesia adalah salah satu penghasil kopi di dunia akan tetapi produktivitas dan mutu hasil kopi Indonesia belum seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk memperbaiki mutu dan produktivitas kopi salah satunya dengan peremajaan perkebunan kopi robusta seluas 100 ha di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ponorogo (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2013b).

Peremajaan kopi dilakukan pada areal tanaman kopi yang berumur lebih dari 25 tahun, produktivitas < 500 kg/ha/tahun, populasi tanaman tidak memenuhi standar teknis (kurang dari 1.000 pohon/ha). Benih kopi yang digunakan pada kegiatan peremajaan kopi robusta tahun 2014 adalah benih kopi konvensional siap tanam dalam *polybag*, benih kopi dengan teknologi perbanyakan *Somatic Embryogenesis* (SE) dalam *polybag* sebanyak 1.000 batang/ha dengan kriteria sesuai dengan standar mutu benih kopi konvensional dan *Somatic Embryogenesis* (SE) siap tanam (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2013b).

2.9. Kerangka Pemikiran

“Pemetaan peremajaan komoditi perkebunan diperlukan untuk perumusan kebijakan.”

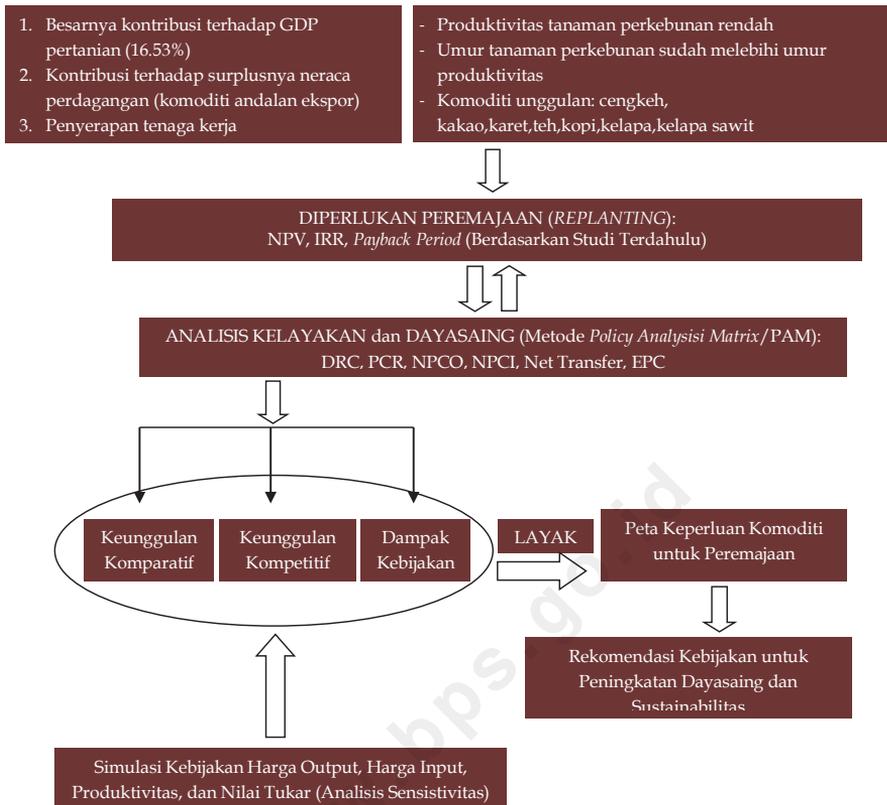
Peran subsektor perkebunan bagi perekonomian Indonesia cukup strategis dengan kontribusinya terhadap pembentukan GDP sektor pertanian yang mencapai 16,53 persen. Peran lain dari subsektor ini adalah penyumbang surplus terhadap neraca perdagangan Indonesia. Subsektor perkebunan ini banyak diusahakan oleh rumah tangga (perkebunan rakyat) yang mampu menyerap tenaga kerja.

Menurut Kementerian Perdagangan, komoditi perkebunan yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ekspor diantaranya adalah kelapa, karet, kakao, cengkeh, kopi, teh, dan kelapa sawit. Sebagai tanaman tahunan, komoditi tersebut dapat dipanen setiap tahun selama masa produktifnya. Akan tetapi, produksi akan berkurang setelah melewati masa produktif dan tanaman perlu diganti dengan tanaman baru.

Kondisi tanaman perkebunan di Indonesia saat ini ternyata banyak yang sudah tua dan hampir melewati masa produktifnya. Sehingga produktivitas dari komoditi ini berkurang yang juga terkendala dengan penambahan luas lahan. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas komoditi perkebunan tersebut adalah dengan melakukan peremajaan. Kegiatan peremajaan ini cukup sulit dilakukan karena besarnya dana yang dibutuhkan dan berkurangnya pendapatan petani selama kegiatan peremajaan dilakukan. Untuk itu, perlu dilakukan analisis mengenai dampak dari kebijakan ini. Apakah dengan kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas dari komoditi perkebunan. Analisis ini akan dilakukan dengan metode *Policy Analysis Matrix* (PAM).

Berdasarkan hasil analisis dengan metode PAM diperoleh nilai-nilai yang dapat menunjukkan keunggulan komparatif dan kompetitif serta alternatif kebijakan. Analisis keunggulan komparatif ditunjukkan oleh nilai keuntungan sosial dan rasio biaya sumberdaya domestik. Sedangkan, keunggulan kompetitif ditunjukkan dengan nilai keuntungan privat dan nilai rasio biaya privat. Dari nilai tersebut akan diketahui bahwa suatu komoditi dapat bersaing atau tidak di pasar internasional. Analisis sensitivitas digunakan untuk menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif suatu komoditi, jika terjadi perubahan harga input dan output baik perubahan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah maupun lainnya. Analisis sensitivitas dapat mempengaruhi matriks PAM sehingga keunggulan komparatif dan kompetitif yang diperoleh akan mengalami perubahan. Skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Dari hasil analisis dapat dipetakan kebutuhan peremajaan komoditi perkebunan, sehingga dapat dibuat rekomendasi kebijakan untuk peningkatan produktivitas komoditi tersebut. Dengan meningkatnya produktivitas maka diharapkan akan dapat menjaga keberlanjutan ekspor dan peningkatan daya saing.



Gambar 2.4.

Kerangka
Pemikiran
Penelitian

3

Metode Penelitian

<http://www.bps.go.id>

BAB 3

Metode Penelitian

"Kebijakan sektor pertanian dapat didekati melalui kebijakan makroekonomi, kebijakan harga dan kebijakan investasi."



3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Sensus Pertanian 2013 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan *Food and Agriculture Organization* (FAO). Berdasarkan tujuan yang akan dianalisis, data utama yang digunakan antara lain (1) input-output usahatani, (2) biaya distribusi, (3) harga input, (4) harga output, (5) kebijakan pemerintah. Data yang dikumpulkan meliputi tujuh komoditi perkebunan yaitu komoditi kelapa, cengkeh, kelapa sawit, karet, kakao, teh dan kopi.

3.2. Policy Analysis Matrix (PAM)

Kebijakan sektor pertanian dapat didekati melalui kebijakan makroekonomi, kebijakan harga dan kebijakan investasi. Kebijakan harga dan investasi dapat dianalisis menggunakan metode *Policy Analysis Matrix* (PAM).

Matriks PAM terdiri dari tiga baris dan empat kolom. Baris pertama bertujuan untuk mengestimasi keuntungan privat yaitu perhitungan penerimaan dan biaya berdasarkan harga yang berlaku. Baris kedua bertujuan untuk mengestimasi keunggulan ekonomi dan daya saing (komparatif), yaitu perhitungan penerimaan dan biaya berdasarkan harga sosial (*shadow price*). Baris ketiga adalah selisih antara harga privat dengan harga sosial yang

menggambarkan divergensi. Kolom pertama adalah kolom penerimaan, kolom kedua adalah biaya input asing (*tradable*), kolom ketiga adalah biaya input domestik (*non-tradable*), dan kolom keempat adalah kolom keuntungan (selisih antara penerimaan dengan biaya). Berikut adalah matriks PAM (Tabel 3.1).

Tabel 3.1.
Matriks PAM

Keterangan	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Input <i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai Finansial (Harga Privat)	A	B	C	D
Nilai Ekonomi (Harga Sosial)	E	F	G	H
Divergensi	I	J	K	L

Keterangan:

Keuntungan Privat (D) = A-(B+C)

Keuntungan Sosial (H) = E-(F+G)

Transfer Output (I) = A-E

Transfer Input Asing (J) = B-F

Transfer Input Domestik (K) = C-G

Transfer Bersih (L) = I-(K+J)

Sumber: (Pearson *et al*, 2005)

Analisis Dampak Kebijakan

Analisis ini digunakan untuk mengetahui efisiensi dan daya saing usahatani dengan metode PAM (Pearson *et al*, 2005; Muslim dan Nurasa, 2011), yaitu:

1. Analisis Domestic Resource Cost Ratio (DRC) dan Private Cost Ratio (PCR)

a. $DRC = \frac{G}{E-F}$

G : Biaya sosial *non tradable* input

E : Penerimaan sosial

F : Biaya sosial *tradable* input

DRC < 1 artinya usahatani lebih efisien dalam penggunaan sumber daya domestik.

DRC > 1 artinya usahatani tidak efisien dalam penggunaan sumber daya domestik.

b. $PCR = \frac{C}{A-B}$

C : Biaya privat *non-tradable* input

A : Penerimaan privat

B : Biaya privat *tradable* input

PCR < 1 artinya usahatani mempunyai keunggulan kompetitif.

PCR > 1 artinya usahatani tidak mempunyai keunggulan kompetitif.

2. Analisis dampak kebijakan terhadap harga faktor-faktor produksi yang diekspor dan diimpor (*Tradable Input*)

$$\text{NPCI (Nominal Protection Coefficient Input)} = \frac{B}{F}$$

B : Biaya privat *tradable* input

F : Biaya sosial *tradable* input

NPCI < 1 artinya dampak kebijakan pemerintah memberikan insentif bagi petani.

NPCI > 1 artinya dampak kebijakan pemerintah tidak memberikan insentif bagi petani.

3. Analisis dampak kebijakan terhadap harga output

$$\text{NPCO (Nominal Protection Coefficient Output)} = \frac{A}{E}$$

A : Penerimaan privat

E : Penerimaan sosial

NPCO < 1 artinya dampak kebijakan pemerintah menghambat peningkatan produksi.

NPCO > 1 artinya dampak kebijakan pemerintah mendorong peningkatan produksi.

4. Analisis dampak kebijakan harga faktor produksi (input) dan harga output

- a. NT (*Net Transfer*) = D-H

D : Keuntungan privat

H : Keuntungan sosial

NT (-) artinya terdapat kebijakan pemerintah pada harga faktor produksi yang diperdagangkan (*tradable* input) dan harga faktor produksi yang tidak diperdagangkan secara keseluruhan merugikan petani.

NT (+) artinya kebijakan pemerintah secara keseluruhan menguntungkan pelaku usahatani.

- b. EPC (*Effective Protection Coefficient*) = $\frac{A-B}{E-F}$

A : Penerimaan privat

B : Biaya privat *tradable* input

E : Penerimaan sosial

F : Biaya sosial *tradable* input

EPC < 1 artinya kebijakan pemerintah disinsentif atau kurang mendukung petani untuk mengembangkan produksi.

EPC > 1 artinya kebijakan pemerintah memberikan perlindungan atau mendukung petani untuk mengembangkan produksi.

3.1.1. Penentuan Harga Bayangan

Harga finansial atau harga privat merupakan langkah awal dalam melakukan analisa ekonomi. Analisa ekonomi dilakukan untuk melihat perekonomian secara keseluruhan. Pada analisa ekonomi, harga yang digunakan adalah harga bayangan yaitu harga yang mencerminkan nilai ekonomi sesungguhnya dari suatu biaya maupun unsur penerimaan (Kadariah, 1988).

Harga Bayangan Output

Penyesuaian harga finansial atas barang-barang yang diperdagangkan seperti pada output perkebunan dilakukan dengan dua cara yaitu, apabila output yang dihasilkan merupakan komoditi ekspor maka digunakan harga perbatasan yaitu harga FOB (*Free On Board*), sedangkan bila output merupakan komoditi impor maka harga yang digunakan adalah harga paritas impor atau CIF (*Cost Insurance Freight*).

a. Harga Bayangan Kakao

Indonesia merupakan salah satu eksportir kakao dunia sehingga harga bayangan kakao ditetapkan melalui harga paritas ekspor. Harga FOB kakao sebesar US\$ 2.824,54 per ton yang kemudian dikalikan dengan nilai tukar bayangan (*shadow exchange rate/SER*) sebesar Rp 12.092. Selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan mengurangi biaya transportasi dan *handling* serta faktor konversi sehingga terbentuklah harga kakao di tingkat petani di masing-masing provinsi.

b. Harga Bayangan Karet

Pada tahun 1970 ekspor karet Indonesia sebesar 581.190 ton dan meningkat 364 persen menjadi 2.701.995 ton pada tahun 2013 (Kementerian Pertanian, 2014). Oleh karena itu perhitungan harga bayangan karet menggunakan harga paritas ekspor sebesar US\$ 2.200 per ton. Nilai tersebut selanjutnya dikalikan dengan SER Rp 12.092 yang kemudian dikurangi dengan biaya transportasi dan *handling* serta faktor konversi sehingga terbentuklah harga paritas karet di tingkat petani untuk masing-masing provinsi penghasil karet.

c. Harga Bayangan Kelapa Sawit

Nilai ekspor kelapa sawit pada tahun 2013 mencapai US\$ 4.978.533.000 (Kementerian Pertanian, 2014), nilai ini relatif besar sehingga harga bayangan sawit ditetapkan melalui harga FOB. Harga paritas ekspor kelapa sawit sebesar US\$ 886,46 per ton. Harga tersebut dikalikan dengan SER yang selanjutnya dikurangi dengan biaya transportasi dan *handling* serta dikalikan dengan faktor konversi sehingga menghasilkan harga bayangan sawit di tiap-tiap provinsi.

d. Harga Bayangan Kelapa

Harga bayangan kelapa didekati dengan menggunakan harga FOB. Harga FOB sebesar US\$ 3.362 per ton. Harga ini kemudian dikalikan dengan nilai SER sebesar Rp 12.092 dikurangkan dengan biaya transportasi dan handling sehingga terbentuk harga bayangan kelapa di tingkat petani.

e. Harga Bayangan Teh

Volume ekspor teh yang masih lebih tinggi dari impor sehingga untuk harga bayangan teh digunakan harga FOB teh sebesar US\$ 1.800 per ton (DewanTeh Indonesia, 2015). Harga tersebut kemudian dikalikan dengan SER dan dikurangi dengan biaya transportasi dan handling sehingga didapatkan harga bayangan teh di tingkat petani pada masing-masing provinsi.

f. Harga Bayangan Cengkeh

Harga bayangan cengkeh diambil dari harga paritas ekspor karena cengkeh merupakan komoditi ekspor Indonesia. Harga paritas ekspor cengkeh sebesar US\$ 31.800 per ton yang kemudian dikonversi kedalam nilai rupiah setelah dikalikan dengan nilai tukar bayangan (Kementerian Pertanian, 2014). Nilai tersebut kemudian dikurangkan dengan biaya transportasi dan handling sehingga terbentuk harga bayangan cengkeh di tingkat petani.

g. Harga Bayangan Kopi

Harga bayangan kopi merupakan harga paritas ekspor sebesar US\$ 1.952,4 per ton. Harga tersebut kemudian disesuaikan dengan nilai SER yang kemudian dikurangi dengan biaya transportasi dan handling sehingga didapat harga bayangan kopi di tingkat petani untuk setiap propinsi.

Harga Bayangan Input

Harga bayangan input didekati dengan dua macam perhitungan yaitu perhitungan harga yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan yang disebut faktor domestik. Input yang dapat diperdagangkan baik diekspor ataupun diimpor adalah pupuk, pestisida, dan obat-obatan sedangkan input yang tidak diperdagangkan adalah tenaga kerja, modal, lahan, dan peralatan.

a. Harga Pupuk

Pupuk yang digunakan dalam analisis PAM komoditi perkebunan ini terdiri dari pupuk urea, SP-36, ZA, NPK dan KCL. Harga bayangan pupuk urea, SP-36, dan ZA pupuk tersebut menggunakan harga FOB karena Indonesia merupakan net eskportir pupuk walaupun telah dibuka keran impor untuk pupuk. Harga FOB pupuk urea, SP-36, ZA, berturut-turut adalah US\$ 0,44 per kg, US\$ 0,23 per kg, dan US\$ 0,35 per kg. Harga tersebut kemudian dikalikan dengan nilai tukar bayangan sehingga diperoleh harga dalam mata uang domestik sebesar Rp 5.320,63 per kg untuk urea, Rp 2.781,24 untuk SP-36, dan Rp 4.232,32 untuk ZA. Selanjutnya disesuaikan dengan mengurangi terhadap biaya transportasi dan *handling* sehingga diperoleh harga bayangan pupuk.

Pupuk lainnya yaitu NPK dan KCL, penentuan harga bayangan didekati dengan pengurangan harga privat dengan bea masuk 5 persen dan PPN 10 persen. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa harga bayangan NPK dan KCL adalah Rp 9.605, dan Rp 1.700.

b. Harga Pestisida dan Obat-Obatan

Jenis pestisida dan obat-obatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pestisida padat, cair serta stimulan cair. Harga bayangan input-input tersebut ditentukan berdasarkan harga FOB, namun untuk mempermudah proses perhitungan maka harga pestisida dan obat-obatan mengacu kepada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Saptana (2009) dalam Rahmi (2014) dan Saptana *et al.* (2004) dalam Rahmi (2014). Harga bayangan stimulan cair sebesar Rp 476.000,00 per liter, insektisida cair sebesar Rp 469.760,00 per liter, insektisida padat/tepung sebesar Rp 257.600,00 per kg,

c. Harga Bayangan Lahan

Harga bayangan lahan ditentukan dengan berbagai macam alternatif, seperti: (1) nilai sewa lahan yang berlaku di daerah penelitian, (2) menerapkan prinsip *sosial opportunity cost* lahan di daerah penelitian (menghitung nilai lahan yang hilang karena menanam komoditi yang sedang ditaman sebagai konsekuensi akibat tidak menanam komoditi terbaik pada lahan yang bersangkutan), dan (3) tidak memasukan biaya lahan dalam perhitungan usahatani baik untuk privat maupun sosial, sehingga nilai keuntungan tidak hanya merupakan balas jasa untuk manajemen tetapi juga untuk lahan (*return to management and land*).

Berdasarkan Gittinger (2008) harga bayangan lahan dapat ditentukan dari nilai sewa lahan, sehingga harga bayangan lahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai sewa lahan yang berlaku di setiap provinsi.

d. Harga Bayangan Tenaga Kerja

Harga bayangan tenaga kerja dihitung dengan melihat apakah terjadi kegagalan pasar ataupun distorsi kebijakan di pasar tenaga kerja (Pearson *et al*, 2005). Terdapat dua jenis kegagalan pasar yang bisa mempengaruhi pasar tenaga kerja yaitu monopsoni dan oligopsoni. Dua jenis distorsi pasar tenaga kerja yang dapat mempengaruhi upah tenaga kerja di negara berkembang adalah peraturan upah minimum dan tunjangan pension serta kesehatan. Dua jenis distorsi pasar ini umumnya tidak bisa diterapkan di sektor pertanian, sehingga upah tenaga kerja bayangan yang digunakan adalah sama dengan harga privatnya.

e. Harga Bayangan Modal

Harga bayangan modal berdasarkan Pearson *et al* (2005) dilakukan dengan menambahkan harga privat bunga modal dengan tingkat inflasi. Inflasi merupakan faktor koreksi terhadap suku bunga. Nilai suku bunga yang sudah dikoreksi merupakan cerminan biaya bunga sosial.

f. Harga Bayangan Peralatan

Penentuan harga bayangan/sosial peralatan pertanian dalam penelitian ini didekati dengan menggunakan nilai penyusutan per tahunnya. Sebelum dilakukan perhitungan penyusutan, harga privat peralatan (nilai beli) yang dijadikan dasar perhitungan terlebih dahulu dikurangi dengan PPN 10 persen. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah yang mengintervensi produksi dan perdagangan alat-alat tersebut secara langsung, kecuali beban biaya PPN terhadap peralatan tersebut.

Nilai Tukar Bayangan

Harga bayangan nilai tukar adalah harga atau nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing yang terjadi pada saat pasar nilai tukar uang berada pada kondisi persaingan sempurna dan seimbang. Pendekatan untuk menghitung harga bayangan nilai tukar ini bisa dilakukan dengan menggunakan *Standard Conversion Factor* (SCF). Squire dan Van Der Tak (1975) dalam Gittinger (1986), menformulasikan suatu rumus untuk menghitung harga bayangan nilai tukar sebagai berikut:

$$SER_t = \frac{OER_t}{SCF_t}$$

Dimana:

SER_t : Nilai Tukar Bayangan (Rp/US\$) untuk tahun ke-t

OER_t : Nilai Tukar Resmi (Rp/US\$) untuk tahun ke-t

SCF_t : Faktor Konversi Standard untuk tahun ke-t

Nilai faktor konversi standar yang merupakan rasio dari nilai impor dan ekspor ditambah pajaknya dapat ditentukan sebagai berikut :

$$SCF_t = \frac{X_t + M_t}{(X_t - T_{xt}) + (M_t + T_{mt})}$$

Dimana:

SCF_t : Faktor Konversi Standard untuk tahun ke-t

X_t : Nilai ekspor Indonesia untuk tahun ke-t (Rp)

M_t : Nilai impor Indonesia untuk tahun ke-t (Rp)

T_{xt} : Penerimaan pemerintah dari pajak ekspor untuk tahun ke-t (Rp)

T_{mt} : Penerimaan pemerintah dari pajak impor untuk tahun ke-t (Rp)

Data yang digunakan untuk menghitung nilai SER diperoleh dari BPS dan Bank Indonesia. Nilai tukar resmi pada tahun 2013 berdasarkan Bank Indonesia sebesar Rp 12.128 per US\$. Berdasarkan data yang telah didapat, maka nilai SER sebesar Rp 12.092.

3.1.2. Analisis *Switching Value*

Analisis *switching value* dilakukan jika terdapat elemen yang kurang baik dalam hasil analisis dan akan diganti agar hasil analisis dapat memenuhi tingkat minimum diterimanya suatu analisis (Gittinger, 2008). Analisis *switching value* yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengubah besaran harga output, harga input, produktivitas, maupun nilai tukar agar nilai DRC yang diperoleh lebih besar atau sama dengan satu ($DRC \geq 1$). Perubahan dilakukan pada harga output sosial yaitu harga paritas di tingkat petani untuk setiap komoditi yang ada di penerimaan sosial. Sedangkan harga input yang diubah adalah total biaya input sosial dari seluruh input yaitu pupuk, pestisida dan stimulan yang ada di biaya *tradable* sosial. Untuk produktivitas yang diubah adalah produktivitas yang ada di penerimaan sosial. Sedangkan untuk nilai tukar yang diubah adalah *Official Exchange Rate* (OER) dalam bentuk Rp/US\$.

Perubahan dilakukan pada sisi sosial untuk membuat $DRC \geq 1$ (sudah tidak berdayasaing). Hal ini dilakukan karena perhitungan DRC dilakukan dari sisi sosialnya. Perubahan pada harga output, harga input, produktivitas dan nilai tukar bisa naik/turun tergantung pada kondisi awal dari DRC. Jika kondisi awal menunjukkan $DRC < 1$ (berdayasaing), maka untuk membuat $DRC \geq 1$ perubahan yang terjadi adalah harga output dan produktivitas menurun. Sedangkan harga input harus meningkat. Kondisi sebaliknya ketika terjadi jika pada awalnya $DRC > 1$ (tidak berdayasaing). Sedangkan nilai tukar rupiah dapat terapresiasi maupun depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat (US\$). Jika nilai tukar rupiah terhadap US\$ terapresiasi maka akan mempengaruhi harga output (penerimaan sosial) dan harga input yang diimpor (biaya sosial *tradable*).

<http://www.bps.go.id>

4

Struktur Ongkos Usahatani Komoditi Perkebunan

BAB 4

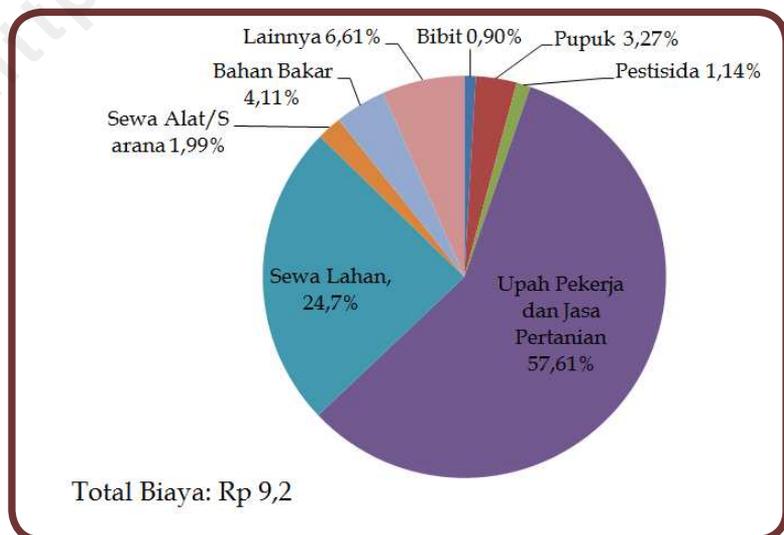
Struktur Ongkos Usahatani Komoditi Perkebunan

“Komposisi biaya terbesar digunakan untuk membayar upah pekerja dan jasa pertanian.”



4.1. Struktur Ongkos Usahatani Karet

Total biaya per musim tanam untuk usahatani karet sebesar 9,2 juta rupiah (Gambar 4.1). Komposisi biaya terbesar digunakan untuk membayar upah pekerja dan jasa pertanian. Persentase upah pekerja dan jasa pertanian sebesar 57,61 atau setara dengan 5,3 juta rupiah. Selain itu, biaya sewa lahan juga relatif besar yaitu sebesar 24,37 persen (Rp 2,2 juta). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp 12,8 juta.



Gambar 4. 1.

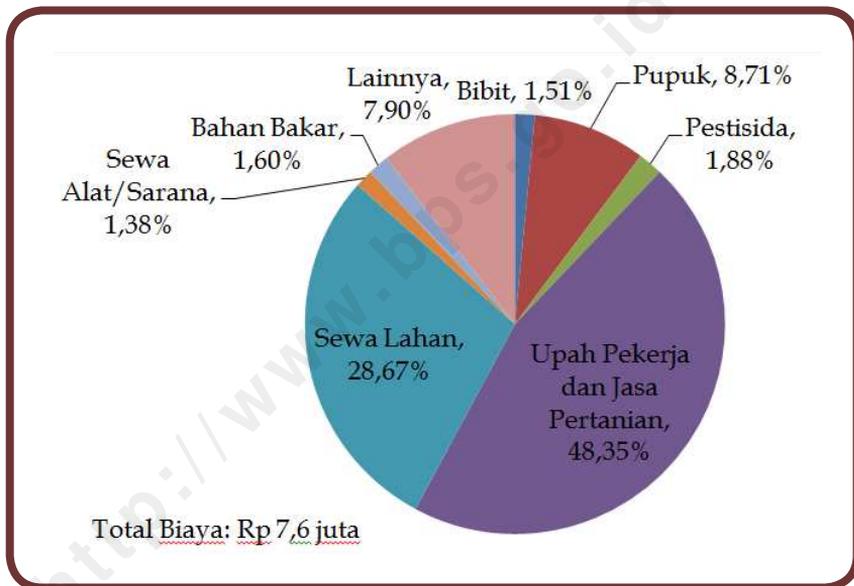
Struktur Ongkos Usahatani Karet Per Musim Tanam per Hektar, 2014

Sumber: BPS, 2015

Upah pekerja dan jasa pertanian mencakup banyak kegiatan, kegiatan yang paling banyak menyerap biaya adalah pemanenan sebesar 34,56 persen (Rp 4,5 juta). Hal tersebut memberikan informasi bahwa usahatani karet masih dilakukan dengan system padat karya, sehingga diperlukan usaha untuk menguranginya.

4.2. Struktur Ongkos Usahatani Kopi

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen kopi sebesar Rp7,6 juta per hektar. Komponen biaya produksi usaha tanaman kopi yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencapai 48,35 persen dari total biaya. Selain itu, biaya produksi yang juga relatif besar adalah pengeluaran untuk sewa lahan dan pupuk yakni masing-masing sebesar 28,67 dan 8,71 persen.



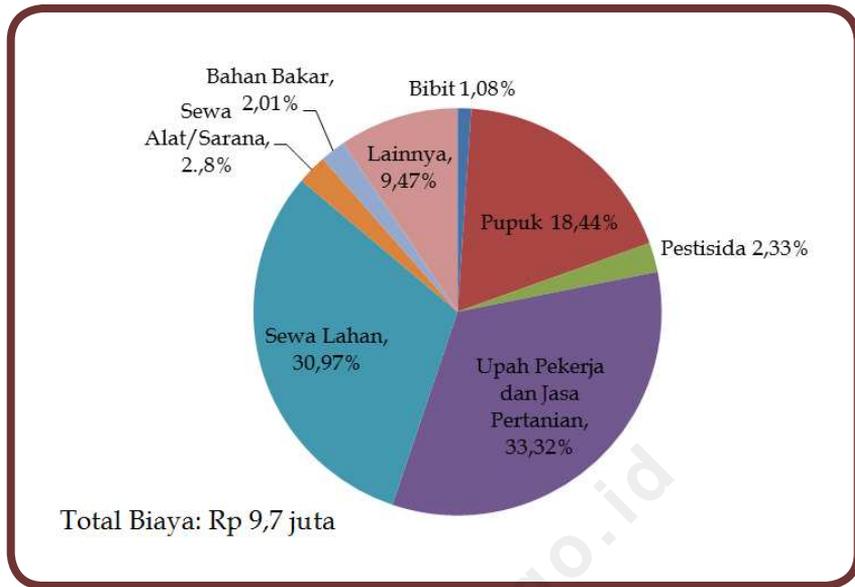
Gambar 4.2.
Struktur Ongkos Pengeluaran per Hektar dari Usaha Perkebunan Tanaman Kopi, 2014

Sumber: BPS, 2015

Komponen biaya untuk bibit, pestisida, sewa alat/sarana dan bahan bakar relatif kecil (kurang dari 2%). Sedangkan untuk pengeluaran upah pekerja dan jasa pertanian yang terbesar adalah untuk kegiatan pemanenan, pemeliharaan (pemangkasan dan penyiangan), pengolahan lahan dan pemupukan.

4.3. Struktur Ongkos Usahatani Kelapa Sawit

Total biaya produksi kelapa sawit per musim tanam per hektar sebesar 9,7 juta rupiah, sedangkan nilai produksi mencapai 17 juta rupiah. Hal ini berarti usahatani kelapa sawit menguntungkan karena produksi lebih besar dibandingkan pengeluaran (Gambar 4.3).



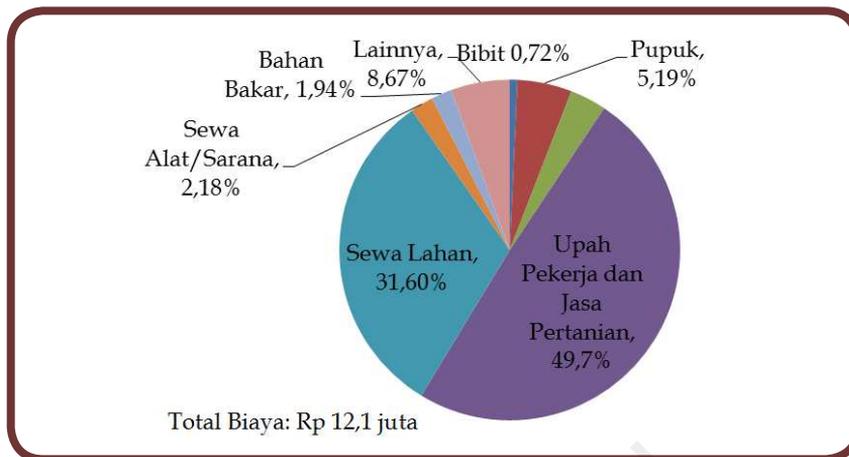
Sumber: BPS, 2015

Gambar 4. 3.
Struktur Ongkos Usahatani Kelapa Sawit Per Musim Tanam per Hektar, 2014

Biaya produksi terbesar terdapat pada upah tenaga kerja dan jasa pertanian sebesar 33,32 persen (Rp 3,15 juta) dan juga pada bagian sewa lahan sebesar 30,97 persen (Rp 2,9 juta). Upah pekerja dan jasa pertanian yang dikeluarkan mencakup pengolahan, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, pengendalian hama, pemanenan, dan pengeringan. Kontribusi terbesar terdapat pada kegiatan pemanenan sebesar 19,77 persen (Rp 1,9 juta).

4.4. Struktur Ongkos Usahatani Kakao

Nilai produksi usahatani kakao per musim tanam per hektar sebanyak 14,72 juta rupiah, sedangkan total biaya produksi yang dikeluarkan sebesar Rp 12,1 juta. Bagian terbesar dari biaya produksi dihabiskan untuk membayar pekerja dan jasa pertanian seperti yang pada Gambar 4.4. Upah pekerja dan jasa pertanian mencapai 49,7 persen atau setara dengan Rp 5,94 juta. Selain itu biaya produksi yang besar adalah sewa lahan sebesar 31,6 persen.



Gambar 4. 4.

Struktur Ongkos Usahatani Kakao Per Musim Tanam per Hektar, 2014

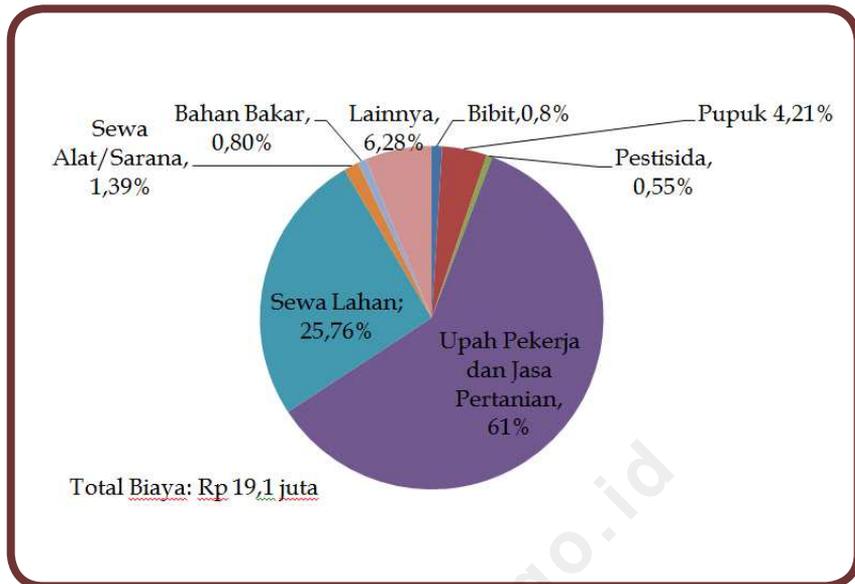
Sumber: BPS, 2015

Biaya untuk membayar upah pekerja dan jasa pertanian yang terbesar bersumber dari aspek pemanenan dan pengeringan. Biaya pemanenan menghabiskan Rp 2,4 juta dari total Rp 5,94 juta, sedangkan biaya pengeringan sebesar 9,99 persen (Rp 1,2 juta). Besarnya upah pekerja yang harus dikeluarkan mengindikasikan bahwa usahatani kakao masih berproduksi secara padat karya.

4.5. Struktur Ongkos Usahatani Cengkeh

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen cengkeh sebesar Rp19,1 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman cengkeh yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencapai 61 persen dari total biaya. Selain itu, biaya produksi yang juga relatif besar adalah pengeluaran untuk sewa lahan yakni sebesar 25,76 persen.

Dalam ST2013 SPW upah pekerja dan jasa pertanian yang dikeluarkan petani mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman pohon pelindung, penanaman tanaman perkebunan, pemeliharaan (pemangkasan dan penyiangan), pemupukan, pengendalian hama/OPT, pemanenan, dan pengeringan. Di antara jenis kegiatan tersebut, pengeluaran upah pekerja dan jasa pertanian yang terbesar adalah untuk kegiatan pemanenan, pemeliharaan (pemangkasan dan penyiangan), pengolahan lahan dan pemupukan.



Gambar 4.5.

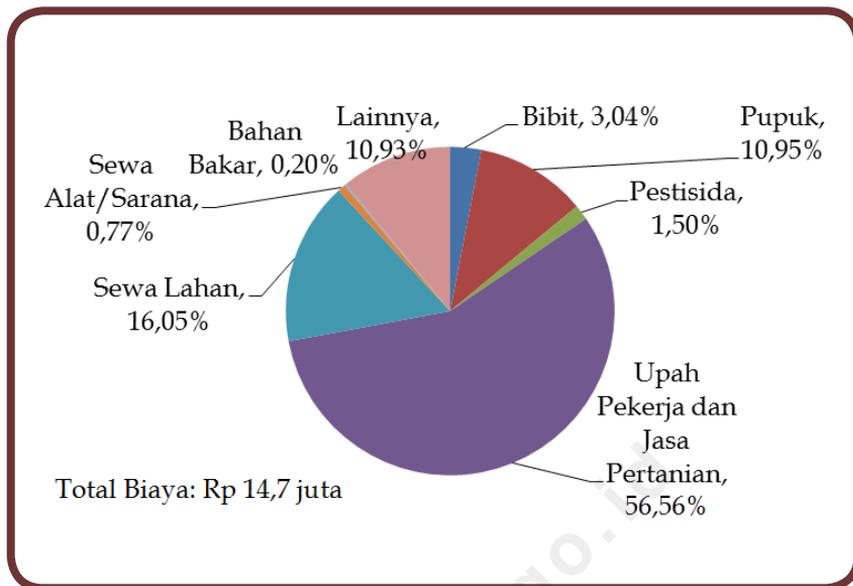
Struktur Ongkos Usahatani Cengkeh Per Musim Tanam per Hektar, 2014

Sumber: BPS, 2015

4.6. Struktur Ongkos Usahatani Teh

Total biaya produksi usahatani teh sebesar 14 juta rupiah. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai produksi yang didapatkan yaitu Rp 21 juta. Hal ini berarti usahatani teh masih menguntungkan walaupun provinsi yang menghasilkan teh di Indonesia semakin sedikit jumlahnya (Gambar 4.6).

Upah pekerja dan jasa pertanian merupakan biaya yang paling besar dikeluarkan untuk usahatani teh. Hal ini tidak berbeda dengan usahatani komoditi perkebunan lainnya. Biaya upah pekerja dan jasa pertanian mencapai 57,87 persen (Rp 8,54 juta). Bagian terbesar dari biaya upah pekerja dan jasa pertanian digunakan untuk membayar kegiatan pemanenan sebesar 36,81 persen (Rp 5,4 juta). Biaya pemeliharaan merupakan biaya terbesar kedua yang harus dikeluarkan dari biaya upah pekerja dan jasa pertanian. Biaya pemeliharaan mencapai Rp 1,8 juta (12,29 persen).



Gambar 4. 6.

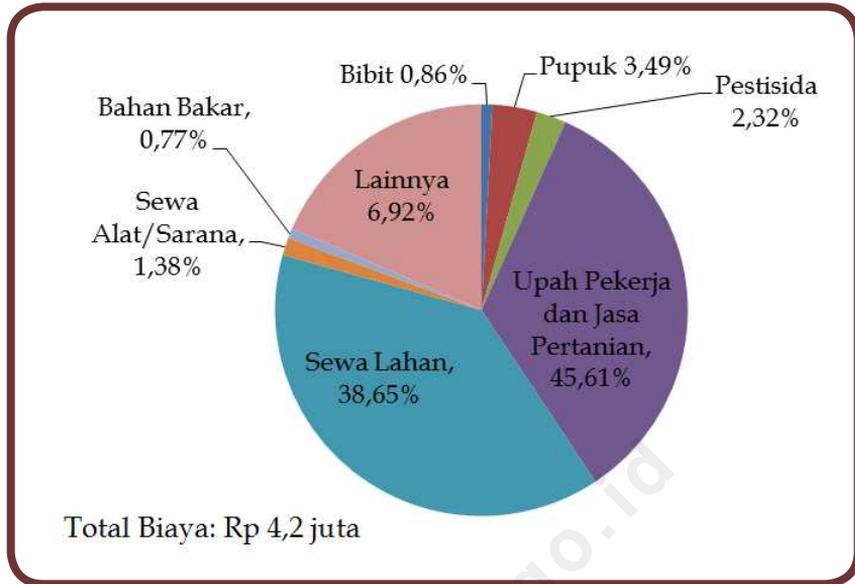
Struktur Ongkos Usahatani Teh Per Musim Tanam per Hektar, 2014

Sumber: BPS, 2015

4.7. Struktur Ongkos Usahatani Kelapa

Total biaya untuk usaha perkebunan kelapa per hektar sebesar Rp4,2 juta. Biaya yang diperlukan untuk usaha perkebunan tersebut yang paling besar adalah untuk sewa lahan (termasuk perkiraan bebas sewa/milik sendiri) sebesar 38,65 persen. Dimana komponen terbesar merupakan perkiraan bebas sewa/milik sendiri dibandingkan sewa lahan. Selain itu, biaya untuk upah pekerja juga cukup besar yang mencapai 45,61 persen.

Pengeluaran upah pekerja dan jasa pertanian yang terbesar adalah untuk kegiatan pemanenan, pemeliharaan (pemangkasan dan penyiangan), pengolahan lahan dan pemupukan. Sedangkan untuk biaya lainnya seperti pupuk dan pestisida masing-masing sebesar 3,49 dan 2,32 persen.



Gambar 4. 7.

Struktur Ongkos Usahatani Kelapa Per Musim Tanam per Hektar, 2014

Sumber: BPS, 2015

<http://www.bps.go.id>

5

Analisis Daya saing Usahatani Komoditi Perkebunan

BAB 5

Analisis Daya saing Usahatani Komoditi Perkebunan

"Karet, kelapa sawit, teh, cengkeh, dan kelapa berdaya saing secara finansial dan ekonomi."



5.1. Analisis Daya saing Usahatani Karet

5.1.1. Analisis Daya saing Usahatani Karet di Indonesia

Karet merupakan salah satu komoditi unggulan ekspor perkebunan Indonesia. Karet menempati posisi yang cukup baik untuk ekspor perkebunan. Pada tahun 2013. Total ekspor karet Indonesia sebanyak 2.701.995 ton atau mencapai 83 persen dari total produksi karet Indonesia (3.237.433 ton). Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya mengekspor sebanyak 2.444.503 ton. Sebagian besar ekspor karet Indonesia masih dalam bentuk karet alam (Kementerian Pertanian. 2015). Sebagian besar (82 persen) produksi karet Indonesia dihasilkan dari perkebunan rakyat karena memiliki luas areal terbesar dibandingkan perkebunan negara dan swasta.

Perkebunan karet di Indonesia sebagian besar telah berdaya saing yang ditunjukkan pada Gambar 4.1. Semua provinsi penghasil karet memiliki nilai DRC kurang dari satu sehingga karet di Indonesia dapat dikatakan berdaya saing atau memiliki keunggulan komparatif. Provinsi yang tidak berdaya saing hanya Sulawesi Tengah dari 20 provinsi penghasil karet di Indonesia.



Gambar 5. 1.

Peta
 Daya Saing
 Perkebunan
 Karet
 Indonesia
 Tahun 2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Daya saing karet di Indonesia dianalisis menggunakan *Policy Analysis Matrix* (PAM). Tujuan penggunaan PAM selain untuk mengestimasi daya saing komoditas juga untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap usahatani karet. Karet dihasilkan di 20 provinsi di Indonesia, sebanyak 19 provinsi memiliki daya saing, sedangkan satu provinsi yaitu Sulawesi Tengah tidak berdaya saing. Provinsi yang memiliki daya saing tertinggi adalah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan nilai DRC (Tabel 5.1).

Secara ekonomi sistem usahatani karet di Sumatera Barat memiliki keunggulan komparatif yang ditunjukkan dengan nilai DRC sebesar 0,24 ($DRC < 1$) yang berarti pada sistem usahatani karet untuk menghemat satu satuan devisa dibutuhkan pengorbanan sumberdaya domestik lebih kecil dari satu US\$. Keunggulan kompetitif tercermin dari nilai PCR sebesar 0,37 ($PCR < 1$). Nilai PCR menunjukkan bahwa sistem usahatani karet telah mampu membayar atas korbanan biaya domestik.

Kebijakan harga output dicirikan dari nilai koefisien proteksi nominal (NPCO) yang bernilai 0,64. Artinya harga karet yang diterima petani lebih rendah 36 persen dari harga sebenarnya. Implikasinya adalah petani menjadi kurang termotivasi untuk meningkatkan produksi karet karena kebijakan pemerintah terhadap harga output tidak memberikan dampak positif pada petani.

Provinsi	NPCO	NPCI	Net Transfer	EPC	PCR	DRC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera Barat	0,64	0,19	-115.76.060,42	0,66	0,37	0,24
Banten	0,72	0,25	-84.499.448,20	0,73	0,46	0,34
Lampung	0,80	0,36	-35.929.945,27	0,88	0,41	0,36
Kepulauan Riau	0,92	0,20	-626.638,12	0,98	0,43	0,43
Kalimantan Timur	0,83	0,21	639.941,43	1,00	0,46	0,46
Bengkulu	0,84	0,22	-5.267.349,71	0,98	0,50	0,49
Jawa Tengah	1,17	0,42	114.230.657,21	1,30	0,38	0,50
Kalimantan Tengah	0,89	0,15	-3.363.551,87	0,98	0,50	0,50
Sumatera Utara	0,97	0,25	9.529.926,31	1,04	0,49	0,51
Riau	0,95	0,24	12.912.622,63	1,06	0,47	0,51
Sumatera Selatan	0,98	0,23	36.744.014,88	1,12	0,45	0,51
Kalimantan Selatan	0,84	0,27	-8.409.666,53	0,95	0,53	0,51
Jawa Barat	0,90	0,15	2.860.092,29	1,01	0,52	0,53
Kepulauan Bangka Belitung	0,78	0,28	-53.339.787,98	0,85	0,63	0,54
Papua	1,42	-	39.321.488,91	1,42	0,39	0,55
Aceh	0,94	0,18	11.855.186,94	1,04	0,54	0,57
Kalimantan Barat	0,90	0,11	6.018.572,41	1,03	0,57	0,60
Jambi	1,00	0,13	28.058.698,77	1,11	0,55	0,62
Sulawesi Selatan	0,84	0,34	-40.047.442,10	0,89	0,69	0,62
Sulawesi Tengah	0,98	0,20	35.049.134,53	1,08	0,94	1,01

Tabel 5. 1.
Hasil Analisis PAM
Usahatani Karet di
Indonesia Tahun
2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Dampak dari kebijakan input yang ditetapkan dapat diukur melalui koefisien proteksi input nominal (NPCI). Nilai NPCI karet di Sumatera Barat yang diperoleh sebesar 0,19. Hal ini menunjukkan bahwa harga input privat lebih rendah dibandingkan harga yang seharusnya, sehingga kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah memberikan dampak positif terhadap petani.

Dampak kebijakan terhadap input dan output usahatani karet di Sumatera Barat secara keseluruhan ditunjukkan berdasarkan nilai koefisien proteksi efektif (EPC) dan *Net Transfer*. Nilai EPC sebesar 0,66 ($EPC < 1$) yang artinya kebijakan pemerintah terhadap harga karet, harga faktor produksi *tradable* maupun domestik secara keseluruhan kurang mendukung atau disinsentif terhadap petani karet untuk mengembangkan produksi karet. Oleh karena itu petani hanya menerima 66 persen dari harga yang sebenarnya. Transfer bersih atau *Net Transfer* digunakan untuk menjelaskan dampak kebijakan terhadap surplus produsen. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai *Net Transfer* yang diperoleh adalah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah telah merugikan petani.

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang tidak berdaya saing secara ekonomi, namun berdaya saing secara finansial yang ditunjukkan dari nilai PCR sebesar 0.94. Walaupun tidak berdaya saing secara ekonomi, dampak kebijakan usahatani karet terhadap input, output, dan pendapatan masih dapat diestimasi menggunakan NPCI, NPCO, EPC dan Net Transfer.

Nilai NPCO sebesar 0,98 ($\text{NPCO} < 1$) berarti kebijakan pemerintah terhadap harga output dalam negeri untuk produsen maupun konsumen akan menerima harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya. Nilai NPCI dari hasil analisis matriks PAM menunjukkan bahwa nilai NPCI usahatani karet di Sulawesi Tengah lebih kecil dari satu, artinya kebijakan pemerintah terhadap faktor produksi yang diperdagangkan memberikan insentif kepada petani karet secara keseluruhan. Kebijakan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah terkait faktor produksi *tradable*, sumberdaya domestik, dan harga karet telah menguntungkan petani berdasarkan nilai *Net Transfer*.

5.1.2. Analisis Sensitivitas Daya Saing Usahatani Karet di Indonesia

Switching value merupakan salah satu bagian dari analisis sensitivitas. Analisis *switching value* bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana perubahan harga output, harga input, produktivitas, dan nilai tukar sehingga sistem usahatani karet di Indonesia tidak memiliki daya saing ($\text{DRC} \geq 1$).

Pengusahaan karet di Provinsi Sumatera Barat relatif lebih tahan terhadap perubahan harga output, harga input, produktivitas, dan nilai tukar. Provinsi Jambi dan Kalimantan Barat adalah yang paling sensitif jika harga output diturunkan sebesar 34 persen. Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi yang paling sensitif terhadap perubahan harga input apabila dinaikkan hingga 203 persen. Provinsi Jambi juga sensitif terhadap penurunan produktivitas dan apresiasi nilai tukar sebesar 34 persen. Sementara itu untuk Provinsi Sulawesi Tengah dapat memiliki daya saing jika harga output dan produktivitas dinaikkan, sedangkan harga input diturunkan dan nilai tukar terdepresiasi sebesar 0,59 persen.

Provinsi	Skenario			
	Harga Output	Harga Input	Produktivitas	Nilai Tukar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	-38,63	351,61	-38,68	-38,98
Sumatera Utara	-44,74	504,61	-44,57	-44,76
Sumatera Barat	-73,18	2.019,81	-73,15	-72,79
Riau	-43,05	326,53	-43,02	-43,11
Jambi	-34,26	311,64	-34,20	-34,04
Sumatera Selatan	-40,75	250,05	-40,81	-42,28
Bengkulu	-41,71	232,05	-41,73	-42,46
Lampung	-53,81	345,34	-53,79	-56,66
Kepulauan Bangka Belitung	-41,12	350,68	-41,22	-42,28
Kepulauan Riau	-52,71	639,49	-52,67	-52,44
Jawa Barat	-41,03	308,70	-41,04	-41,75
Jawa Tengah	-43,09	294,10	-43,03	-45,58
Banten	-64,08	1.885,29	-64,02	-63,93
Kalimantan Barat	-34,68	240,43	-34,60	-34,40
Kalimantan Tengah	-45,03	416,76	-45,06	-44,76
Kalimantan Selatan	-41,37	256,70	-41,34	-42,28
Kalimantan Timur	-42,60	203,39	-42,61	-43,58
Sulawesi Tengah	0,43	-7,33	0,55	0,59
Sulawesi Selatan	-35,42	442,21	-35,36	-35,69
Papua	-45,25	-	-45,33	-44,76

Tabel 5. 2.
Analisis
Switching Value
untuk Komoditi
Karet di
Indonesia Tahun
2014 (Persen)

Sumber: ST2013-SKB, diolah

5.2. Analisis Daya Saing Komoditi Kopi

5.2.1. Analisis Daya Saing Komoditi Kopi di Indonesia

Pengukuran daya saing komoditi kopi dilakukan dengan menggunakan Rasio Biaya Sumber Daya Domestik (*Domestic Resource Cost* atau DRC), yang merupakan rasio antara biaya domestik dengan nilai tambah output dari biaya input yang diperdagangkan pada harga sosial (bayangan). Jika Nilai $DRC \geq 1$, artinya komoditi kopi sudah tidak berdaya saing sehingga perlu diremajakan kembali atau diganti dengan komoditi lain yang lebih cocok dengan agroklimat wilayahnya. Namun jika $DRC \leq 1$, artinya komoditi kopi memiliki daya saing sehingga layak untuk dipertahankan atau diperbaiki sistem usahataniya. Berdasarkan hasil perhitungan DRC, terlihat peta daya saing usahatani kopi di seluruh sentra produksi di Indonesia seperti pada Gambar 5.2.

"Hanya 19 persen perkebunan kopi (5 RTUP) di Indonesia yang memiliki daya saing dengan nilai $DRC \leq 1$."



Gambar 5.2.

Peta Daya Saing Perkebunan Kopi Tahun 2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 26 perkebunan kopi yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua. Hanya 19 persen perkebunan kopi (5 RTUP) di Indonesia yang memiliki daya saing dengan nilai $DRC \leq 1$. Sedangkan 81 persennya (21 perkebunan), sudah tidak berdaya saing karena memiliki nilai $DRC > 1$. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar perkebunan kopi di Indonesia perlu diremajakan kembali. Jika dilihat berdasarkan spesifik wilayah, perkebunan kopi yang perlu diremajakan paling banyak terdapat di pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lainnya (10 dari 11 perkebunan kopi yang harus diremajakan). Sedangkan untuk perkebunan kopi yang masih memiliki daya saing paling banyak terdapat di Pulau Sumatera (3 dari 5 perkebunan kopi).

Daya saing kopi yang tertinggi berdasarkan nilai DRC terdapat di Provinsi Riau. Tabel 5.3 memperlihatkan hasil analisis PAM untuk Provinsi Riau. Daya saing kopi di Provinsi Riau dapat dilihat dari nilai PCR dan DRC, dimana nilai DRC kopi di Riau sebesar 0,61 menunjukkan kopi secara ekonomi memiliki daya saing atau memiliki keunggulan komparatif. PCR bernilai sebesar 0,99 ($PCR < 1$) mencerminkan usahatani kopi kurang memiliki keunggulan kompetitif.

Dampak kebijakan pemerintah terhadap input didekati melalui nilai NPCI. Nilai NPCI yang diperoleh untuk Provinsi Riau sebesar 5,29 artinya kebijakan faktor produksi yang dilakukan pemerintah disinsentif kepada petani secara keseluruhan. Sedangkan dampak kebijakan output dilihat berdasarkan nilai NPCO yaitu sebesar 0,64 artinya kebijakan pemerintah dapat menghambat produksi.

Dampak kebijakan terhadap pendapatan usaha kopi di Riau secara keseluruhan dijelaskan melalui pendekatan *Net Transfer* dan EPC. Nilai *Net Transfer* yang diperoleh memiliki nilai positif sehingga kebijakan pemerintah terhadap faktor-faktor produksi yang diperdagangkan dan sumberdaya domestik serta harga kopi secara keseluruhan telah menguntungkan petani kopi. Nilai EPC kurang dari satu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait faktor produksi baik yang diperdagangkan maupun domestik serta harga output tidak memberikan insentif kepada petani dalam mengembangkan produksi kopi.

Provinsi	NPCO	NPCI	Net Transfer	EPC	PCR	DRC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Riau	0,64	5,29	4.876.511,30	0,62	0,99	0,61
Nusa Tenggara Barat	1,29	0,13	37.094.167,50	1,36	0,54	0,74
Sumatera Barat	1,72	0,35	72.512.582,95	2,03	0,37	0,75
Papua	1,33	0,00	13.721.231,57	1,42	0,61	0,86
Aceh	1,74	0,19	74.132.308,06	2,22	0,44	0,97
Sulawesi Selatan	1,47	0,18	38.117.884,26	2,32	0,46	1,08
Sumatera Selatan	2,64	1,08	32.165.932,70	2,88	0,37	1,09
Bali	2,02	0,87	79.432.632,16	2,34	0,48	1,14
Nusa Tenggara Timur	3,31	0,11	86.771.987,10	3,41	0,34	1,17
Kalimantan Timur	2,80	84,4	16.764.814,00	1,72	0,75	1,29
Bengkulu	2,85	0,56	35.804.319,08	3,62	0,41	1,48
Jawa Tengah	2,02	0,49	56.528.277,45	3,32	0,45	1,51
Sulawesi Utara	3,76	0,23	92.910.742,96	3,88	0,40	1,54
Lampung	3,00	0,73	35.412.221,12	3,83	0,39	1,60
Kalimantan Selatan	2,45	2,30	69.460.168,75	2,47	0,65	1,62
Banten	2,63	0,57	37.974.492,26	2,71	0,60	1,63
Sulawesi Barat	2,61	9,34	28.106.622,46	2,56	0,74	1,88
Jawa Barat	1,84	0,25	35.783.447,59	4,84	0,48	2,34
Jawa Timur	2,43	0,34	77.064.254,67	5,11	0,46	2,34
Sumatera Utara	2,44	0,34	138.870.883,97	4,82	0,58	2,80
Kalimantan Barat	3,67	6,81	60.486.916,38	3,60	0,79	2,86
Sulawesi Tenggara	2,87	1,60	43.155.668,44	2,89	0,99	2,88
Jambi	2,70	0,15	77.538.227,20	6,93	0,43	3,01
Gorontalo	3,20	0,00	18.141.998,28	3,32	0,94	3,12
Kalimantan Tengah	2,97	0,14	92.810.396,49	5,27	0,67	3,53
Sulawesi Tengah	3,10	0,22	110.498.956,03	41,45	0,57	23,51

Tabel 5.3.

Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Indonesia Tahun 2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Provinsi yang paling tidak berdaya saing secara ekonomi adalah Sulawesi Tengah. Hal ini ditunjukkan dari nilai DRC sebesar 23,51 yang berarti kopi tidak memiliki keunggulan komparatif. Hasil analisis dampak kebijakan terhadap input, output dan pendapatan yang ditunjukkan oleh NPCI, NPCO, *Net Transfer* telah memberikan insentif kepada petani kopi di Sulawesi Tengah. Selain itu, dapat dilihat juga dampak kebijakan secara menyeluruh baik dari sisi faktor produksi maupun harga kopi dapat dilihat dari nilai EPC. Nilai EPC yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah 41,45 yang menunjukkan bahwa proteksi pemerintah terhadap input dan output kopi di Sulawesi Tengah telah efektif untuk dilaksanakan.

5.2.2. Analisis Sensitivitas Daya Saing Komoditi Kopi di Indonesia

Analisis *switching value* dilakukan pada harga output, harga input, produktivitas dan nilai tukar. Provinsi Aceh merupakan wilayah perkebunan kopi yang paling sensitif terhadap perubahan harga output, harga input, produktivitas, dan nilai tukar.

Apabila harga output dan produktivitas diturunkan sebesar 2,61 persen dan 64,07 persen, maka usahatani kopi di Provinsi Aceh tidak lagi memiliki daya saing. Begitu juga dengan harga input apabila dinaikkan sebesar 11,11 persen tidak akan berdaya saing. Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika apabila diapresiasi sebesar 2,7 persen membuat kopi di Provinsi Aceh tidak memiliki keunggulan komparatif (Tabel 5.4).

Provinsi Riau sebagai provinsi yang memiliki nilai daya saing tertinggi tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga input, sedangkan Sulawesi Tengah yang tidak memiliki daya saing juga tidak sensitif terhadap perubahan harga output, input, produktivitas maupun nilai tukar. Untuk wilayah yang tidak berdaya saing, maka skenario yang digunakan adalah menurunkan nilai DRC hingga bernilai satu.

Provinsi	Skenario			
	Harga Output	Harga Input	Produktivitas	Nilai Tukar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	-2,61	11,11	-64,07	-2,70
Sumatera Utara	84,35	-158,95	-27,41	94,84
Sumatera Barat	-20,68	112,60	29,57	-22,16
Riau	-38,48	6916,52	-90,33	-38,17
Jambi	75,59	-121,11	44,24	77,75
Sumatera Selatan	7,69	-58,10	56,77	8,59
Bengkulu	36,17	-143,23	109,86	35,80
Lampung	44,21	-164,99	148,58	44,13
Jawa Barat	46,34	-70,80	57,21	52,94
Jawa Tengah	27,57	-59,75	-17,28	33,33
Jawa Timur	58,95	-104,98	7,79	87,09
Banten	60,93	-1675,23	99,06	62,02
Bali	10,76	-49,21	-57,13	12,37
Nusa Tenggara Barat	-24,57	434,66	-79,87	-24,48
Nusa Tenggara Timur	16,19	-491,35	-9,48	15,91
Kalimantan Barat	181,56	-7.926,09	234,45	177,04
Kalimantan Tengah	139,73	-312,28	79,55	139,28
Kalimantan Selatan	53,43	-403,24	-21,70	51,76
Kalimantan Timur	28,29	-2.167,91	57,04	27,83
Sulawesi Utara	51,97	-1.614,93	31,00	51,46
Sulawesi Tengah	157,16	-168,96	91,48	173,09
Sulawesi Selatan	4,61	-11,58	-36,45	4,88
Sulawesi Tenggara	184,46	-11.197,69	249,36	182,65
Gorontalo	204,22	-5.707,41	781,71	178,53
Sulawesi Barat	87,87	-13.282,48	194,60	86,33
Papua	-12,77	211.24	-26,90	-18,77

Tabel 5. 4.

Analisis
Switching
Value Untuk
Komoditi Kopi di
Indonesia Tahun
2014 (Persen)

Sumber: ST2013-SKB, diolah

5.3. Analisis Daya Saing Usahatani Kelapa Sawit

5.3.1. Analisis Daya Saing Usahatani Kelapa Sawit di Indonesia

“Secara general kelapa sawit di Indonesia telah berdaya saing atau memiliki keunggulan komparatif.”

Sebagai komoditi unggulan ekspor perkebunan Indonesia, kelapa sawit Indonesia memiliki daya saing di pasar internasional. Tingginya ekspor kelapa sawit Indonesia tentu berimplikasi kepada tingginya devisa yang dihasilkan, dimana kelapa sawit merupakan komoditi utama penghasil devisa negara. Hal ini menyebabkan kontribusi sektor pertanian Indonesia terhadap PDB tetap berada di peringkat tiga besar.

Analisis PAM digunakan untuk mengetahui kemampuan daya saing komoditi kelapa sawit. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebagian besar telah memiliki daya saing (Gambar 4.3). Berdasarkan hasil indikator daya saing yang digunakan, yaitu DRC, terlihat bahwasanya sebagian besar provinsi penghasil kelapa sawit memiliki nilai DRC kurang dari satu ($DRC < 1$). Terdapat hanya satu provinsi dari 20 provinsi penghasil kelapa sawit yaitu Sulawesi Tengah yang nilai DRCnya lebih dari satu ($DRC > 1$), atau bisa dinyatakan tidak memiliki daya saing. Artinya, secara general kelapa sawit di Indonesia telah berdaya saing atau memiliki keunggulan komparatif.



Gambar 5.3.

Peta Daya Saing Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Kelapa sawit yang merupakan komoditas unggulan ekspor Indonesia berdaya saing di 19 provinsi dari 20 provinsi yang dianalisis. Provinsi yang memiliki daya saing tertinggi adalah Papua Barat, sedangkan provinsi yang tidak berdaya saing secara komparatif adalah Sulawesi Tengah (Tabel 5.5).

Daya saing kelapa sawit di Papua Barat memiliki nilai DRC dan PCR kurang dari satu. Nilai tersebut mencerminkan adanya keunggulan kompetitif. Nilai DRC kelapa sawit di Papua Barat sebesar 0,07 yang berarti kelapa sawit secara ekonomi memiliki daya saing atau memiliki keunggulan komparatif.

Dampak kebijakan pemerintah terhadap input didekati melalui nilai NPCI. Nilai NPCI sebesar 0,38 artinya kebijakan faktor produksi yang dilakukan pemerintah telah memberikan insentif kepada petani secara keseluruhan. Sedangkan dampak kebijakan output dilihat berdasarkan nilai NPCO. Nilai NPCO sebesar 0,43 artinya harga kelapa sawit yang diterima petani lebih rendah 57 persen dibandingkan harga yang sebenarnya, sehingga kebijakan pemerintah dapat menghambat produksi.

Provinsi	NPCO	NPCI	Net Transfer	EPC	PCR	DRC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Papua Barat	0,43	0,38	-786.549.914,55	0,43	0,17	0,07
Banten	0,55	0,50	-609.309.997,48	0,55	0,24	0,13
Sumatera Barat	0,66	0,37	-182.484.497,52	0,70	0,20	0,15
Kalimantan Timur	0,46	0,27	-683.103.302,41	0,50	0,33	0,17
Sulawesi Tenggara	0,36	0,23	-830.540.111,09	0,38	0,49	0,19
Papua	0,51	0,70	-713.582.263,08	0,51	0,37	0,19
Sumatera Utara	0,71	0,47	-440.396.183,78	0,75	0,26	0,20
Sumatera Selatan	0,70	0,41	-305.650.835,76	0,76	0,26	0,20
Lampung	0,71	0,41	-224.603.164,76	0,8	0,24	0,20
Bengkulu	0,65	0,33	-382.337.870,45	0,74	0,29	0,22
Sulawesi Selatan	0,64	0,20	-156.918.748,52	0,83	0,26	0,22
Jambi	0,73	0,46	-160.947.206,35	0,79	0,30	0,25
Kalimantan Selatan	0,68	0,31	-223.851.022,03	0,82	0,30	0,25
Riau	0,72	0,29	16.832.399,73	1,01	0,28	0,28
Kalimantan Barat	0,81	0,39	-16.132.006,00	0,97	0,28	0,28
Sulawesi Barat	0,72	0,27	-259.717.252,05	0,86	0,33	0,29
Kepulauan Bangka Belitung	0,62	0,50	-365.273.832,02	0,67	0,45	0,30
Kalimantan Tengah	0,74	0,33	10.186.097,16	1,01	0,30	0,31
Aceh	0,69	0,30	-165.663.054,89	0,84	0,40	0,34
Sulawesi Tengah	0,71	0,35	2.473.238.540,17	0,83	0,41	2,39

Tabel 5. 5.

Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Dampak kebijakan terhadap pendapatan usaha kelapa sawit secara keseluruhan dijelaskan melalui pendekatan *Net Transfer* dan EPC. Berdasarkan hasil analisis PAM nilai *Net Transfer* yang diperoleh adalah negatif sehingga

kebijakan pemerintah terhadap faktor-faktor produksi yang diperdagangkan dan sumber daya domestik serta harga kelapa sawit secara keseluruhan merugikan petani. Nilai EPC kurang dari satu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait faktor produksi baik yang diperdagangkan maupun domestik serta harga output tidak memberikan insentif kepada petani dalam mengembangkan produksi kelapa sawit.

Hasil analisis daya saing usahatani kelapa sawit di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa usahatani tersebut memiliki keunggulan kompetitif tetapi tidak secara komparatif. Daya saing kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Tengah secara finansial memiliki nilai PCR kurang dari satu yang bermakna bahwa kelapa sawit di Sulawesi Tengah memiliki keunggulan kompetitif, namun berdasarkan nilai DRCnya lebih dari satu. Tidak berdaya saingnya kelapa sawit di Sulawesi Tengah diperkuat dari hasil kebijakan terhadap output (NPCO) dan pendapatan (EPC) yang disinsentif atau tidak mendukung petani kelapa sawit untuk mengembangkan produksinya.

5.3.2. Analisis Sensitivitas Daya Saing Usahatani Kelapa Sawit di Indonesia

Analisis *switching value* kelapa sawit di Indonesia diperlihatkan pada Tabel 4.6. Provinsi yang paling sensitif terhadap perubahan harga output, harga input, produktivitas, dan nilai tukar adalah Kalimantan Tengah.

Penurunan harga output 42 persen, kenaikan harga input sebesar 106 persen penurunan produktivitas sebesar 42,3 persen dan apresiasi nilai tukar sebesar 44 persen paling sensitif mempengaruhi usahatani kelapa sawit yang juga berada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sementara itu provinsi Papua Barat yang memiliki daya saing tertinggi diantara provinsi lainnya, paling tidak sensitif terhadap peningkatan harga input. Analisis *switching value* pada Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan menghitung sampai berapa persen perubahan harga output, harga input, produktivitas, dan nilai tukar akan berdaya saing, sebab Sulawesi Tengah berdasarkan analisis PAM tidak berdaya saing secara ekonomi. Sulawesi Tengah akan berdaya saing jika harga output dan produktivitas dinaikkan masing-masing 103,39 persen dan 103,72 persen, harga input turun 421,06 persen, dan nilai tukar terdepresiasi sebesar 110,51 persen.

Provinsi	Skenario			
	Harga Output	Harga Input	Produktivitas	Nilai Tukar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	-47,98	170,92	-47,75	-50,73
Sumatera Utara	-68,90	487,31	-69,02	-71,55
Sumatera Barat	-74,80	596,50	-74,70	-76,50
Riau	-43,60	110,63	-43,87	-45,17
Jambi	-60,66	307,71	-60,68	-62,90
Sumatera Selatan	-65,67	362,27	-65,56	-68,83
Bengkulu	-61,30	283,89	-61,22	-63,31
Lampung	-63,08	289,09	-63,01	-66,61
Kepulauan Bangka Belitung	-50,42	180,54	-50,55	-54,44
Banten	-83,20	1.817,06	-83,15	-84,42
Kalimantan Barat	-53,14	196,06	-53,20	-56,09
Kalimantan Tengah	-42,41	106,68	-42,28	-44,15
Kalimantan Selatan	-55,54	209,57	-55,40	-57,51
Kalimantan Timur	-50,17	361,79	-50,14	-69,49
Sulawesi Tengah	103,39	-421,06	103,72	110,51
Sulawesi Selatan	-54,50	176,84	-54,60	-55,62
Sulawesi Tenggara	-71,82	597,11	-71,58	-72,03
Sulawesi Barat	-54,60	231,66	-54,45	-56,10
Papua Barat	-92,72	1.427.600,54	-92,66	-92,05
Papua	-81,14	59.834,81	-81,09	-80,00

Tabel 5. 6.

Analisis *Switching Value* untuk Komoditi Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2014 (Persen)

Sumber: ST2013-SKB, diolah

5.4. Analisis Daya Saing Komoditi Kakao

5.4.1. Analisis Daya Saing Komoditi Kakao di Indonesia

"Dayasaing kakao tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Barat."

Pada subbagian ini, daya saing komoditi kakao akan dilakukan dengan menggunakan Rasio Biaya Sumberdaya Domestik (*Domestik Resource Cost Ratio/ DRC*). Nilai DRC pada umumnya diutilisasi untuk menentukan apakah komoditi kakao sebagai salah satu komoditi perkebunan di Indonesia perlu diremajakan kembali ataukah perlu dipertahankan dan diperbaiki sistem usahatani agar efisiensi dan keuntungannya dapat ditingkatkan. Apabila hasil pengolahan nilai $DRC \geq 1$, maka komoditi kakao dapat dikatakan tidak memiliki daya saing sehingga perlu dilakukan diremajakan kembali atau diganti dengan komoditi lain yang lebih cocok dengan agroklimat wilayahnya. Namun jika $DRC \leq 1$, artinya komoditi kakao memiliki berdaya saing sehingga layak untuk dipertahankan atau diperbaiki sistem usahatannya.



Gambar 5.4.

Peta Daya Saing Perkebunan Kakao Tahun 2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Saat ini terdapat 29 perkebunan kakao yang tersebar di wilayah Indonesia. Sebanyak 48 persen perkebunan kakao (14 perkebunan) di Indonesia memiliki daya saing karena memiliki nilai $DRC < 1$. Sedangkan 52 persennya (15 perkebunan), dapat dikatakan sudah tidak berdaya saing karena memiliki nilai $DRC > 1$. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas perkebunan kakao di Indonesia perlu diremajakan kembali (Gambar 5.4).

Daya saing kakao tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan provinsi yang paling tidak berdaya saing adalah Jambi karena memiliki nilai DRC sebesar 13,56. Tingginya nilai DRC membuat kakao di Jambi tidak memiliki keunggulan komparatif. Begitu pula dengan nilai PCR pada Provinsi Jambi yang kurang dari satu sehingga tidak memiliki keunggulan kompetitif. Walaupun tidak berdaya saing, akan tetapi dampak kebijakan kakao di Jambi terhadap input, output maupun pendapatan telah memberikan insentif terhadap petani.

Provinsi	NPCO	NPCI	Net Transfer	EPC	PCR	DRC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kalimantan Barat	1,12	0,57	8.364.914,89	1,13	0,21	0,22
Bali	0,61	0,31	-117.074.328,00	0,68	0,51	0,28
Banten	1,75	0,90	74.622.490,24	1,77	0,21	0,35
Kepulauan Riau	1,66	1,20	31.151.200,81	1,71	0,37	0,43
Sumatera Barat	1,58	0,28	85.280.658,50	1,83	0,32	0,56
Maluku Utara	1,46	0,14	83.395.181,93	1,97	0,32	0,57
Riau	1,38	1,57	62.631.652,88	1,33	0,55	0,68
Papua	1,35	0,36	28.809.880,28	1,55	0,45	0,68
Nusa Tenggara Barat	1,45	0,33	51.594.043,42	1,59	0,53	0,70
Aceh	1,55	0,27	120.270.568,73	1,99	0,40	0,80
Papua Barat	1,47	0,25	68.677.206,59	1,71	0,54	0,82
Lampung	1,49	0,21	80.436.780,80	2,19	0,35	0,85
Nusa Tenggara Timur	1,68	0,16	80.946.986,27	1,83	0,50	0,88
Gorontalo	1,45	0,32	70.572.402,17	2,32	0,43	0,95
Kalimantan Tengah	1,33	0,13	137.797.823,30	3,47	0,34	1,04
Sulawesi Utara	1,72	0,33	117.640.804,66	2,40	0,52	1,04
Jawa Tengah	1,99	0,41	59.674.889,16	2,11	0,53	1,07
Bengkulu	1,60	0,17	108.251.548,43	2,57	0,45	1,08
Sumatera Selatan	1,20	0,09	96.251.319,62	3,18	0,43	1,15
Sulawesi Selatan	1,61	0,54	100.932.236,77	2,03	0,57	1,29
Kalimantan Timur	1,60	0,28	52.882.703,26	2,57	0,56	1,38
Sumatera Utara	1,78	0,34	183.687.732,98	2,84	0,52	1,41
Maluku	1,91	0,05	65.008.422,89	2,23	0,84	1,84
Sulawesi Tengah	1,82	0,92	168.467.224,79	1,96	0,57	2,22
Sulawesi Tenggara	1,54	0,66	48.299.383,00	1,82	1,09	2,24
Jawa Timur	2,22	0,44	206.913.206,60	3,15	0,75	2,26
Sulawesi Barat	1,73	0,19	125.952.490,16	5,87	0,54	3,46
Kepulauan Bangka Belitung	7,48	0,94	439.406.750,42	124,09	0,10	11,78
Jambi	1,83	0,20	191.021.893,10	8,66	1,62	13,56

Tabel 5. 7.

Hasil Analisis PAM Usahatan Kakao di Indonesia Tahun 2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Nilai PCR dan DRC untuk komoditi kakao di Kalimantan Barat yang dihasilkan dari analisis PAM pada, masing-masing yaitu 0,21 dan 0,22. Untuk menghasilkan satu satuan produksi baik secara finansial maupun ekonomi hanya membutuhkan sumber daya domestik masing-masing sebesar 21 dan 22 persen, sehingga secara finansial maupun ekonomi dikatakan memiliki daya saing (Tabel 4.7).

Dampak kebijakan pemerintah terhadap input dan output dianalisis menggunakan NPCI dan NPCO. Hasil analisis untuk kedua kebijakan tersebut berpengaruh positif terhadap usahatani kelapa sawit di Kalimantan Barat karena kebijakan pemerintah yang diterapkan baik untuk input maupun output telah mendukung upaya peningkatan produksi.

Nilai EPC dan *Net Transfer* digunakan untuk mengukur dampak kebijakan pemerintah terhadap output, input dan pendapatan petani secara keseluruhan. Nilai EPC yang dihasilkan sebesar 1,13 yang artinya kebijakan pemerintah terhadap input dan output kakao telah efektif. Nilai transfer bersih yang positif mengindikasikan terdapat kebijakan pemerintah terhadap input dan output akan menambah surplus petani kakao sebesar Rp 8.364.914,89 per hektarnya.

5.4.2. Analisis Sensitivitas Daya Saing Komoditi Kakao di Indonesia

Analisis *switching value* bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana perubahan harga output, harga input, produktivitas, dan nilai tukar sehingga sistem usahatani kakao di Indonesia tidak memiliki daya saing ($DRC \geq 1$) khusus untuk provinsi yang memiliki nilai DRC kurang dari satu, sedangkan untuk provinsi yang awalnya tidak berdaya saing akan dicari pada saat kapan DRC mencapai satu.

Provinsi Aceh merupakan wilayah perkebunan kakao yang paling sensitif terhadap perubahan harga output dan produktivitas apabila diturunkan sebesar 14,34 persen dan 14,86 persen. Perubahan harga input dan nilai tukar paling sensitif pada Provinsi Gorontalo apabila harga input dinaikkan 7 persen dan nilai tukar terapresiasi 3,5 persen (Tabel 5.8).

Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki daya saing tertinggi tidak sensitif terhadap perubahan harga input, sedangkan Jambi sebagai provinsi yang paling tidak berdaya saing juga tidak sensitif terhadap perubahan harga output, harga input, produktivitas, dan nilai tukar. Apabila Jambi ingin berdaya saing, maka harga output, produktivitas dan nilai tukar harus ditingkatkan, sedangkan harga input harus diturunkan.

Provinsi	Skenario			
	Harga Output	Harga Input	Produktivitas	Nilai Tukar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	-14,86	57,81	-14,86	-15,36
Sumatera Utara	23,34	-54,90	23,34	25,49
Sumatera Barat	-36,60	226,58	-36,60	-37,26
Riau	-25,09	114,97	-25,09	-30,66
Jambi	242,90	-301,12	242,90	258,34
Sumatera Selatan	-58,80	-8,29	-58,80	5,54
Bengkulu	-35,20	-12,53	-35,20	5,13
Lampung	-44,99	27,45	-44,99	-10,18
Kepulauan Bangka Belitung	-37,40	-60,50	-37,40	57,12
Jawa Barat	-60,88	568,01	-60,88	-53,76
Jawa Tengah	-0,67	-90,38	-0,67	6,28
Jawa Timur	48,59	-241,78	48,59	105,23
Banten	-65,70	3537,23	-65,70	-64,43
Bali	-77,20	328,69	-77,20	-60,32
Nusa Tenggara Barat	-37,44	236,63	-37,44	-26,81
Nusa Tenggara Timur	-19,66	113,33	-19,66	-10,54
Kalimantan Barat	-78,371	4101,526	-78,371	-77,919
Kalimantan Tengah	-62,427	-2,390	-62,427	1,525
Kalimantan Timur	-20,486	-51,482	-20,486	23,128
Sulawesi Utara	-30,058	-8,780	-30,058	3,339
Sulawesi Tengah	90,490	-743,376	90,490	111,931
Sulawesi Selatan	-7,270	-74,134	-7,270	25,107
Sulawesi Tenggara	69,615	-388,066	69,615	106,794
Gorontalo	-46,591	7,092	-46,591	-3,554
Sulawesi Barat	-6,217	-91,451	-6,217	75,544
Maluku	56,807	-481,744	56,807	72,897
Maluku Utara	-58,626	110,621	-58,626	-31,242
Papua Barat	-31,523	94,812	-31,523	-15,815
Papua	-43,968	154,754	-43,968	-27,350

Tabel 5. 8.

Analisis *Switching Value* Untuk Komoditi Kakao di Indonesia Tahun 2013 (Persen)

Sumber: ST2013-SKB, diolah

5.5. Analisis Daya Saing Usahatani Cengkeh

5.5.1. Analisis Daya Saing Usahatani Cengkeh di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis daya saing menggunakan PAM, usahatani cengkeh di Indonesia yang tersebar di 13 provinsi telah berdaya saing atau memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif yang ditunjukkan dengan nilai DRC dan PCR yang kurang dari satu sebagaimana disajikan pada Gambar 4.5.

Saat ini, Indonesia masih merupakan negara penghasil, sekaligus konsumen terbesar cengkeh dunia. Produksi bunga cengkeh di Indonesia sebagian besar (80-90 persen) diserap oleh industri rokok kretek, sisanya untuk industri rempah-rempah lokal dan memenuhi permintaan pasar ekspor. Potensi tanaman cengkeh yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah daun cengkeh (daun gugur) dan tangkai bunga.

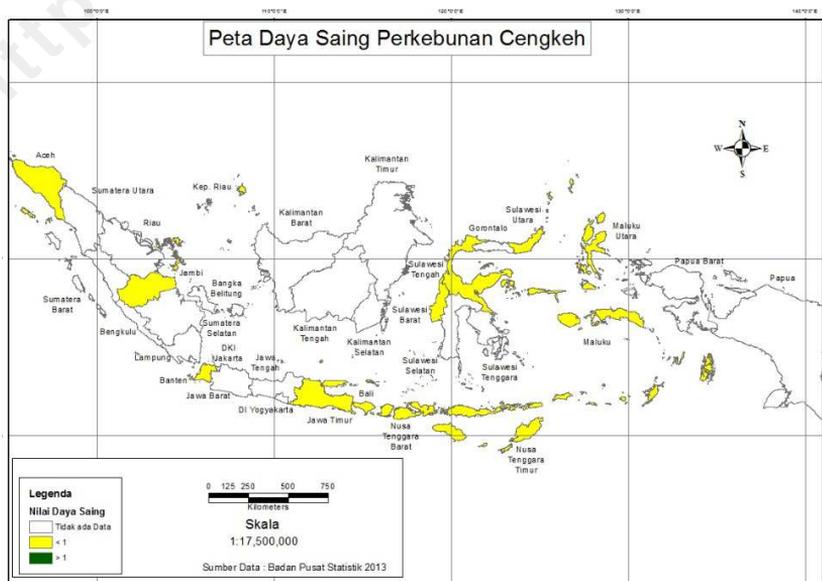
Daya saing usahatani cengkeh terbesar terdapat di Provinsi Jawa Timur. Nilai PCR dan DRC cengkeh di Jawa Timur (Tabel 4.9) menunjukkan kurang dari satu yaitu masing-masing sebesar 0,20 dan 0,04 yang berarti memiliki keunggulan baik kompetitif maupun komparatif.

Dampak kebijakan pemerintah terhadap output dapat dilihat dari nilai NPCO sebesar 0,17 (kurang dari satu). Dengan demikian kebijakan harga output yang diambil pemerintah menghambat kegiatan produksi. Sedangkan dampak kebijakan pemerintah terhadap input memberikan nilai NPCI kurang dari satu yaitu sebesar 0,68 yang berarti bahwa kebijakan pemerintah terhadap faktor produksi yang diperdagangkan memberikan insentif kepada petani cengkeh secara keseluruhan.

"Saat ini, Indonesia masih merupakan negara penghasil, sekaligus konsumen terbesar cengkeh dunia."

Gambar 5.5.

Peta Daya Saing Perkebunan Cengkeh Tahun 2014



Sumber: ST2013-SKB, diolah

Dampak kebijakan pemerintah secara keseluruhan terhadap input dan output dapat dilihat dari nilai EPC dan *Net Transfer*. EPC yang bernilai kurang dari satu mengindikasikan bahwa kebijakan proteksi pemerintah terhadap input maupun output tidak efektif. Nilai *Net Transfer* yang dihasilkan adalah negatif yang berarti kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak mendukung petani untuk mengembangkan produksi.

Provinsi	NPCO	NPCI	Net Transfer	EPC	PCR	DRC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jawa Timur	0,17	0,68	-12.677.161.525,32	0,17	0,20	0,04
Banten	0,46	0,29	-4.107.911.926,50	0,46	0,20	0,10
Bali	0,46	0,92	-6.393.029.847,54	0,46	0,28	0,13
Nusa Tenggara Barat	1,13	0,44	581.378.199,98	1,15	0,18	0,21
Nusa Tenggara Timur	0,99	0,46	-71.699.736,13	0,99	0,28	0,27
Sulawesi Utara	0,99	0,39	16.107.199,20	1,00	0,32	0,33
Maluku	1,01	0,01	78.235.653,28	1,02	0,38	0,39
Sulawesi Tengah	1,02	0,18	464.501.599,54	1,14	0,36	0,42
Maluku Utara	1,06	0,05	303.209.120,48	1,07	0,41	0,44
Kepulauan Riau	0,96	0,39	-39.907.804,02	0,98	0,47	0,46
Jambi	0,81	0,41	-539.229.757,82	0,83	0,57	0,47
Aceh	1,10	0,29	94.534.216,19	1,13	0,42	0,48
Sulawesi Barat	0,96	0,17	432.589.522,48	1,20	0,47	0,56

Tabel 5.9.
Hasil Analisis
PAM Usahatani
Cengkeh di
Indonesia Tahun
2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Usahatani cengkeh di Sulawesi Barat memiliki daya saing terendah secara ekonomi dibandingkan 12 provinsi lainnya, walaupun tetap berdaya saing karena nilai $DRC \leq 1$. Nilai PCR sebesar 0,47 yang berarti bahwa untuk menghasilkan satu satuan produksi, secara finansial hanya membutuhkan sumber daya domestik masing-masing sebesar 47 persen.

Kebijakan pemerintah terhadap output memberikan dampak negatif sebab nilai NPCO kurang dari satu yang berarti harga cengkeh yang diterima petani lebih rendah dari harga sebenarnya sehingga kebijakan pemerintah tidak mendukung produksi cengkeh.

Kebijakan pemerintah terhadap input (NPCI), pendapatan (*Net Transfer*), dan gabungan input maupun output (EPC) berdampak positif terhadap petani. Artinya adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah telah efektif dilaksanakan dan memberikan keuntungan bagi petani.

5.5.2. Analisis Sensitivitas Daya Saing Usahatani Cengkeh di Indonesia

Komoditi cengkeh di Indonesia dihasilkan oleh 13 provinsi sentra penghasil cengkeh yang tersebar di beberapa pulau. Analisis sensitivitas (*switching value*) digunakan untuk mengetahui provinsi mana yang paling sensitif terhadap perubahan harga output, biaya input, produktivitas, maupun nilai tukar. Kondisi awal menunjukkan bahwa usahatani di 13 propinsi tersebut adalah berdaya saing yang ditunjukkan dengan nilai $DRC < 1$.

Sebagaimana disajikan pada Tabel 4.10, usahatani cengkeh tidak berdaya saing lagi jika harga output harus turun antara 34,81 sampai 95,84 persen. Sedangkan untuk penurunan produktivitas pada kisaran 34,92 sampai 95,88 persen yang akan membuat usahatani cengkeh di Indonesia tidak berdaya saing lagi. Begitu pula dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar, apresiasi dari nilai rupiah sampai tingkat 95,88 persen (di Jawa Timur) akan membuat usahatani cengkeh tidak berdaya saing. Dari keempat simulasi yang dilakukan maka perubahan harga input merupakan hal yang paling sensitif terhadap daya saing usahatani cengkeh, sehingga perubahan dalam kebijakan harga input ini akan sangat berpengaruh terhadap usahatani cengkeh.

Provinsi	Skenario			
	Harga Output	Harga Input	Produktivitas	Nilai Tukar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	-51,36	1.494,08	-50,93	-50,53
Jambi	-50,54	983,53	-51,45	-50,53
Kepulauan Riau	-52,26	1.375,09	-53,06	-52,18
Jawa Timur	-95,84	11.751,27	-95,88	-95,88
Banten	-89,68	6.365,39	-89,52	-89,28
Bali	-86,21	5.581,42	-85,79	-85,98
Nusa Tenggara Barat	-77,36	2.440,80	-77,02	-76,91
Nusa Tenggara Timur	-73,19	56.198,47	-73,65	-71,97
Sulawesi Utara	-67,30	4.716,80	-68,19	-67,02
Sulawesi Tengah	-52,26	404,85	-51,63	-52,18
Sulawesi Barat	-34,81	146,55	-34,92	-34,86
Maluku	-60,92	12.811,97	-62,57	-60,42
Maluku Utara	-55,73	5.719,75	-56,87	-55,47

Tabel 5. 10.

Analisis *Switching Value* untuk Komoditi Cengkeh di Indonesia Tahun 2014 (Persen)

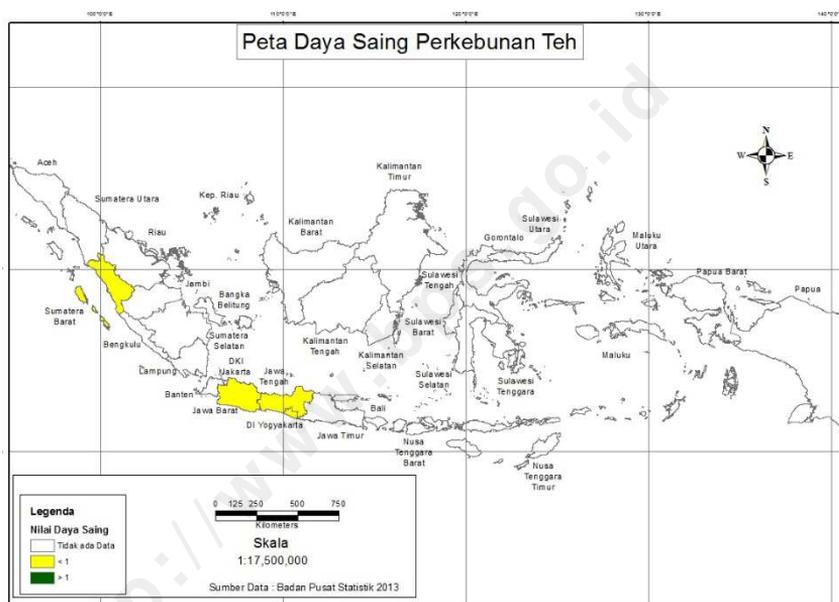
Sumber: ST2013-SKB, diolah

5.6. Analisis Daya Saing Usaha Tani Teh

5.6.1. Analisis Daya Saing Usaha Tani Teh di Indonesia

"Kualitas dan ekspor teh Indonesia mengalami penurunan terhadap pangsa pasarnya di dunia."

Hasil analisis daya saing dengan menggunakan PAM menunjukkan bahwa perusahaan perkebunan teh di Indonesia sebagian besar telah berdaya saing, baik secara kompetitif maupun komparatif. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai PCR dan DRC di hampir semua provinsi penghasil teh bernilai kurang dari satu, sehingga teh di Indonesia dapat dikatakan berdaya saing atau memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif (Gambar 4.6).



Gambar 5.6.

Peta Daya Saing Perkebunan Teh Indonesia Tahun 2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Kondisi tersebut memberikan peluang yang cukup terbuka bagi industri teh Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir komoditi teh terbesar kelima di dunia. Akan tetapi, masalah daya saing menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing agar dapat menghasilkan produk teh yang semakin kompetitif di pasar internasional. Peningkatan daya saing komoditi merupakan tantangan terbesar bagi komoditi teh di Indonesia terutama untuk menghadapi era perdagangan bebas. Namun, kualitas dan ekspor teh Indonesia mengalami penurunan terhadap pangsa pasarnya di dunia. Mengingat iklim persaingan yang semakin ketat, ditambah lagi dengan sudah tidak diberlakukannya kuota menyebabkan komoditi teh nasional mendapat ancaman serius dari negara-negara yang juga merupakan negara produsen teh seperti Vietnam.

Usahatani teh di Indonesia dibudidayakan di empat provinsi yaitu, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Komoditas teh di empat provinsi tersebut berdasarkan hasil analisis PAM memiliki daya saing karena nilai DRC kurang dari satu ($DRC < 1$). Analisis daya saing menggunakan PAM dapat dilihat dari dua nilai yaitu PCR dan DRC. PCR memperlihatkan daya saing secara privat, sedangkan DRC secara keseluruhan atau ekonomi. Provinsi yang memiliki daya saing tertinggi adalah Sumatera Barat dilihat dari nilai DRC sebesar 0.14. Sementara itu, daya saing paling rendah adalah Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai 0.26 (Tabel 5.11).

Sumatera Barat berdaya saing baik secara privat maupun ekonomi yang artinya untuk menghasilkan satu satuan produksi, baik secara finansial maupun ekonomi membutuhkan sumberdaya domestik masing-masing sebesar 50 persen dan 14 persen. Analisis PAM juga dapat digunakan untuk melihat dampak kebijakan pemerintah terhadap harga, pendapatan dan faktor produksi dapat dilihat dari nilai NPCI, NPCO, Net Transfer, dan EPC.

Tabel 5. 11.

Hasil
Analisis PAM
Usahatani
Teh di
Indonesia
Tahun 2014

Provinsi	NPCO	NPCI	Net Transfer	EPC	PCR	DRC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera Barat	0,29	0,61	-32.616.799,87	0,27	0,50	0,14
Jawa Tengah	0,53	3.702,93	-22.386.507,56	0,50	0,31	0,16
Jawa Barat	0,42	0,33	-23.278.563,02	0,44	0,48	0,21
DI Yogyakarta	0,26	0,68	-26.282.440,95	0,20	1,32	0,26

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Dampak kebijakan pemerintah terhadap harga teh dianalisis menggunakan NPCO. Berdasarkan hasil perhitungan, harga teh di Provinsi Sumbar lebih rendah dari harga yang internasionalnya karena nilai NPCO yang diperoleh sebesar 0,29 ($NPCO < 1$). Sedangkan untuk harga input, pemerintah menurunkan harga input tradable di pasar domestik dibawah harga efisiensinya, sehingga mampu mendorong petani untuk meningkatkan produksi.

Dampak kebijakan pemerintah terhadap pendapatan usahatani teh diperlihatkan pada hasil *Net Transfer*. *Net Transfer* bernilai negatif karena keuntungan privat lebih rendah dibandingkan keuntungan sosial. Keadaan ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah terhadap faktor produksi dan sumberdaya domestik serta harga teh secara keseluruhan tidak menguntungkan petani teh.

Hasil perhitungan EPC menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap faktor produksi yang diperdagangkan dan harga teh secara keseluruhan tidak efektif untuk melindungi petani, sehingga petani tidak tertarik untuk mengembangkan produksinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai EPC kurang dari satu, yaitu sebesar 0,27.

Provinsi DI Yogyakarta berdasarkan Tabel 4.11 berdaya saing secara ekonomi, namun tidak berdaya saing secara finansial karena nilai PCR lebih dari satu ($PCR > 1$). Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah terhadap input maupun output belum berjalan efektif yang ditunjukkan dari nilai *Net Transfer* dan Koefisien Proteksi Efektif (EPC).

5.6.2. Analisis Sensitivitas Daya Saing Usahatani Teh di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.12, dapat diketahui bahwa penurunan rata-rata harga output pada kisaran 64,20-85,17 persen akan membuat usahatani teh di Indonesia menjadi tidak berdaya saing. Sementara itu untuk skenario harga input, Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling sensitif. Apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar yang mencapai kisaran 73,61 sampai 85,24 persen akan membuat usahatani teh menjadi tidak berdaya saing.

Provinsi	Skenario			
	Harga Output	Harga Input	Produktivitas	Nilai Tukar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera Barat	-82,09	619,57	-82,85	-85,24
Jawa Barat	-69,78	595,18	-69,64	-73,61
Jawa Tengah	-85,17	1.934,41	-84,54	-84,33
DI Yogyakarta	-64,50	456,82	-63,55	-73,61

Tabel 5. 12.

Analisis *Switching Value* untuk Komoditi Teh di Indonesia Tahun 2014 (Persen)

Sumber: ST2013-SKB, diolah

5.7. Analisis Daya Saing Usahatani Kelapa

5.7.1. Analisis Daya Saing Usahatani Kelapa di Indonesia

Daya saing perkebunan kelapa di Indonesia secara umum telah berdaya saing yang ditunjukkan pada Gambar 5.7. Terdapat sembilan provinsi yang merupakan sentra penghasil kelapa di Indonesia, dan kesemuanya memiliki daya saing secara ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai DRC yang kurang dari satu ($DRC < 1$). Kesembilan provinsi tersebut adalah Riau, Kepulauan Riau, Banten, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Namun demikian berdasarkan nilai PCR terdapat satu provinsi yaitu Kalimantan Timur yang menunjukkan nilai lebih besar dari 1 yang berarti secara finansial. Provinsi Kalimantan Timur tidak berdaya saing.

“Riau merupakan provinsi yang memiliki daya saing tertinggi untuk usahatani kelapa.”



Gambar 5. 7.
Peta Daya Saing Perkebunan Kelapa Tahun 2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Tabel 5. 13.

Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa di Indonesia Tahun 2014

Provinsi	NPCO	NPCI	Net Transfer	EPC	PCR	DRC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Riau	0,02	0,17	-17.175.621.344,21	0,02	0,68	0,02
Banten	0,42	-	-681.393.126,44	0,42	0,29	0,12
Kepulauan Riau	0,39	0,11	-124.814.474,43	0,40	0,37	0,15
Jambi	0,42	0,16	-876.282.367,36	0,44	0,38	0,17
Sulawesi Tengah	0,71	0,35	-199.600.862,48	0,72	0,40	0,29
Kalimantan Barat	0,57	0,22	-427.370.642,95	0,57	0,74	0,42
Kalimantan Selatan	0,87	-	-57.698.624,00	0,87	0,52	0,45
Kalimantan Tengah	0,61	1,41	-490.528.284,44	0,54	0,96	0,52
Kalimantan Timur	0,64	1,96	-27.688.043,91	0,62	1,15	0,72

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Riau merupakan provinsi yang memiliki daya saing tertinggi untuk usahatani kelapa. Pengusahaan kelapa di Provinsi Riau memiliki daya saing baik secara kompetitif maupun komparatif. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis PCR dan DRC yang bernilai kurang dari satu, yaitu masing-masing sebesar 0,68 dan 0,02.

Dampak kebijakan pemerintah terhadap harga kelapa dianalisis menggunakan NPCO. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai NPCO kelapa di Provinsi Riau lebih kecil dari harga yang seharusnya ($NPCO < 1$) yang berarti kebijakan pemerintah menghambat peningkatan produksi. Harga kelapa yang diterima petani lebih rendah 98 persen dari harga sebenarnya.

Dampak kebijakan pemerintah terhadap faktor produksi dilihat berdasarkan nilai NPCI. Nilai NPCI yang dihasilkan pada usahatani kelapa bernilai kurang dari satu yang berarti faktor produksi yang diperdagangkan memberikan insentif kepada petani secara keseluruhan.

Dampak kebijakan pemerintah terhadap pendapatan usahatani kelapa di Riau, diperlihatkan oleh hasil *Net Transfer*. *Net Transfer* pada Tabel 4.13 bernilai negatif yang berarti kebijakan diterapkan pemerintah terhadap faktor produksi dan sumber daya domestik serta harga kelapa secara keseluruhan merugikan petani kelapa. Nilai EPC usahatani kelapa yang diperoleh sebesar 0,02. Nilai tersebut kurang dari satu yang artinya kebijakan pemerintah terhadap faktor produksi yang diperdagangkan dan harga kelapa secara keseluruhan kurang mendukung petani kelapa dalam mengembangkan produksinya.

Komoditi kelapa di Kalimantan Timur memiliki nilai daya saing ekonomi terendah dibandingkan provinsi lainnya. Hal ini diperkuat dengan nilai daya saing finansial (PCR) sebesar 1,15 yang berarti tidak berdaya saing. Rendahnya nilai daya saing kelapa di Kalimantan Timur didorong oleh tidak efektifnya kebijakan input (NPCI) maupun output (NPCO) yang diterapkan oleh pemerintah.

Dampak kebijakan pemerintah terhadap keseluruhan input dan output yang diestimasi menggunakan EPC dan *Net Transfer* juga memberikan dampak negatif bagi usahatani kelapa di Kalimantan Timur. *Net Transfer* sebesar -27 juta berarti kebijakan pemerintah secara keseluruhan merugikan pendapatan petani Kelapa di Kalimantan Timur. Nilai EPC yang bernilai kurang dari satu yaitu sebesar 0,62 ($EPC < 1$) berarti bahwa proteksi pemerintah terhadap input dan output kelapa di Kalimantan Timur belum efektif.

5.7.2. Analisis Sensitivitas Daya Saing Usahatani Kelapa di Indonesia

Analisis *switching value* dilakukan untuk melihat persentase perubahan harga output, harga input, dan produktivitas agar kelapa tidak berdaya saing ($DRC > 1$). Analisis *switching value* lebih efektif diterapkan pada Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Hal tersebut disebabkan skenario perubahan terhadap penurunan harga output, penurunan produktivitas, dan apresiasi nilai tukar lebih sensitif pada Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan skenario kenaikan harga input lebih sensitif dilakukan di Kalimantan Tengah. Harga output dan produktivitas harus diturunkan sebesar 27 persen dan nilai tukar terapresiasi sebesar 26,6 persen agar Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki daya saing lagi. Sementara itu, harga input harus dinaikkan sebesar 499 persen supaya Kalimantan Tengah tidak lagi memiliki daya saing. Provinsi Riau yang memiliki nilai daya saing tertinggi tidak sensitif terhadap perubahan harga output, harga input, produktivitas, dan nilai tukar (Tabel 4.14).

Provinsi	Skenario			
	Harga Output	Harga Input	Produktivitas	Nilai Tukar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Riau	-97,89	20.385,95	-97,89	-97,65
Jambi	-76,85	1.026,07	-76,86	-76,91
Kepulauan Riau	-82,76	2.778,18	-82,78	-82,68
Banten	-87,88	-	-87,88	-87,22
Kalimantan Barat	-56,71	3.565,23	-56,78	-56,30
Kalimantan Tengah	-44,10	499,11	-44,24	-43,93
Kalimantan Selatan	-54,66	-	-54,81	-54,24
Kalimantan Timur	-27,15	1.767,34	-27,29	-26,62
Sulawesi Tengah	-69,44	3.137,76	-69,42	-69,08

Tabel 5. 14.

Analisis
*Switching
Value* untuk
Komoditi
Kelapa di
Indonesia
Tahun 2014
(Persen)

Sumber: ST2013-SKB, diolah

6

Analisis Peremajaan Tanaman Perkebunan

BAB 6

Analisis Peremajaan Tanaman Perkebunan

“Tanaman yang perlu diremajakan berbeda antardaerah.”



Analisis peremajaan dalam bagian ini dimulai dari tingkat nasional dengan melihat kondisi dari seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian dianalisis kondisi di setiap pulau dan provinsi. Untuk data di tingkat nasional disajikan dalam bentuk jumlah pohon di setiap provinsi. Selain itu, didukung juga oleh peta yang menggambarkan provinsi yang perlu segera untuk diremajakan (diarsir warna merah). Sedangkan untuk analisis di tingkat provinsi, disajikan data dalam bentuk presentase jumlah pohon, sehingga data untuk setiap provinsi merupakan presentase dari total jumlah tanaman di Indonesia baik tanaman yang belum menghasilkan, masih menghasilkan, dan tidak menghasilkan.

Defenisi untuk tanaman belum menghasilkan (TBM), masih menghasilkan (TM), dan tidak menghasilkan (TTM) untuk masing-masing komoditi berbeda-beda seperti yang tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6. 1.
Klasifikasi
Umur Tanaman
Komoditi
Berkebunan
Tahun 2014
(Tahun)

Komoditi	TBM	TM	TTM
(1)	(2)	(3)	(4)
Kelapa Sawit	0-2,9	3-25	>25
Cengkeh	0-4,4	4,5-25	>25
Kelapa	0-3,9	4-25	>25
Teh	0-2,9	3-40	>40
Kopi	0-2,9	3-20	>20
Kakao	0-3,9	4-25	>25
Karet	0-3,9	4-25	>25

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Kegiatan peremajaan merupakan kegiatan investasi yang mempunyai masa pengembalian yang cukup panjang. Investor (dalam hal ini petani) perlu menilai secara *ex ante* apakah investasi tersebut akan menguntungkan sebelum memutuskan apakah akan melaksanakannya. Dalam kajian ini, untuk mengetahui apakah peremajaan yang dilakukan menguntungkan atau tidak dilihat dari kelayakan ekonomi dan finansialnya. Hal ini dilihat dari nilai *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *payback period*, dan *Net Benefit Cost Ratio* (Net B/C) yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Indikator-indikator kelayakan tersebut dipakai untuk memberi gambaran bahwa peremajaan menguntungkan atau tidak.

6.1. Analisis Peremajaan Usahatani Karet

“Perlu upaya percepatan peremajaan karet rakyat dan pengembangan industri hilir.”

Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan penting, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan devisa, pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar perkebunan karet maupun pelestarian lingkungan dan sumberdaya hayati. Namun sebagai negara dengan luas areal terbesar dan produksi kedua terbesar dunia. Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, yaitu rendahnya produktivitas, terutama karet rakyat yang merupakan mayoritas (91 persen) areal karet nasional dan ragam produk olahan yang masih terbatas, yang didominasi oleh karet remah (*crumb rubber*). Salah satu penyebab rendahnya produktivitas banyaknya areal tua, rusak dan tidak produktif, penggunaan bibit bukan klon unggul serta kondisi kebun yang menyerupai hutan. Oleh karena itu perlu upaya percepatan peremajaan karet rakyat dan pengembangan industri hilir.

Pohon karet memiliki umur ekonomis antara 4-25 tahun dan setelah itu pohon karet menjadi tidak ekonomis lagi karena produksinya sudah menurun. Secara lebih detail, jenis pohon karet berdasarkan umur dapat dibagi menjadi tanaman belum menghasilkan (TBM), tanaman menghasilkan (TM), dan tanaman tidak menghasilkan (TTM). Pohon karet yang termasuk TBM adalah umur 0-3,9 tahun, yang termasuk TM antara umur 4-25 tahun, serta lebih dari 25 tahun termasuk TTM.

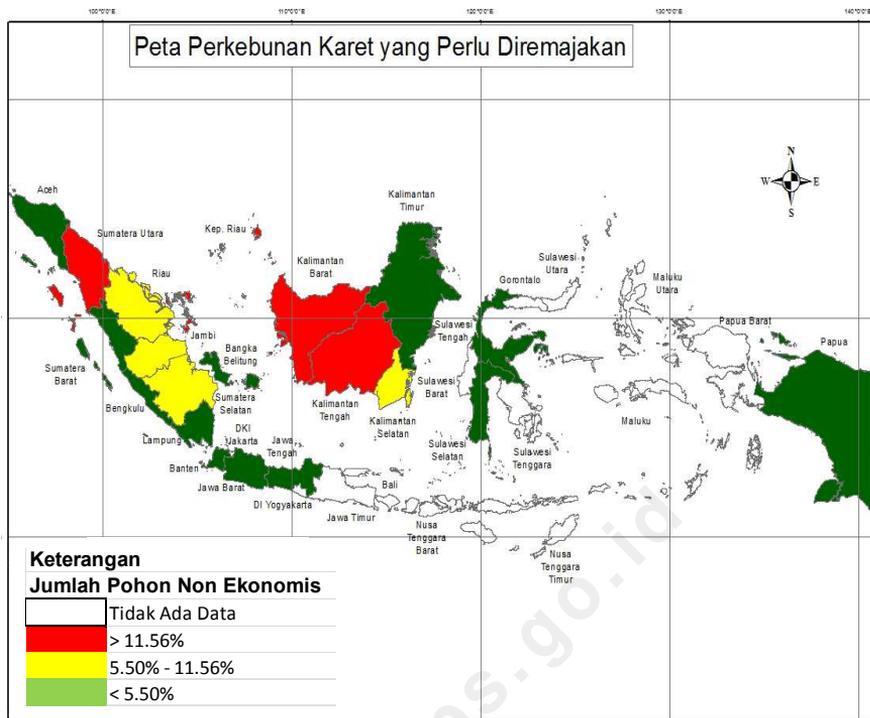
Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	147.248,00	609.340,00	91.787,00
Sumut	391.827,00	2.593.953,00	501.016,00
Sumbar	363.257,00	1.301.646,00	136.201,00
Riau	253.722,00	1.892.163,00	289.613,00
Jambi	437.846,00	3.034.088,00	291.057,00
Sumsel	947.005,00	5.829.069,00	252.723,00
Bengkulu	132.779,00	769.783,00	18.707,00
Lampung	178.712,00	2.300.361,00	10.548,00
Babel	208.666,00	777.537,00	50.670,00
Kepri	121.568,00	402.957,00	399.698,00
Jabar	140.472,00	792.076,00	13.580,00
Jateng	36.363,00	170.073,00	1.050,00
Banten	84.218,00	388.649,00	22.706,00
Kalbar	1.205.205,00	4.732.960,00	525.958,00
Kalteng	1.094.035,00	4.420.726,00	541.093,00
Kalsel	600.903,00	2.704.877,00	212.254,00
Kaltim	188.058,00	828.358,00	22.995,00
Sulteng	17.620,00	82.748,00	4.725,00
Sulsel	16.607,00	32.607,00	1.000,00
Papua	17.857,00	96.233,00	41.207,00
Total	6.583.968,00	33.760.204,00	3.428.588,00

Tabel 6.2

Jumlah Pohon Karet Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Indonesia, Tahun 2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar pohon karet yang ada di Indonesia masih merupakan tanaman menghasilkan (TM). Jumlah pohon karet yang sudah tidak produktif lagi (TTM) sebanyak 3.428.588 yang dihitung dari total 20 provinsi sentra karet di Indonesia.



Gambar 6. 1.
Peta
Keperluan
Peremajaan
Komoditi
Karet Tahun
2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Jumlah pohon karet yang tidak menghasilkan (TTM) paling banyak terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara. Sehingga pohon karet di tiga provinsi ini yang harus segera diremajakan. Jika dilihat pada Gambar. 6.1 maka provinsi dengan arsiran warna merah merupakan daerah yang pohon karet *urgent* untuk diremajakan.

Tingginya jumlah tanaman yang tua disebabkan oleh ketidaksiapan petani untuk mengikuti peremajaan, karena akan memutus pendapatannya selama tanaman berproduksi kembali, yaitu 5 tahun. Untuk memperoleh pendapatan, petani melakukan penyadapan pada cabang-cabang tanaman karet, walaupun letaknya tinggi (>2,7 meter). Penyadapan ini dilakukan dengan menggunakan tangkai bambu.

Sebenarnya peremajaan masih dapat dilakukan tanpa memutus pendapatan petani begitu besar. Alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan peremajaan secara bertahap. Peremajaan bertahap adalah peremajaan yang dilakukan sebagian-sebagian dari tanaman karet yang ada. Misalnya peremajaan dilakukan pada tahun pertama sebesar 30 persen dari jumlah baris tanaman yang ada. Pada tahun kedua juga 30 persen dan pada tahun ketiga sisanya. Cara ini masih memberi kesempatan pada petani untuk memperoleh pendapatan dari hasil penyadapan karet tua yang belum ditebang.

Pendapatan petani ini masih dapat ditingkatkan dengan menanam tanaman sela di antara tanaman karet muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman tua yang belum ditebang, walaupun menaungi tanaman karet muda tetapi tidak mempengaruhi pertumbuhannya. Cara ini dapat diadopsi petani ketika menerima bantuan benih karet dari pemerintah dengan jumlah yang terbatas seperti hanya 120-200 batang.

Jika dianalisis lebih rinci untuk setiap provinsi, maka jumlah pohon karet yang sudah tidak menghasilkan paling banyak di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. Sedangkan untuk pohon karet yang belum dan masih menghasilkan paling banyak di Provinsi Sumatera Selatan. Artinya, pohon karet yang ada di Sumatera Selatan masih produktif dan memiliki potensi yang bagus untuk jangka panjang dengan masih banyaknya pohon karet yang muda dan belum menghasilkan. Sebanyak 17,27 persen dari total pohon karet yang masih menghasilkan di Indonesia terdapat di Provinsi Sumatera Selatan. Begitu pula dengan total pohon karet yang belum menghasilkan di Indonesia, sebanyak 14,38 persen ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2,24	1,80	2,68
Sumut	5,95	7,68	14,61
Sumbar	5,52	3,86	3,97
Riau	3,85	5,60	8,45
Jambi	6,65	8,99	8,49
Sumsel	14,38	17,27	7,37
Bengkulu	2,02	2,28	0,55
Lampung	2,71	6,81	0,31
Babel	3,17	2,30	1,48
Kepri	1,85	1,19	11,66

Tabel 6. 3.
Jumlah Pohon Karet Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Sumatera Tahun 2014(Persen)

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Kondisi inilah yang mendukung Sumatera Selatan sebagai penghasil karet terbesar di Indonesia. Komoditi karet menjadi andalan ekspor wilayah dari sisi non migas. Selain itu, komoditi karet merupakan penopang bagi kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan secara turun temurun dan lebih dari 60 persen penduduk hidup dari sektor ini baik secara langsung dengan berkebun maupun yang terlibat secara tidak langsung pada jasa dari sektor ini. Hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Sumatera Selatan merupakan

penghasil karet, kecuali kota Palembang. Karet di Sumatera Selatan dihasilkan dari dua jenis perkebunan yaitu perkebunan besar milik negara dan swasta dan perkebunan rakyat (Suharman dkk. 2013).

Sedangkan di Pulau Jawa, usahatani karet tidak terlalu banyak dilakukan sehingga jumlah pohon karet yang ada di pulau ini juga tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Pulau Sumatera. Dari pohon yang ada, sebagian besar merupakan pohon karet yang menghasilkan seperti di Jawa Barat. Sedangkan pohon karet yang ada di Jawa Tengah dan Banten lebih banyak yang belum menghasilkan (TBM).

Tabel 6. 4.

Jumlah Pohon Karet Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2014 (Persen)

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jabar	2,13	2,35	0,40
Jateng	0,55	0,50	0,03
Banten	1,28	1,15	0,66

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Selain di Pulau Sumatera, maka pohon karet juga banyak terdapat di Pulau Kalimantan terutama di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pohon karet yang ada di tiga provinsi tersebut paling banyak berumur antara 0-3,9 tahun atau belum menghasilkan. Selain itu, jumlah pohon karet yang sudah tidak produktif (umur lebih dari 25 tahun) juga relatif banyak. Misalnya di Provinsi Kalimantan Barat jumlah pohon yang tidak menghasilkan atau tidak produktif adalah 15,34 persen dari total pohon karet tidak menghasilkan di Indonesia.

Tabel 6. 5.

Jumlah Pohon Karet Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Lainnya Tahun 2014 (Persen)

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalbar	18,31	14,02	15,34
Kalteng	16,62	13,09	15,78
Kalsel	9,13	8,01	6,19
Kaltim	2,86	2,45	0,67
Sulteng	0,27	0,25	0,14
Sulse	0,25	0,10	0,03
Papua	0,27	0,29	1,20

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Sebagai gambaran, peremajaan tanaman karet masih layak dilakukan yang dilihat dari nilai IRR, NPV, dan *payback period* dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Marampa, dkk (2014). Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kutai Barat tersebut menunjukkan bahwa pengembalian investasi usahatani karet pada tingkat suku bunga 18 persen adalah pada tahun ke-6 (*pay back period* adalah 6 tahun). Nilai NPV dari usahatani karet tersebut pada tingkat suku bunga 18 persen layak diusahakan pada waktu mulai tahun ke-6. Nilai IRR dari usahatani karet di menunjukkan bahwa usahatani karet layak diusahakan dalam jangka waktu pengusahaan 6 tahun keatas pada tingkat *discount rate* maksimal 16,8 persen atau pada tahun ke 7 pada tingkat *discount rate* maksimal 28,8 persen.

Penelitian yang dilakukan oleh Nastalia, dkk (2014) menunjukkan bahwa peremajaan karet di Kabupaten Kampar seluas 10.000 hektar akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 45 juta (asumsi produksi kayu 150 m³/ha dan harga kayu karet bulat Rp 300.000/m³). Jumlah dana yang diperlukan untuk peremajaan Rp 10,5 juta per hektar, dengan tingkat suku bunga maksimal adalah 10 persen, maka total pengembalian kredit selama 10 tahun adalah Rp 16,3 juta. Dengan peremajaan bertahap, dalam 15 tahun produktivitas perkebunan akan meningkat jadi 1,15 ton/ha/tahun (naik 47 persen).

6.2. Analisis Peremajaan Usahatani Kopi

Pohon kopi memiliki umur ekonomis antara 3-20 tahun dan setelah itu pohon kopi menjadi tidak ekonomis lagi karena produksinya sudah menurun. Secara lebih detail, jenis pohon kopi berdasarkan umur dapat dibagi menjadi tanaman belum menghasilkan (TBM), tanaman menghasilkan (TM), dan tanaman tidak menghasilkan (TTM). Pohon kopi yang termasuk TBM adalah umur 0-2,9 tahun, yang termasuk TM antara umur 3-20 tahun, serta lebih dari 20 tahun termasuk TTM.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat diketahui bahwa pohon kopi yang ada di Indonesia lebih banyak yang masih merupakan tanaman menghasilkan (TM) dibandingkan dengan yang sudah tua. Jumlah pohon kopi yang masih menghasilkan yaitu sebesar 40.848.018 dan sebanyak 6.251.705 merupakan pohon kopi tidak menghasilkan.

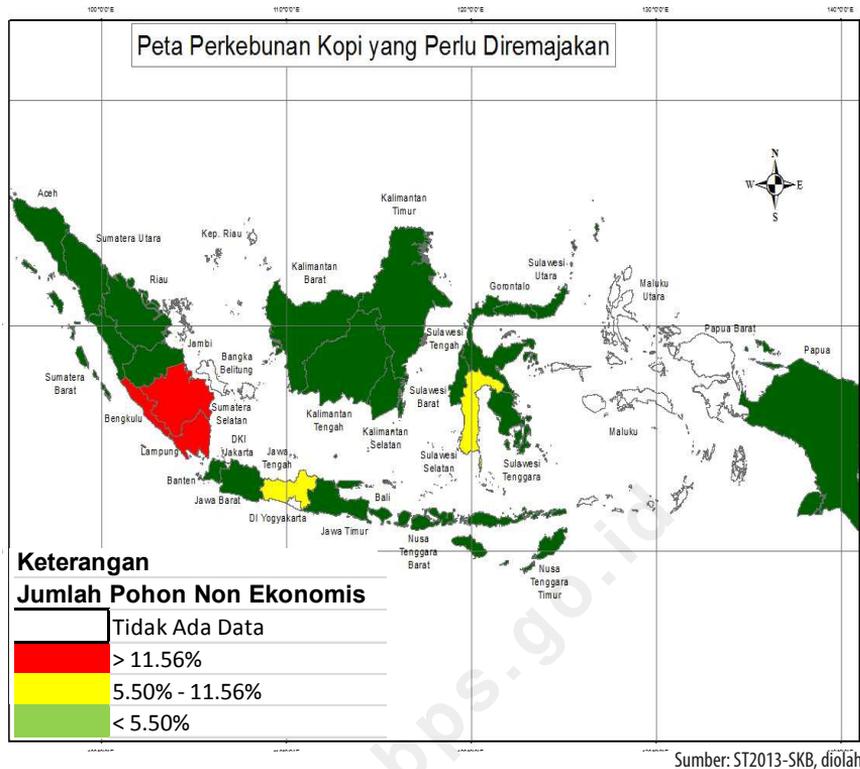
"Pohon kopi memiliki umur ekonomis antara 3-20 tahun."

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	207.141,00	1.068.248,00	72.350,00
Sumut	133.268,00	1.253.642,00	36.193,00
Sumbar	49.044,00	352.157,00	135.365,00
Riau	-	15.945,00	9.240,00
Jambi	277.889,00	1.387.479,00	31.380,00
Sumsel	367.322,00	6.895.615,00	1.791.234,00
Bengkulu	526.064,00	8.003.889,00	843.865,00
Lampung	260.766,00	5.270.777,00	1.534.025,00
Jabar	597.540,00	4.590.482,00	333.264,00
Jateng	334.139,00	2.612.937,00	351.221,00
Jatim	417.503,00	3.097.294,00	269.240,00
Banten	1.315,00	10.219,00	4.940,00
Bali	204.734,00	1.671.049,00	126.639,00
NTB	107.983,00	913.691,00	48.570,00
NTT	77.873,00	693.848,00	160.054,00
Kalbar	1.355,00	28.179,00	-
Kalteng	-	3.616,00	-
Kalsel	100,00	2.550,00	-
Kaltim	1.710,00	34.009,00	-
Sulut	3.694,00	63.405,00	39.390,00
Sulteng	17.658,00	74.843,00	5.420,00
Sulse	193.418,00	2.366.838,00	355.528,00
Sultra	3.600,00	25.505,00	2.750,00
Gorontalo	8.850,00	17.300,00	11.920,00
Sulbar	36.472,00	370.382,00	87.222,00
Papua	2.275,00	24.119,00	1.895,00
Total	3.831.713,00	40.848.018,00	6.251.705,00

Tabel 6. 6.

Jumlah Pohon Kopi Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Indonesia, Tahun 2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah



Gambar 6. 2.

Peta Keperluan Peremajaan Komoditi Kopi Tahun 2014

Untuk Pulau Sumatera, perkebunan kopi yang ada di Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, dan Bengkulu merupakan perkebunan dengan jumlah pohon terbanyak. Dimana sebagian besar pohon kopi tersebut sudah tidak menghasilkan. Di Provinsi Sumsel terdapat 28,65 persen dari total pohon kopi yang tidak menghasilkan di Indonesia. Sedangkan di Lampung terdapat 24,54 persen pohon kopi yang tidak menghasilkan.

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5,41	2,62	1,16
Sumut	3,48	3,07	0,58
Sumbar	1,28	0,86	2,17
Riau	0,00	0,04	0,15
Jambi	7,25	3,40	0,50
Sumsel	9,59	16,88	28,65
Bengkulu	13,73	19,59	13,50
Lampung	6,81	12,90	24,54

Tabel 6. 7.

Jumlah Pohon Kopi Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Sumatera Tahun 2014 (Persen)

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Sedangkan di Provinsi Jabar, Jatim, dan Bali, pohon kopi sebagian besar masih merupakan tanaman tanaman yang belum menghasilkan. Jumlah pohon kopi yang tidak menghasilkan relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang belum dan masih menghasilkan.

Tabel 6. 8.

Jumlah Pohon Kopi Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2014 (Persen)

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jabar	15,59	11,24	5,33
Jateng	8,72	6,40	5,62
Jatim	10,90	7,58	4,31
Banten	0,03	0,03	0,08
Bali	5,34	4,09	2,03
NTB	2,82	2,24	0,78
NTT	2,03	1,70	2,56

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Untuk di pulau lainnya, maka kopi paling banyak terdapat di Sulawesi Selatan. Dimana jumlah pohon kopi baik yang tidak menghasilkan hanya sebesar 5,69 persen. Jenis kopi yang ditanaman di Sulawesi Selatan adalah kopi arabika yang diekspor ke Jepang, Amerika, dan Belgia.

Tabel 6. 9.

Jumlah Pohon Kopi Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Lainnya Tahun 2014 (Persen)

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalbar	0,04	0,07	0,00
Kalteng	0,00	0,01	0,00
Kalsel	0,00	0,01	0,00
Kaltim	0,04	0,08	0,00
Sulut	0,10	0,16	0,63
Sulteng	0,46	0,18	0,09
Sulsel	5,05	5,79	5,69
Sultra	0,09	0,06	0,04
Gorontalo	0,23	0,04	0,19
Sulbar	0,95	0,91	1,40
Papua	0,06	0,06	0,03

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Sebagai gambaran hasil penelitian usahatani kopi rakyat di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa nilai IRR sebesar 13,4 persen. *Payback period* dari usahatani kopi rakyat di Kabupaten Jember jika menggunakan nilai NPV yaitu selama 11 tahun 1 bulan 8 hari dan jika menggunakan nilai *net benefit* yaitu selama 7 tahun 5 bulan 2 hari. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan usahatani kopi rakyat di Kabupaten Jember layak secara finansial (Laksono, 2014). Dalam penelitian tersebut, biaya peremajaan dimasukkan dalam biaya produksi yang dikeluarkan selama tanaman belum menghasilkan.

6.3. Analisis Peremajaan Usahatani Kelapa sawit

Pohon kelapa sawit memiliki umur ekonomis antara 3-25 tahun dan setelah itu pohon kelapa sawit menjadi tidak ekonomis lagi karena produksinya sudah menurun. Secara lebih detail, jenis pohon kelapa sawit berdasarkan umur dapat dibagi menjadi tanaman belum menghasilkan (TBM), tanaman menghasilkan (TM), dan tanaman tidak menghasilkan (TTM). Pohon kelapa sawit yang termasuk TBM adalah umur 0-2,9 tahun, yang termasuk TM antara umur 3-25 tahun, serta lebih dari 25 tahun termasuk TTM.

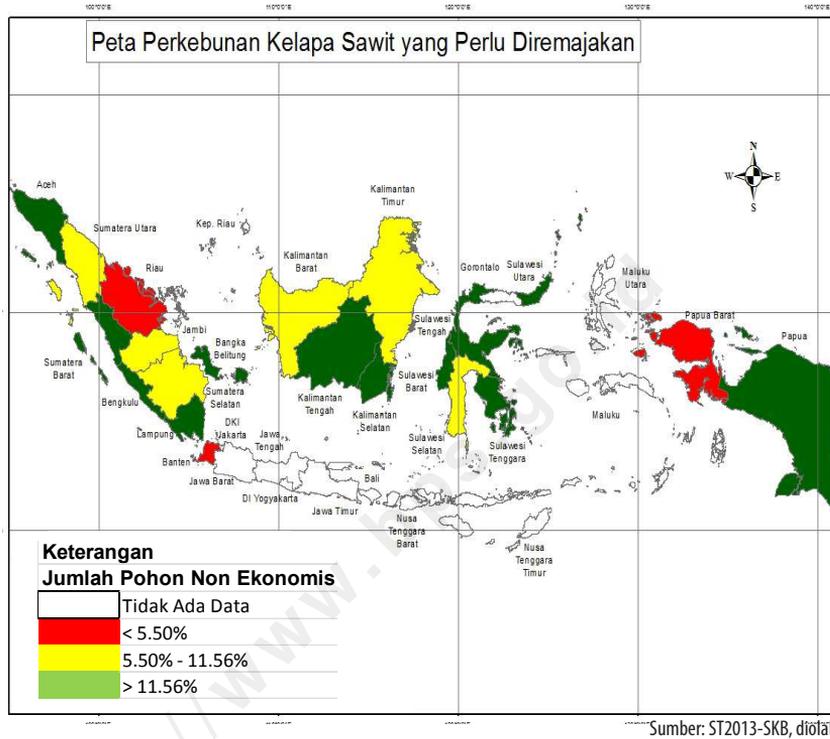
"Pohon kelapa sawit memiliki umur ekonomis antara 3-25 tahun."

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	117.732,00	425.565,00	3.490,00
Sumut	69.703,00	809.778,00	12.904,00
Sumbar	61.407,00	436.994,00	1.172,00
Riau	144.070,00	1.586.726,00	52.757,00
Jambi	67.147,00	831.804,00	16.261,00
Sumsel	23.557,00	311.058,00	16.130,00
Bengkulu	61.541,00	375.782,00	2.751,00
Lampung	15.951,00	225.198,00	105,00
Babel	61.198,00	240.162,00	784,00
Banten	8.172,00	43.692,00	28.026,00
Kalbar	41.690,00	495.581,00	23.060,00
Kalteng	106.601,00	403.450,00	581,00
Kalsel	32.277,00	144.336,00	165,00
Kaltim	105.428,00	491.311,00	14.211,00
Sulteng	22.605,00	89.811,00	670,00
Sulse	14.655,00	49.514,00	13.733,00
Sultra	6.477,00	43.689,00	-
Sulbar	50.138,00	226.935,00	584,00
Papua Barat	-	18.668,00	36.140,00
Papua	-	4.120,00	4.255,00
Total	1.010.349,00	7.254.174,00	227.779,00

Tabel 6. 10.
Jumlah Pohon Kelapa sawit Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Indonesia, Tahun 2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Pohon kelapa sawit yang ada di Indonesia sebagian besar merupakan tanaman yang menghasilkan dan hanya sedikit yang tidak menghasilkan. Tanaman kelapa sawit yang tidak menghasilkan sebanyak 227.779 pohon. Provinsi yang perlu segera diremajakan tanaman kelapa sawitnya adalah di Riau, Kalimantan Barat, dan Papua Barat.



Gambar 6. 3.
Peta Keperluan Peremajaan Komoditi Kelapa sawit Tahun 2014

Sedangkan di Pulau Sumatera, Riau merupakan sentra produksi kelapa sawit, dimana sebagian besar pohon kelapa sawit merupakan tanaman yang sudah tua dan tidak menghasilkan lagi (23,16 persen). Sedangkan dari total tanaman menghasilkan di Indonesia sebanyak 21,87 persen terdapat di Provinsi Riau. Keterangan lebih jelasnya mengenai kondisi tanaman kelapa sawit di Pulau Sumatera dapat dilihat pada Tabel 6.11.

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	11,65	5,87	1,53
Sumut	6,90	11,16	5,67
Sumbar	6,08	6,02	0,51
Riau	14,26	21,87	23,16
Jambi	6,65	11,47	7,14
Sumsel	2,33	4,29	7,08
Bengkulu	6,09	5,18	1,21
Lampung	1,58	3,10	0,05
Babel	6,06	3,31	0,34

Tabel 6. 11.

Persentase Jumlah Pohon Kelapa sawit Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Sumatera Tahun 2014 (Persen)

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Begitu pula dengan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang diwakili Banten, menunjukkan bahwa tanaman kelapa sawit yang tidak menghasilkan lebih banyak yaitu sebesar 12,30 persen. Sementara tanaman yang belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkannya (TM) sangat kecil, kurang dari satu persen.

Tabel 6. 12.

Persentase Jumlah Pohon Kelapa sawit Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Banten Tahun 2014(Persen)

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Banten	0,81	0,60	12,30

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Selain kawasan Pulau Sumatera, kawasan Pulau Kalimantan dan juga Pulau Sulawesi pun memiliki kawasan perkebunan kelapa sawit dan menjadi salah satu daerah persebaran komoditi kelapa sawit yang cukup besar di Indonesia. Di Pulau Kalimantan dan Sulawesi juga terdapat lokasi perkebunan yang cukup luas dan menjadi penyumbang kebutuhan akan komoditi kelapa sawit untuk berbagai sektor. Dari segi kualitas, kelapa sawit dari Kalimantan dan Sulawesi juga memiliki kualitas yang tinggi dan dapat dijual ataupun diekspor dengan harga yang tinggi pula. Persebaran kelapa sawit di Indonesia yang cukup banyak menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang menghasilkan kelapa sawit dengan jumlah besar dan kualitas yang tak perlu diragukan lagi.

Kondisi tanaman kelapa sawit diantara pulau-pulau tersebut juga sama yaitu lebih banyak tanaman yang tidak menghasilkan (TTM) yaitu di Provinsi Kalbar, Sulsel, dan Papua Barat.

Tabel 6. 13.
Persentase Jumlah Pohon Kelapa sawit Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Lainnya Tahun 2014 (Persen)

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalbar	4,13	6,83	10,12
Kalteng	10,55	5,56	0,26
Kalsel	3,19	1,99	0,07
Kaltim	10,43	6,77	6,24
Sulteng	2,24	1,24	0,29
Sulsel	1,45	0,68	6,03
Sultra	0,64	0,60	0,00
Sulbar	4,96	3,13	0,26
Papua Barat	0,00	0,26	15,87
Papua	0,00	0,06	1,87

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Hasil penelitian Asrida (2012) menunjukkan bahwa *payback period* proyek investasi di usahatani kelapa sawit adalah 3 tahun 8 bulan. Maka peremajaan tanaman kelapa sawit memungkinkan untuk dilakukan dan layak karena jangka waktu pengembalian investasi lebih kecil dari umur tanaman. Penelitian Asrida (2012) ini untuk menganalisis kelayakan finansial investasi pabrik kelapa sawit di Kabupaten Aceh Utara. Secara finansial, dengan *discount factor* 7 persen, kegiatan investasi pabrik kelapa sawit layak untuk dilaksanakan ditinjau dari semua kriteria investasi yang digunakan. Nilai NPV sebesar Rp. 106.698.657.000; IRR sebesar 22,34; Net B/C sebesar 2,30; dan *Payback Period* selama 3 tahun 8 bulan.

6.4. Analisis Peremajaan Usahatani Kakao

Pohon kakao memiliki umur ekonomis antara 4-25 tahun dan setelah itu pohon kakao menjadi tidak ekonomis lagi karena produksinya sudah menurun. Secara lebih detail, jenis pohon kakao berdasarkan umur dapat dibagi menjadi tanaman belum menghasilkan (TBM) tanaman menghasilkan (TM), dan tanaman tidak menghasilkan (TTM). Pohon kakao yang termasuk TBM adalah umur 0-3,9 tahun, yang termasuk TM antara umur 4-25 tahun, serta lebih dari 25 tahun termasuk TTM.

Di Indonesia, perkebunan kakao didominasi oleh perkebunan rakyat, yaitu perkebunan nan dimiliki oleh masyarakat. Kepemilikan perkebunan kakao rata-rata buat setiap petani ini sangat kecil, yaitu hanya 1 Ha per petani. Wilayah-wilayah pengembangan perkebunan tanaman kako di Indonesia yang dianggap cukup potensial yaitu di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua.

"Pohon kakao memiliki umur ekonomis antara 4-25 tahun."

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	105.779,00	1.080.889,00	14.210,00
Sumut	16.573,00	435.812,00	500,00
Sumbar	62.332,00	304.846,00	2.480,00
Riau	-	300,00	-
Jambi	680,00	6.550,00	-
Sumsel	2.200,00	20.479,00	100,00
Bengkulu	3.270,00	50.590,00	-
Lampung	18.224,00	1.284.154,00	4.600,00
Babel	-	300,00	-
Jabar	-	7.600,00	-
Jateng	150,00	17.450,00	-
Jatim	40,00	4.710,00	-
Banten	2.776,00	82.597,00	3.525,00
Bali	2.900,00	69.451,00	4.145,00
NTB	550,00	108.045,00	1.375,00
NTT	3.922,00	142.122,00	9.507,00
Kalbar	20,00	1.800,00	3.000,00
Kalteng	5.920,00	30.380,00	-
Kaltim	11.176,00	357.895,00	32.440,00
Sulut	9.568,00	147.470,00	720,00
Sulteng	88.421,00	2.895.466,00	50.326,00
Sulsel	132.758,00	3.175.102,00	101.151,00
Sultra	88.747,00	2.504.061,00	115.222,00
Gorontalo	26.152,00	538.763,00	2.330,00
Sulbar	44.539,00	2.134.940,00	89.715,00
Maluku	22.641,00	241.133,00	310,00
Malut	14.565,00	95.686,00	3.910,00
Papua Barat	2.816,00	218.400,00	11.000,00
Papua	17.223,00	392.923,00	21.740,00
Total	683.942,00	16.349.914,00	472.306,00

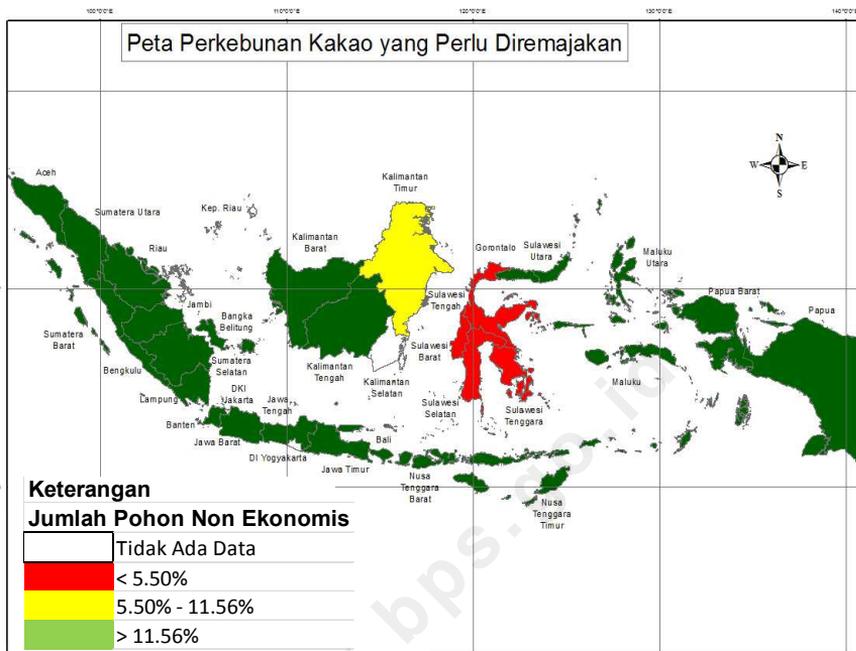
Tabel 6. 14.

Jumlah
Pohon Kakao
Berdasarkan Umur
Ekonomi dan
Non Ekonomis di
Indonesia, Tahun
2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Sementara itu, jenis kakao yang dibudidayakan di Indonesia pada umumnya berjenis kakao lindak. Sentra produksi primer kakao jenis ini ialah di Sulsel (Sulawesi Selatan), Sultra (Sulawesi Tenggara), dan Sulteng (Sulawesi Tengah). Jenis kakao lainnya yang dibudidayakan ialah jenis kakao mulia di perkebunan besar milik negara di Provinsi Jawa Timur dan

Jawa Tengah. Sementara itu, pemerintah pusat memfokuskan peningkatan jumlah produksi kakao di beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua.



Gambar 6. 4.
Peta Keperluan Peremajaan Komoditi Kakao Tahun 2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Jika dilihat dari kondisi tanaman yang ada di provinsi sentra produksi kakao maka tanaman kakaonya banyak yang sudah tua dan tidak menghasilkan lagi. Seperti yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, Barat, Selatan, dan Tenggara (arsir merah). Komoditi kakao di provinsi tersebut perlu segera diremajakan untuk meningkatkan produktivitasnya.

Tabel 6. 15.
Jumlah Pohon Kakao Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Sumatera Tahun 2014 (Persen)

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	15,47	6,61	3,01
Sumut	2,42	2,67	0,11
Sumbar	9,11	1,86	0,53
Riau	0,00	0,00	0,00
Jambi	0,10	0,04	0,00
Sumsel	0,32	0,13	0,02
Bengkulu	0,48	0,31	0,00
Lampung	2,66	7,85	0,97
Babel	0,00	0,00	0,00

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Sedangkan di Aceh, tanaman kakao masih banyak yang belum menghasilkan. Sementara itu, untuk di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara jumlah pohon kakao relatif sedikit dibandingkan dengan yang lain.

Tabel 6. 16.

Jumlah Pohon Kakao Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Persen)

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jabar	0,00	0,05	0,00
Jateng	0,02	0,11	0,00
Jatim	0,01	0,03	0,00
Banten	0,41	0,51	0,75
Bali	0,42	0,42	0,88
NTB	0,08	0,66	0,29
NTT	0,57	0,87	2,01

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Selain Sulawesi, maka sentra tanaman kakao yang sedang menjadi fokus pemerintah adalah Maluku dan Papua. Saat ini, di Maluku tanaman kakao lebih banyak yang masih muda (belum menghasilkan). Sementara di Papua, tanaman kakao banyak yang sudah tidak menghasilkan lagi.

Tabel 6. 17.

Jumlah Pohon Kakao Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Lainnya (Persen)

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalbar	-	0,01	0,64
Kalteng	0,87	0,19	-
Kaltim	1,63	2,19	6,87
Sulut	1,40	0,90	0,15
Sulteng	12,93	17,71	10,66
Sulsel	19,41	19,42	21,42
Sultra	12,98	15,32	24,40
Gorontalo	3,82	3,30	0,49
Sulbar	6,51	13,06	19,00
Maluku	3,31	1,47	0,07
Malut	2,13	0,59	0,83
Papua Barat	0,41	1,34	2,33
Papua	2,52	2,40	4,60

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Peremajaan tanaman merupakan proyek investasi yang dilakukan di usahatani kakao. Sebagai gambaran, analisis kelayakan proyek investasi pada

usahatani kakao ini yang pernah dilakukan oleh Dalfi (2012). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa investasi yang ditanamkan pada perkebunan kakao ini bisa kembali dalam waktu 3,95 tahun. Berdasarkan nilai NPV yang positif, proyek ini layak untuk dijalankan. Nilai IRR pada penelitian tersebut sebesar 36 persen, sehingga disimpulkan bahwa perkebunan kakao ini layak untuk dijalankan.

6.5. Analisis Peremajaan Usahatani Cengkeh

Pohon cengkeh memiliki umur ekonomis antara 4,4-25 tahun dan setelah itu pohon cengkeh menjadi tidak ekonomis lagi karena produksinya sudah menurun. Secara lebih detail, jenis pohon cengkeh berdasarkan umur dapat dibagi menjadi tanaman belum menghasilkan (TBM), tanaman menghasilkan (TM), dan tanaman tidak menghasilkan (TTM). Pohon cengkeh yang termasuk TBM adalah umur 0-4,4 tahun, yang termasuk TM antara umur 4,4-25 tahun, serta lebih dari 25 tahun termasuk TTM.

"Pohon cengkeh memiliki umur ekonomis antara 4,4-25 tahun."

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	11.332,00	18.880,00	7.436,00
Jambi	70,00	220,00	117,00
Kepri	9.247,00	25.488,00	28.763,00
Jatim	64.529,00	105.328,00	35.899,00
Banten	72.084,00	80.021,00	24.840,00
Bali	35.174,00	60.959,00	51.690,00
NTB	3.724,00	2.983,00	2.054,00
NTT	22.142,00	34.854,00	10.759,00
Sulut	137.382,00	261.275,00	58.880,00
Sulteng	91.769,00	122.433,00	41.523,00
Sulbar	6.296,00	8.409,00	993,00
Maluku	29.539,00	67.232,00	31.425,00
Malut	44.407,00	76.494,00	24.642,00
Total	527.695,00	864.576,00	319.021,00

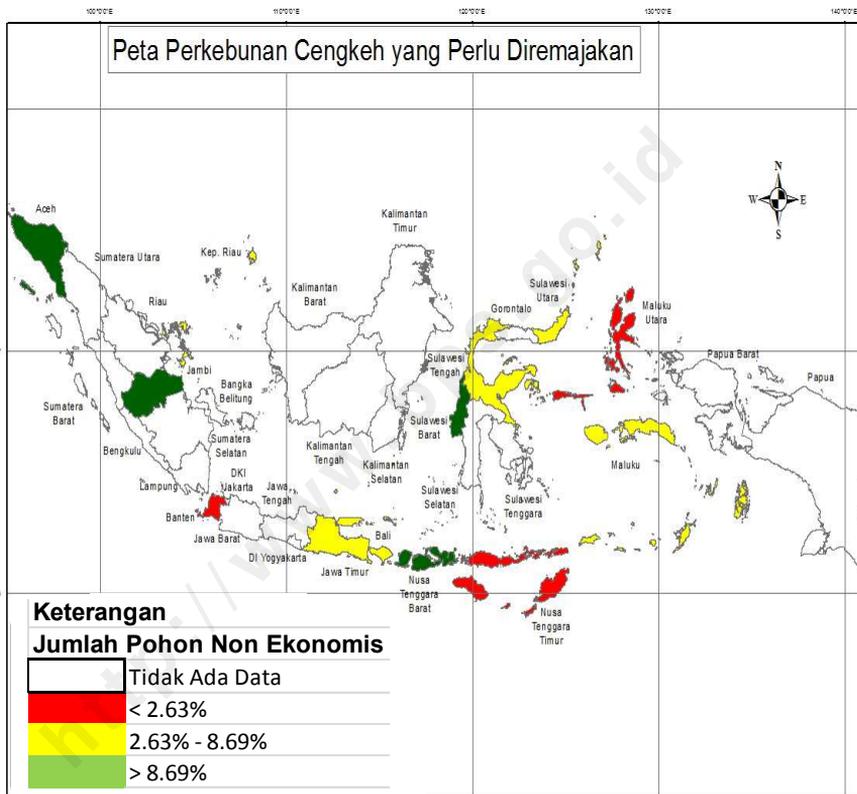
Tabel 6. 18.

Jumlah Pohon Cengkeh Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Indonesia, Tahun 2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Permasalahan yang berkaitan dengan turunnya produktivitas tanaman cengkeh di Indonesia secara umum adalah gabungan antara umur tanaman yang sudah tua dengan kurangnya pemeliharaan. Kedua faktor tersebut secara langsung mengakibatkan tanaman menjadi rusak. Salah satu parameter untuk menentukan

tingkat produktivitas tanaman cengkeh adalah dengan memperhatikan besarnya penutupan tajuk yang berhubungan dengan banyaknya ranting atau cabang yang hilang. Pembungaan tanaman cengkeh bersifat terminal (bunga hanya keluar pada ujung ranting) maka, penutupan tajuk erat kaitannya dengan jumlah bunga yang akan dihasilkan. Pada tahun 2013, jumlah pohon cengkeh yang ada di Indonesia sebanyak 527,695 (belum menghasilkan-TBM), 864,576 (menghasilkan-TM), dan 319,021 (tidak menghasilkan-TTM).



Gambar 6. 5.
Peta Keperluan
Peremajaan
Komoditi
Cengkeh Tahun
2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Berdasarkan kondisi tanamannya, maka komoditi cengkeh yang perlu segera diremajakan yaitu di Provinsi Sulawesi Tengah dan Utara, Gorontalo, serta Jawa Timur.

Tabel 6.19.

Persentase Jumlah Pohon Cengkeh Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Sumatera Tahun 2014(Persen)

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2,15	2,18	2,33
Jambi	0,01	0,03	0,04
Kepri	1,75	2,95	9,02

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Di Pulau Sumatera hanya ada 3 provinsi yang dianalisis sebagai sentra produksi cengkeh, yaitu Aceh, Jambi, dan Kepri. Kondisi tanaman cengkeh di provinsi tersebut sebagian besar sudah tidak menghasilkan lagi (TTM) yaitu di Kepri dan Aceh.

Tabel 6.20.

Persentase Jumlah Pohon Cengkeh Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2014 (%)

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jatim	12,23	12,18	11,25
Banten	13,66	9,26	7,79
Bali	6,67	7,05	16,20
NTB	0,71	0,35	0,64
NTT	4,20	4,03	3,37

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Bali dan Maluku dimana tanaman cengkeh yang tidak menghasilkan (TTM) relatif lebih banyak jumlahnya, masing-masing sebesar 16,20 persen dan 9,85 persen. Kondisi yang lebih baik terjadi di Provinsi Jatim, Sulut, dan Malut dimana pohon cengkeh lebih banyak yang masih produktif (TM).

Tabel 6.21.

Persentase Jumlah Pohon Cengkeh Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Pulau Lainnya Tahun 2014 (Persen)

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sulut	26,03	30,22	18,46
Sulteng	17,39	14,16	13,02
Sulbar	1,19	0,97	0,31
Maluku	5,60	7,78	9,85
Malut	8,42	8,85	7,72

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Usaha peremajaan tanaman cengkeh ini masih dapat dilakukan, jika kita melihat hasil penelitian dari Gusmawati, dkk (2014) yang menyatakan bahwa *payback period* untuk investasi cengkeh adalah selama 3 tahun 4 bulan. Artinya, untuk dapat mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan diperlukan waktu selama 3 tahun 4 bulan. Penelitian Gusmawati, dkk (2014) merupakan studi kasus untuk usahatani cengkeh di Kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa nilai NPV lebih besar dari nol. IRR sebesar 36 persen, dan nilai *Net B/C* lebih besar dari satu. Hal ini mengindikasikan bahwa usahatani cengkeh yang diusahakan layak secara finansial di Kabupaten Donggala.

6.6. Analisis Peremajaan Usahatani Teh

Pohon teh memiliki umur ekonomis antara 3-20 tahun dan setelah itu pohon teh menjadi tidak ekonomis lagi karena produksinya sudah menurun. Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan penerimaannya. Secara lebih detail, jenis pohon teh berdasarkan umur dapat dibagi menjadi tanaman belum menghasilkan (TBM), tanaman menghasilkan (TM), dan tanaman tidak menghasilkan (TTM). Pohon teh yang termasuk TBM adalah umur 0-2,9 tahun, yang termasuk TM antara umur 3-20 tahun, serta lebih dari 20 tahun termasuk TTM.

"Pohon teh memiliki umur ekonomis antara 3-20 tahun."

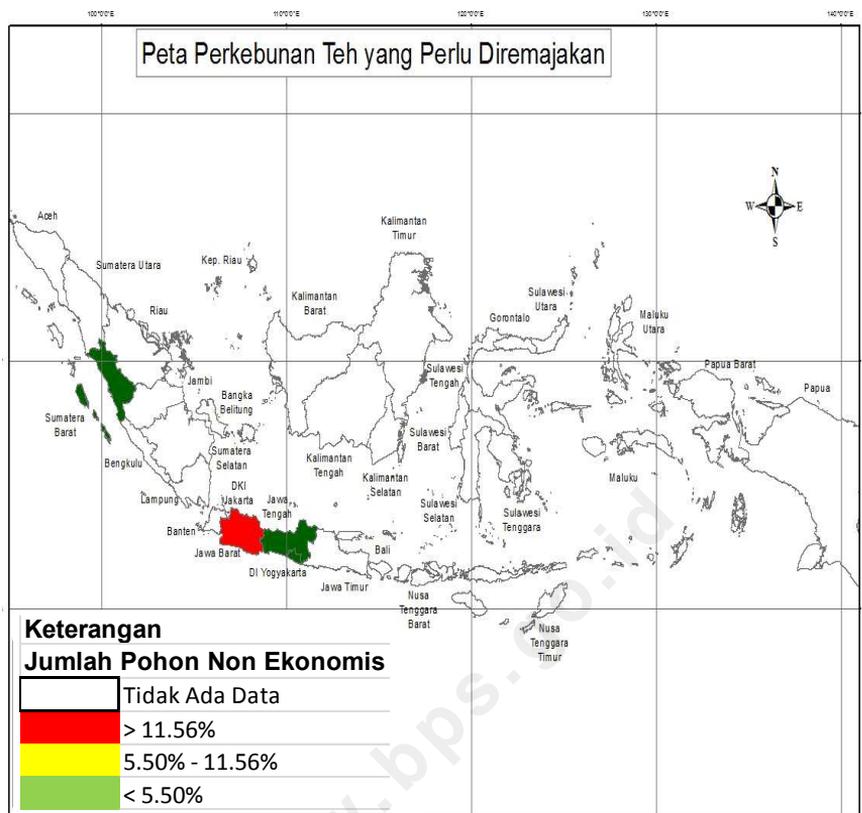
Tabel 6.22.

Jumlah Pohon Teh Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Indonesia, Tahun 2014

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumbar	147.180,00	1.300.000,00	-
Jabar	828.700,00	18.531.965,00	370.810,00
Jateng	239.251,00	3.141.297,00	21.300,00
DIY	11.575,00	80.650,00	-
Total	1.226.706,00	23.053.912,00	392.110,00

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Kondisi tanaman teh di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak pohon yang berumur 3-20 tahun (masih menghasilkan). Akan tetapi, untuk tanaman teh yang ada di Provinsi Jawa Barat memerlukan peremajaan segera. Hal ini karena Jawa Barat merupakan sentra produksi teh di Indonesia. Untuk dapat meningkatkan produktivitasnya maka perlu diremajakan.



Gambar 6. 6.

Peta Keperluan Peremajaan Komoditi Teh Tahun 2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Areal perkebunan teh Indonesia terus mengalami penurunan selama dasawarsa terakhir, rata-rata sebesar 3000 hektar per tahun, yang diduga karena usaha perkebunan teh mengalami kerugian. Konversi kepada tanaman sayur-sayuran dan peruntukan lainnya diperkirakan menjadi penyebab menurunnya luasan kebun teh tersebut. Menurunnya areal perkebunan teh juga dapat menimbulkan efek negatif kepada kelestarian lingkungan, yang dapat mengakibatkan banjir, kekeringan, dan longsor yang dapat mengancam jiwa, harta, dan kehidupan masyarakat sekitar pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Hal ini disebabkan karena pohon teh bermanfaat untuk kelestarian lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Teh Indonesia (DTI) mencanangkan program penanaman kembali perkebunan teh rakyat sebagai satu kesatuan dalam gerakan penyelamatan agribisnis teh nasional (GPATN). Sesuai kondisi kebun rakyat yang ada, program penanaman kembali kebun teh rakyat dilaksanakan dalam tiga macam, yaitu :

1. Peremajaan (*replanting*) : penanaman kembali kebun/lahan yang gundul dan membongkar tanaman teh tua yang tidak lagi produktif.

2. Rehabilitasi kebun : memperbaiki kondisi kebun yang tidak terawat melalui penyehatan tanaman, perbaikan perawatan, dan meningkatkan populasi tanaman dengan penyesipan.
3. Intensifikasi : memperbaiki produktivitas tanaman melalui peningkatan faktor-faktor input dan konsistensi pemeliharaan kebun sesuai dengan standar teknis yang baik.

Sasaran kegiatan peremajaan (*replanting*) dalam satu dasawarsa ke depan diperkirakan mencapai areal kebun teh rakyat, seluas sekitar 14.000 hektar yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kegiatan Rehabilitasi kebun teh rakyat diperkirakan mencapai 20.000 hektar, dan kegiatan intensifikasi mencapai sekitar 23.000 hektar. Adapun rencana, implementasi program *replanting* adalah sebagai berikut:

1. Untuk kebun teh tua dan rusak berat dengan populasi di bawah 50 persen akan dilakukan peremajaan dengan bibit dari klon-klon unggul.
2. Kebun teh dengan populasi tanaman antara 60–90 persen akan dilakukan rehabilitasi dengan teknologi *infilling* atau *compacting*.
3. Kebun teh dengan populasi di atas 90 persen yang kurang terpelihara akan dilakukan intensifikasi.
4. Bahan tanaman klon unggul teh dan alat pertanian kecil akan disediakan oleh pemerintah.
5. Untuk petani yang kebun tehnya diremajakan diberikan kompensasi berupa insentif benih jagung, BLT dan Raskin.
6. Biaya tenaga kerja untuk pelaksanaan di kebun petani menjadi tanggung jawab petani, kecuali biaya pembongkaran dan biaya penanaman disediakan oleh pemerintah yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

Beberapa kriteria yang diperlukan dalam penilaian kelayakan suatu proyek adalah *net present value* (NPV). *Internal Rate of Return* (IRR). *Net B/C Ratio* dan untuk penilaian pengembalian investasi ditunjukkan oleh kriteria *payback periode* atau masa pengembalian investasi (MPI). Salah satu perhitungan analisis kelayakan finansial tanaman teh dapat terlihat pada kasus peremajaan (*replanting*). Peremajaan ini dilakukan apabila areal tanam tersebut telah mencapai satu siklus penanaman atau karena pertimbangan tertentu maka suatu areal tanaman tersebut perlu diganti dengan tanaman

baru yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman. Salah satu perusahaan teh yang melakukan sistem peremajaan pada perkebunan teh adalah PTP Nusantara VII, Perkebunan Tambaksari, Kabupaten Subang Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis kelayakan finansial dengan tingkat suku bunga 18 persen diperoleh hasil bahwa nilai IRR sebesar 19,09 persen dan payback period selama 26 tahun 1 bulan.

Pemilihan tingkat suku bunga sebesar 18 persen didasarkan pada saat tingkat suku bunga kredit dari bank swasta nasional pada saat tahun peremajaan. IRR sebesar 19,09 persen menunjukkan bahwa investasi layak untuk dilaksanakan karena IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku. Berdasarkan nilai kriteria investasi yang diperoleh maka dengan tingkat suku bungan 18 persen peremajaan tanaman teh pada perkebunan Tambaksari layak untuk dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai NPV yang positif, nilai *Net B/C Ratio* yang lebih besar dari satu dan IRR yang lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku.

6.7. Analisis Peremajaan Usahatani Kelapa

Pohon kelapa memiliki umur ekonomis antara 3-20 tahun dan setelah itu pohon kelapa menjadi tidak ekonomis lagi karena produksinya sudah menurun. Secara lebih detail, jenis pohon kelapa berdasarkan umur dapat dibagi menjadi tanaman belum menghasilkan (TBM), tanaman menghasilkan (TM), dan tanaman tidak menghasilkan (TTM). Pohon kelapa yang termasuk TBM adalah umur 0-3,9 tahun, yang termasuk TM antara umur 4-25 tahun, serta lebih dari 25 tahun termasuk TTM.

"Pohon kelapa memiliki umur ekonomis antara 3-20 tahun."

Tabel 6.23.

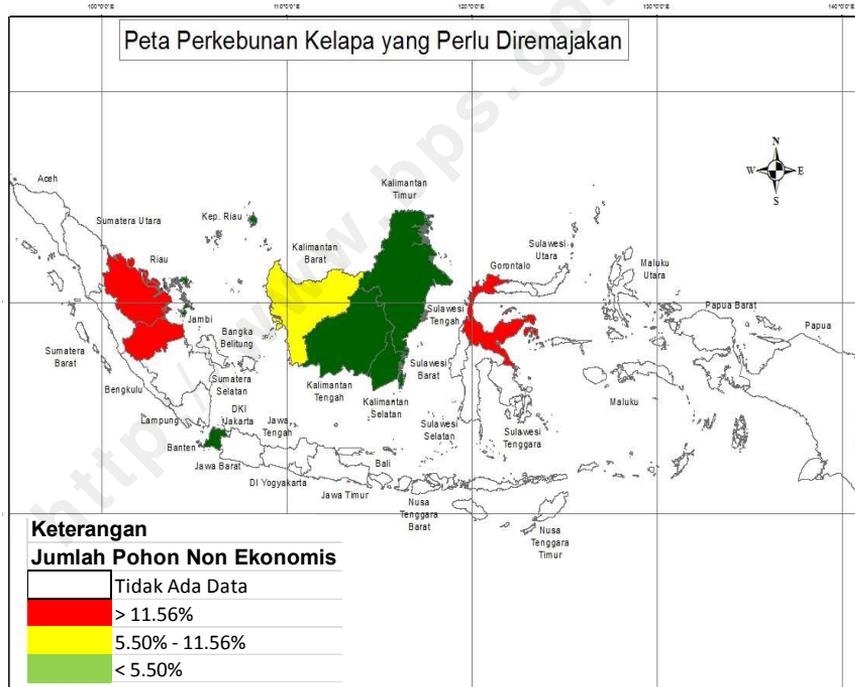
Jumlah Pohon Kelapa Berdasarkan Umur Ekonomi dan Non Ekonomis di Indonesia, Tahun 2014

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Riau	19.789,00	245.942,00	107.794,00
Jambi	5.990,00	98.384,00	81.193,00
Kepri	145,00	11.881,00	7.690,00
Banten	482,00	4.891,00	235,00
Kalbar	3.549,00	44.570,00	18.126,00
Kalteng	-	4,00	-
Kalsel	-	27,00	20,00
Kaltim	-	805,00	-
Sulteng	4.538,00	56.381,00	72.608,00
Total	34.493,00	462.885,00	287.666,00

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Sebagai negara tropis yang sangat luas, Indonesia adalah surga bagi pohon kelapa. Pohon ini dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia dari pulau Sumatera hingga Papua. Namun, pengembangan kelapa dirasakan belum optimal hingga saat ini. Masih banyak pohon kelapa yang tidak menghasilkan di Indonesia. Jumlah pohon yang tidak menghasilkan ini lebih banyak dibandingkan dengan pohon kelapa yang masih muda.

Perkebunan kelapa selama ini berkembang sebagai perkebunan rakyat karena sebagian besar dari lahan kelapa yang ada di tanah air yakni 98 persen adalah perkebunan rakyat. Perkebunan kelapa rakyat umumnya kondisinya sama yakni luas lahan yang sempit, dan pemeliharaan seadanya atau tidak sama sekali, tidak berada pada skala komersial dan dikelola secara tradisional.



Gambar 6.7.
Peta Keperluan Peremajaan Komoditi Kelapa Tahun 2014

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Sebagian besar produksi kelapa di Indonesia yakni sekitar 65 persen dipakai untuk memenuhi kebutuhan domestik, sisanya diekspor dalam bentuk kelapa butir dan olahan. Pengolahan hasil produksi kelapa juga masih berupa produk dasar seperti kopra; yang memiliki nilai tambah rendah.

Meskipun Indonesia memiliki perkebunan kelapa terbesar di dunia, namun dari sisi produksi kondisi tersebut belum terefleksikan. Perkebunan rakyat umumnya masih dikelola secara tradisional dengan kepemilikan lahan yang terbatas dan penerapan teknologi pertanian yang belum utuh. Hal ini membuat produktivitas tanaman ini masih tergolong rendah. Tanaman kelapa tidak sepenuhnya dalam kondisi produktif karena masih banyak yang merupakan tanaman tua dan tidak produktif. Upaya peremajaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan luas total perkebunan kelapa.

Tabel 6. 24.
Persentase
Jumlah
Pohon Kelapa
Berdasarkan
Umur Ekonomi
dan Non
Ekonomis di
Indonesia
Tahun 2014

Provinsi	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	Tanaman Menghasilkan (TM)	Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Riau	57,37	53,13	37,47
Jambi	17,37	21,25	28,22
Kepri	0,42	2,57	2,67
Banten	1,40	1,06	0,08
Kalbar	10,29	9,63	6,30
Kalteng	-	-	0,00
Kalsel	-	0,01	0,01
Kaltim	-	0,17	-
Sulteng	13,16	12,18	25,24
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur (2009) dapat diketahui *payback period* terjadi pada tahun ke-9 lebih 1 bulan. Sebagaimana diketahui bahwa *payback period* diartikan sebagai jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek. Kondisi ini merupakan satu contoh studi kasus mengenai investasi yang dilakukan pada usahatani kelapa yang masih layak dan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Pemerintah dari Provinsi Kalimantan Timur juga terus menggalakkan usaha-usaha untuk meningkatkan produksi kelapa dalam nasional. Baik melalui peremajaan kelapa dalam yang telah tua atau perluasan perkebunan kelapa di provinsi tersebut.

7

Ringkasan dan Sintesis Hasil Penelitian

<http://www.bps.go.id>

BAB 7

Ringkasan dan Sintesis Hasil Penelitian

“Peta daya saing dan peremajaan tanaman perkebunan di provinsi sentra produksi diperlukan untuk pengambilan kebijakan.”



7.1. Ringkasan

Surplus devisa sektor pertanian terutama disumbangkan oleh komoditi perkebunan, sehingga hal ini perlu untuk tetap dipertahankan agar komoditas perkebunan Indonesia berdaya saing baik secara finansial maupun ekonomi di pasar ekspor. Dengan kata lain, komoditas perkebunan Indonesia harus memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif di pasar internasional. Namun di sisi lain, produktivitas tanaman perkebunan Indonesia relatif masih rendah dibandingkan produktivitas dari negara produsen lainnya. Hal ini dikarenakan tanaman perkebunan di Indonesia banyak yang sudah melewati umur ekonomisnya, sehingga perlu peremajaan. Untuk itu diperlukan peta daya saing dan peremajaan tanaman perkebunan di setiap provinsi yang menjadi sentra produksi.

Analisis daya saing komoditi perkebunan baik secara finansial maupun ekonomi dilakukan dengan metode *Policy Analysis Matrix* (PAM). Komoditi perkebunan yang dianalisis adalah: kelapa, cengkeh, kelapa sawit, karet, kakao, teh, dan kopi. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data Survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan (SKB) 2014. Sedangkan untuk memetakan tanaman perkebunan yang perlu diremajakan dilakukan secara deskriptif. Tanaman perkebunan yang perlu diremajakan adalah tanaman yang sudah melewati umur ekonomisnya atau manfaat yang dihasilkan dari tanaman tersebut lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain, dalam penelitian ini didekati dengan tanaman yang tidak menghasilkan (TTM).

Berdasarkan perhitungan dengan metode PAM, dari tujuh komoditi perkebunan yang diteliti ada dua komoditi yang relatif sedikit memiliki daya saing terutama secara ekonomi yaitu kopi dan kakao. Dengan kata lain, komoditas kopi dan kakao lebih memiliki keunggulan secara finansial atau memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan keunggulan komparatifnya. Dari 26 sentra produksi kopi yang dianalisis dalam penelitian ini, hanya 5 provinsi yang memiliki daya saing secara ekonomi ($DRC < 1$) atau memiliki keunggulan komparatif yaitu Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Papua, dan Aceh. Namun demikian nilai DRC dari kelima wilayah tersebut lebih besar dari 0,6 ($DRC > 0,6$), yang berarti daya saing ekonominya relatif kurang, atau keunggulan komparatifnya lemah, sehingga dikhawatirkan apabila terjadi perubahan sedikit saja dalam komponen biaya (meningkatkan biaya) dan komponen output seperti menurunnya produktivitas atau turunnya harga, dikhawatirkan akan mengakibatkan tidak berdaya saingnya komoditas kopi secara ekonomi.

Demikian halnya juga dengan komoditas kakao, dari 29 provinsi penghasil kakao, hanya 14 yang memiliki keunggulan komparatif ($DRC < 1$) dengan kisaran DRC sekitar 0,22-0,95. Provinsi Kalimantan Barat, Bali, Banten, dan Riau menunjukkan keunggulan komparatif yang relatif lebih baik dalam komoditas kakao. Sementara komoditas perkebunan yang relatif memiliki keunggulan baik komparatif maupun kompetitif yang baik/kuat yang dicirikan dengan nilai DRC maupun PCR yang lebih kecil (mendekati 0) adalah komoditas teh, kelapa sawit, kelapa, dan cengkeh, serta karet.

Hasil analisis dampak kebijakan terhadap input (NPCI) maupun output (NPCO) menunjukkan bahwa pada komoditas karet, kelapa sawit, teh, dan kelapa, baik NPCI maupun NPCO secara umum bernilai kurang dari 1. Artinya, kebijakan bersifat protektif terhadap input atau ada kebijakan subsidi terhadap input *tradable*. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah terhadap input mampu meningkatkan daya saing komoditas tersebut. Namun tidak demikian halnya dengan kebijakan terhadap output bersifat disinsentif bagi produsen/petani, yang mengindikasikan bahwa kebijakan terkait output seperti harga output, kebijakan ekspor atau lainnya belum mampu meningkatkan daya saing. Kondisi ini agak berbeda pada komoditas kopi dan kakao yang secara umum menunjukkan nilai NPCOnya lebih besar dari satu. Artinya, pada komoditas kakao dan kopi, kebijakan bersifat proteksi terhadap output sehingga memberikan insentif kepada produsen untuk meningkatkan output. Dengan kata lain kebijakan atau intervensi pemerintah terkait output komoditas kopi dan kakao mampu meningkatkan daya saingnya di pasar internasional.

Dari hasil analisis *switching value* menunjukkan bahwa wilayah yang berada Pulau Sumatera, dan Aceh merupakan provinsi yang relatif sensitif terhadap penurunan harga output, kenaikan harga input, dan apresiasi nilai tukar. Wilayah Bali relatif lebih sensitif terhadap kenaikan harga output, penurunan harga input,

dan depresiasi nilai tukar, dan wilayah Jawa Timur relatif lebih sensitif terhadap kenaikan produktivitas. Provinsi yang relatif lebih sensitif terhadap perubahan keempat variabel dalam *switching value* adalah Sulawesi Selatan.

Provinsi yang memiliki daya saing secara ekonomi untuk komoditi kakao sebanyak 11 provinsi dari total 25 provinsi yang dianalisis. Untuk analisis *switching value*. Aceh relatif lebih sensitif terhadap perubahan harga output dan produktivitas, sementara Sumatera Selatan dan Bengkulu relatif lebih sensitif terhadap perubahan harga input dan nilai tukar. Sementara itu di Pulau Jawa, Jawa Tengah relatif lebih sensitif terhadap perubahan keempat variabel. Sulawesi Barat yang termasuk kedalam Pulau Sulawesi relatif lebih sensitif terhadap penurunan harga output dan produktivitas.

Daerah produksi teh yang dianalisis yaitu Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, menunjukkan bahwa komoditas teh dari keempat provinsi tersebut memiliki daya saing ekonomi. Berdasarkan analisis *switching value*, Provinsi DI Yogyakarta sensitif terhadap penurunan harga output dan produktivitas, kenaikan harga input dan apresiasi nilai tukar.

Daya saing komoditi cengkeh di 13 provinsi yang dianalisis menunjukkan nilai DRC kurang dari satu, yang artinya komoditas cengkeh berdaya saing secara ekonomi (memiliki keunggulan komparatif). Provinsi yang berdaya saing tersebut adalah Aceh, Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Analisis *switching value* menunjukkan dari 13 provinsi, Sulawesi Barat relatif paling sensitif terhadap penurunan harga output dan produktivitas, kenaikan harga input, dan apresiasi nilai tukar.

Komoditi kelapa berdayasaing di Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Sebanyak Sembilan provinsi yang dianalisis, Kalimantan Timur merupakan provinsi, yang paling sensitif terhadap penurunan harga output dan produktivitas, kenaikan harga input, dan apresiasi nilai tukar.

Analisis daya saing untuk komoditi karet dan kelapa sawit menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah yang tidak memiliki daya saing secara ekonomi. Berdasarkan analisis *switching value* untuk karet, Provinsi Jambi adalah yang paling sensitif terhadap harga output, produktivitas, dan nilai tukar, sedangkan Bengkulu sensitif terhadap harga input di Pulau Sumatera. Komoditi karet di Pulau Jawa sensitif untuk perubahan harga output, produktivitas, dan nilai tukar pada Provinsi Jawa Barat. Harga output paling sensitif pada Provinsi Sulawesi Selatan. Kalimantan

Timur merupakan provinsi yang paling sensitif terhadap perubahan harga input, perubahan produktivitas dan nilai tukar sensitif pada provinsi Kalimantan Barat untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Analisis *switching value* untuk komoditi kelapa sawit menghasilkan Riau sebagai provinsi yang paling sensitif terhadap penurunan harga output dan produktivitas, kenaikan harga input, dan apresiasi nilai tukar di Pulau Sumatera, sementara untuk Pulau Jawa adalah Banten. Provinsi Kalimantan Timur sensitif terhadap penurunan harga output, kenaikan harga input, penurunan produktivitas dan apresiasi nilai tukar sensitif mempengaruhi daya saing kelapa sawit di Kalimantan Tengah.

Hasil analisis peremajaan menunjukkan bahwa berdasarkan provinsi yang menjadi sentra produksi, hampir semua tanaman perkebunan yang dianalisis perlu diremajakan walaupun dengan prosentase yang berbeda. Untuk tanaman karet misalnya, yang perlu diremajakan sebanyak 14,61 persen di Sumatera Utara, 15,34 persen di Kalimantan Barat, dan sebanyak 15,78 persen di Kalimantan Tengah. Untuk tanaman kopi, provinsi yang paling banyak memerlukan peremajaan adalah Provinsi Sumatera Selatan (28,65%), Lampung dan Bengkulu masing-masing sebesar 24,54 persen dan 13,50 persen. Untuk komoditi kelapa sawit, wilayah yang perlu segera diremajakan adalah di Provinsi Riau (23,16%), Papua Barat (15,87%), Banten (12%), dan Kalimantan Barat sebesar 10,12 persen. Sementara untuk kakao, hampir semua provinsi sentra produksi di Sulawesi memerlukan peremajaan, yaitu Sulawesi Tenggara (24,40%), Sulawesi Selatan (21,42%), Sulawesi Barat (19%), dan Sulawesi Tengah sebesar 10,66 persen.

Sementara untuk komoditas cengkeh. yang perlu diremajakan adalah di Sulawesi Utara (18,46%), Sulawesi Tengah (13,02%), Bali (16,20%), dan Jawa Timur sebesar 11,25 persen. Demikian halnya dengan komoditas teh terutama yang berada di wilayah Jawa Barat perlu segera diremajakan. Begitu pula halnya dengan kelapa di Provinsi Riau. Jatim, dan Sulawesi Tengah perlu dilakukan peremajaan mengingat tanaman yang tidak menghasilkan sudah cukup tinggi yaitu lebih besar dari 25 persen, Riau mencapai 37,47 persen, Jawa Timur mencapai 28,22 persen, dan Sulawesi Tengah mencapai 25,24 persen.

7.2. Sintesis Hasil Penelitian

Dari hasil PAM menunjukkan bahwa daya saing ketujuh produk perkebunan tersebut mempunyai daya saing yang berbeda-beda untuk masing-masing provinsi. Hal ini menunjukkan tiap daerah memiliki kekhasan yang berbeda untuk masing-masing komoditi baik dari sisi ekologis maupun dari sisi ekonomi dalam menunjang daya saing suatu komoditi tertentu. Pada daerah yang memiliki daya saing pada komoditi tertentu dapat melakukan spesialisasi pada komoditi tersebut dengan membuat program-program yang berkaitan dengan komoditi tersebut sehingga di masa yang akan datang daya saingnya akan semakin meningkat. Pada komoditi yang tidak memiliki daya saing, dapat dikaji kembali kenapa komoditi

"Peremajaan tanaman diperlukan untuk menghindari semakin menurunnya produktivitas tanaman."

tersebut tidak memiliki daya saing, apakah dari sisi ekologis maupun dari sisi ekonomi. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut maka dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan daya saing. Namun apabila hal tersebut tidak memungkinkan, di masa yang akan datang perlu dipikirkan perubahan komoditi tersebut menjadi komoditi yang lebih memiliki daya saing di propinsi tersebut.

Dari hasil analisis *switching value* terlihat bahwa di hampir semua komoditi dan propinsi relatif lebih sensitif terhadap perubahan harga output, produktivitas dan perubahan nilai tukar. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan program-program terutama di tingkat petani yang dapat melindungi apabila terjadi perubahan-perubahan tersebut terutama terkait dengan penurunan harga output dan penurunan produktivitas. Salah satu program yang dapat dilaksanakan adalah dengan pembentukan kelompok sehingga petani dapat meningkatkan *bargaining power* dalam berhadapan dengan pembeli atau pedagang. Program lainnya adalah upaya peningkatan produktivitas seperti dengan penggunaan bibit unggul dan teknik usahatani yang efisien, dan juga bisa melalui produk yaitu dengan membuat produk yang dihasilkan adalah produk premium. Produk premium ini akan mendapatkan pasar yang spesifik (*niche market*) sehingga permintaannya menjadi inelastis. Permintaan yang inelastis menyebabkan peningkatan harga jual tidak akan terlalu berpengaruh terhadap permintaan akan komoditi tersebut. Produk premium ini memerlukan saluran pemasaran yang khusus sehingga tidak tercampur dengan produk lainnya, apabila tercampur terdapat kecenderungan harga yang diterima akan sama dengan produk yang biasa. Produk premium ini dapat juga dilakukan dengan penanaman varietas yang spesifik, perlakuan yang spesifik (i.e organik), pengolahan, sertifikasi atau lainnya.

Ketujuh komoditi ini adalah produk ekspor sehingga harganya umumnya akan mengikuti fluktuasi harga internasional. Namun seringkali transmisi harga dari harga internasional dilakukan secara tidak sempurna terutama pada saat kenaikan harga. Hal ini dapat diatasi dengan membuat pasar yang transparan terutama dengan informasi harga yang terbuka, sehingga petani dapat menentukan kepada siapa akan menjual produknya dan mendapatkan insentif untuk menjual produk dengan kualitas yang baik karena akan meningkatkan harga.

Peremajaan tanaman diperlukan untuk menghindari semakin menurunnya produktivitas tanaman akibat tanaman yang sudah menua yang mana apabila terus dibiarkan akan semakin memperbesar biaya sementara manfaatnya semakin menurun. Namun demikian kegiatan peremajaan ini bukanlah sesuatu yang murah dan mudah untuk dilaksanakan. Kegiatan peremajaan membutuhkan biaya yang sangat besar baik secara

langsung maupun tidak langsung yang berupa pendapatan yang hilang ketika dilakukan peremajaan, sehingga perlu dibuat program-program pembiayaan yang dapat mengatasi kedua masalah tersebut. Oleh karena itu keputusan melakukan peremajaan ini memerlukan dasar pemikiran yang serius dan logis dari sisi manfaat dan biayanya, terlebih lagi bagi petani perkebunan rakyat yang umumnya memiliki keterbatasan dalam hal permodalan. Apabila manfaat yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikelurkannya, tentunya kegiatan peremajaan tersebut harusnya dilakukan. Oleh karena itu dukungan dan kerjasama dari pemerintah dan *stakeholders* terkait sangat diperlukan. Peremajaan juga dapat dikaitkan dengan pemetaan daya saing komoditi. Pada komoditi yang tidak mempunyai daya saing dapat digantikan dengan komoditi yang memiliki daya saing setelah dilihat kesesuaian secara ekologis.

<http://www.bps.go.id>

8

Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

BAB 8

Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

"Tanaman perkebunan yang sudah memerlukan peremajaan mencapai lebih dari 20 persen."



8.1. Kesimpulan

1. Secara umum komoditas karet, kelapa sawit, teh, cengkeh, dan kelapa memiliki daya saing baik secara finansial maupun ekonomi. Dengan kata lain, kelima komoditas tersebut memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif (DRC dan $PCR < 1$). Hal ini mengindikasikan bahwa dengan maupun tanpa kebijakan atau intervensi pemerintah secara umum usahatani karet, kelapa sawit, teh, cengkeh, dan kelapa masih layak dan menguntungkan jika diproduksi. Sementara untuk kopi dan kakao secara umum lebih berdayasaing secara finansial dibandingkan dengan ekonominya. Dengan kata lain kedua komoditi tersebut lebih memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan keunggulan komparatif. Artinya, usahatani kopi dan kakao layak dan menguntungkan untuk diusahakan jika ada dukungan kebijakan atau intervensi pemerintah.
2. Pada komoditas kopi dan kakao, kebijakan bersifat proteksi terhadap output maupun inputnya sehingga memberikan insentif kepada produsen. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah terhadap output maupun input mampu meningkatkan daya saing kopi dan kakao. Sementara untuk komoditas lainnya (karet, kelapa sawit, cengkeh, teh, dan kelapa) menunjukkan bahwa kebijakan bersifat protektif terhadap input atau ada kebijakan subsidi terhadap input *tradable*. Sementara kebijakan terhadap output bersifat disinsentif. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan

pemerintah terkait output untuk komoditas karet, kelapa sawit, teh, cengkeh, dan kelapa belum mampu mendorong peningkatan daya saing.

3. Daya saing kopi, kakao, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, karet, dan teh relatif lebih sensitif terhadap perubahan harga output, produktivitas, dan nilai tukar.
4. Perubahan nilai tukar mempengaruhi daya saing ekonomis komoditi perkebunan, meskipun bersifat *moderate*.
5. Di beberapa daerah, tanaman perkebunan yang sudah memerlukan peremajaan mencapai lebih dari 20 persen. Untuk perkebunan rakyat teh di Jawa Barat, 95 persen perlu peremajaan.

8.2. Implikasi Kebijakan

1. Komoditas karet, kelapa sawit, teh, cengkeh, dan kelapa secara umum memiliki daya saing finansial maupun ekonomi atau memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif, maka selain produktivitas sebagai faktor yang harus tetap dijaga bahkan ditingkatkan, kualitas dan kontinuitas merupakan faktor yang sangat penting sehingga bisa tetap bersaing di pasar internasional. Demikian halnya untuk komoditas kopi dan kakao, perlu dilakukan upaya peningkatan produktivitas seperti penggunaan bibit unggul, pemupukan yang tepat, serta pengendalian hama dan penyakit dan juga peningkatan kualitas dan kontinuitas, serta peningkatan nilai tambah.
2. Perlu evaluasi kebijakan pemerintah terkait output seperti harga untuk komoditas perkebunan karet, kelapa sawit, teh, cengkeh, dan kelapa, mengingat selama ini lebih bersifat disinsentif atau belum mampu meningkatkan daya saing bagi petani.
3. Dari hasil kajian ini daerah yang *urgens* dilakukan peremajaan perkebunan dapat dideteksi. Sebagai contoh karet di Kalimantan; kopi di Sumatera; kakao di Sulawesi; kelapa sawit di Riau, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Asrida. 2012. Kelayakan Finansial Investasi Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Aceh Utara Almuslim LENTERA : Vol.12. No.1. Maret 2012.
- Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah. 2009. Provinsi Kalimantan Timur. Prospek Menguntungkan: Investasi Budidaya Komoditi Kelapa
- Benhdard MR. 2005. Budidaya Peremajaan Tebang Bertahap pada Usahatani Polikultur Kelapa. *Perspektif*. 4(1): 10-19.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. *Angka Nasional Hasil Survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan 2014*. Jakarta : BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. <http://bps.go.id/>.
- , 2015. Sensus Pertanian 2013. <http://st2013.bps.go.id/dev2/index.php>
- Boerhendly I. Agustina DS. 2006. Potensi Pemanfaatan Kayu Karet untuk Mendukung Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat. *Jurnal Litbang Pertanian*. 25(2): 61-67.
- Boerhendly I. Amypalupy K. 2010. Optimalisasi Produktivitas Karet melalui Penggunaan Bahan Tanam. Pemeliharaan. Sistem Eksploitasi. dan Peremajaan Tanaman. *Jurnal Litbang Pertanian* No. 1 Vol. 30.
- Buku D Perkebunan Sensus Pertanian. 2013. Publikasi Badan Pusat Statistik.
- Dalfi. Hendro. Studi Kelayakan Bisnis Perkebunan Kakao.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2013a. Peningkatan Produksi. Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan: Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit. Kementerian Pertanian.

-----, 2013b. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar: Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi. Kementerian Pertanian.

[DITJENBUN] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2015. <http://ditjenbun.pertanian.go.id/>.

Ernah. 2010. Penentuan Saat Optimum Peremajaan Tanaman Kakao (*Theobroma Cacao L*) Perkebunan Panglejar bagian Rajamandala PTPN VIII Bandung Jawa Barat. Jatinangor:Universitas Padjajaran.

Gittinger JP. 1986. Analisa Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian. Jakarta: UI Press.
Gusmawati. Alimudin Laapo dan Dafina Howara. 2014. Analisis Kelayakan Finansial Usahatani Cengkeh di Desa Boukecamatan Sojol Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. *e-J. Agrotekbis* 2 (3) : 325-331. Juni 2014 ISSN : 2338-3011.

Ismail A. Mamat MN. 2002. The Optimal Age Of Oil Palm Replanting. *Oil Palm Industry Economic Journal* 2 :11-18.

Jenahar TJ. 2003. Analisis Peremajaan Optimum Karet (Studi Kasus di Kebun Musi Landas Sumatera Selatan).

Kadariah. Karlina. dan C.Graff. 1999. Pengantar Evaluasi Proyek. Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Kadariah. 1988. Evaluasi Proyek Analisis Ekonomi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Kementerian Pertanian. 2014a. Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015:Kakao. Jakarta: Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian. 2014b. Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015:Karet. Jakarta: Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian. 2014c. Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015:Kelapa Sawit. Jakarta: Kementerian Pertanian.

- Kementerian Pertanian. 2014d. Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015:Cengkeh. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. 2014e. Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015:Kopi. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Laksono A. D., Aji. J. M. M., Ridjal. J. A. 2014. Analisis Kelayakan pada Usahatani Kopi Rakyat di Kabupaten Jember. *Berkala Ilmiah Pertanian* 1(1): hlm 1-7. Juni 2014.
- Martin. L. Westgren dan van Duren.E. 1991. "Agribusiness competitiveness across national boundaries" dalam *American Journal of Agricultural Economics*. December. hlm 1456-1464.
- Marampa. Yohanis Pakalla Marampa. dan Maskan AF. 2014. Analisis Kelayakan Finansial Budidaya Tanaman Karet (*Hevea Brasiliensis*) Skala Rakyat Di Kampung Tering Seberang Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal AGRIFOR* Volume XIII Nomor 1. Maret.
- Monke. E.A and S. Pearson. 1995. *The Policy Analysis Matrix For Agricultural Development*. Cornell University Press. London.
- Muslim C. Nurasa T. 2011. Daya saing Komoditi Promosi Ekspor Manggis. Sistem Pemasaran dan Kemantapannya di Dalam Negeri (Studi Kasus di Kabupaten Purwakarta. Jawa Barat). *Jurnal Agro Ekonomi*. 29(1): 87-111.
- Nastalia. Risa Dwi. Yusmin. Suardi Tarumun. 2014. Analisis Kelayakan Finansial Usaha Perkebunan Karet Rakyat Swadaya Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Analyze Feasibility Financial Of Smallholder Rubber Plantations At Sungai Jalau Village North Kampar District Kampar Regency. *STRACT Jom Faperta*. Vol 1 No 2 Oktober.
- Rajino A.Y. 1984. *Pengkajian Biaya dan Manfaat Investasi Modal Untuk Peremajaan The Perkebunan*. Disertasi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta

- Rahmi PP. 2014. Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditi Teh (Studi Kasus : PTPN VIII Afdeling Rancabali III). [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Salvatore D. 1997. *Ekonomi Internasional*. Terjemahan. Edisi Ke-5. Prentice Hall-Erlangga. Jakarta.
- Sihotang R Aima MH Hamzah. 2009. Pengembangan Perkebunan Karet Rakyat Provinsi Jambi Melalui Peremajaan Tanaman. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi.
- Suprihatini. R.; Awalina. N. Rohdiana. D. Shabri. 2005. Kajian nilai tambah dan kelayakan investasi *Tablet Effervescent* Teh Hijau. *Jurnal Penelitian Teh dan Kina* ISSN 1410. Vol. 8. pp. 1-11.
- Sutarna TH. 2000. Analisis Finansial dan Ekonomi Peremajaan Tanaman Perkebunan Teh (Studi Kasus PTP Nusantara VIII Perkebunan Tambaksari Kabupaten Subang Jawa Barat) [Skripsi]. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Suharman Sukardi Honggokusumo Soeharto dan Suryani Ani. 2013. *Analisis Potensi Pengembangan Industri Barang Jadi Karet di Sumatera Selatan*. *Jurnal Riset Industri* Vol.7 No.2 D.
- Tarigan R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Regional*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Pearson S Gotsch C Bahri S. 2005. Aplikasi *Policy Analysis Matrix* pada Pertanian Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



<http://www.bps.go.id>

Catatan Teknis

<http://www.bps.go.id>

CT

Catatan Teknis

"Konsep dan definisi yang jelas sangat diperlukan untuk memahami cakupan kajian ini."



Konsep Definisi yang Digunakan dalam Survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan (SKB-2014)

SKB dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali DKI Jakarta. Cakupan ST2013 SKB meliputi 4 komoditas nasional (kakao, karet, kelapa sawit, dan kopi) dan 2 dari 10 komoditas unggulan provinsi (aren/enau, cengkeh, jambu mete, kelapa, lada, pala, sagu, teh, tebu, dan tembakau).

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan dan mengurus keperluannya sendiri.

Usaha adalah kegiatan yang menghasilkan barang/jasa dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atau menunjang kehidupan dan menanggung risiko.

Usaha tanaman perkebunan adalah kegiatan yang menghasilkan produk tanaman perkebunan baik tanaman perkebunan tahunan maupun semusim dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas risiko usaha.

Tanaman semusim adalah tanaman berumur pendek yang pada umumnya berumur kurang dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan sekali panen langsung dibongkar. Pada kegiatan SKB ini tanaman perkebunan semusim tidak dianalisis.

Tanaman tahunan adalah tanaman yang berumur lebih dari satu tahun, pada umumnya pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar dalam sekali panen. Pada kegiatan SKB ini tanaman perkebunan tahunan yang dicakup meliputi kakao, karet, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, dan teh.

Tanaman belum menghasilkan (TBM), adalah tanaman yang sampai dengan pada saat pencacahan belum pernah memberikan hasil karena masih muda atau belum cukup umur untuk berproduksi. Tanaman yang sudah cukup umur tetapi belum pernah menghasilkan karena tidak cocok dengan iklim, ketinggian tempat, kondisi tanah, dan sebagainya dianggap sebagai tanaman belum menghasilkan.

Tanaman menghasilkan (TM), adalah tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan walaupun saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.

Tanaman tidak menghasilkan/tua/rusak (TTM), yaitu tanaman yang sudah tua, rusak dan tidak memberikan hasil lagi.

Dipanen sendiri adalah pemanenan dilakukan sendiri oleh petani/pekebun, baik menggunakan tenaga kerja dibayar, maupun menggunakan tenaga kerja tidak dibayar.

Luas panen adalah luas tanaman perkebunan terpilih yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.

Hasil ikutan, adalah produksi lain yang menyertai produksi primer/utama dalam suatu proses teknologi tunggal dan mempunyai nilai ekonomis.

Nilai produksi adalah nilai dari komoditas yang dihasilkan oleh sektor produksi, biasanya merupakan hasil perkalian dari kuantitas produksi dengan harga per unit komoditas tersebut. Harga per unit dinyatakan pada harga produsen pada saat komoditas tersebut diproduksi.

Tanaman tunggal adalah suatu pola tanam satu jenis tanaman yang ditanam dalam satu bidang lahan pada periode/musim tanam. Tanaman tahunan yang ditanam bersamaan dengan tanaman pelindung maka dianggap sebagai tanaman tunggal.

Tanaman tumpang sari/sela adalah suatu penanaman pada sebidang lahan, dimana lebih dari satu jenis tanaman ditanam dan tumbuh bersama dengan jarak tanam dan larikan yang teratur.

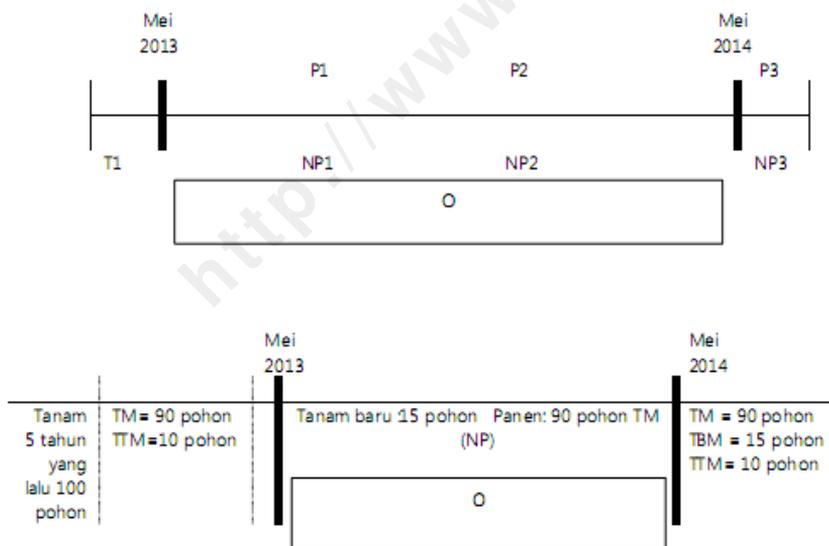
Tumpang sari ada dua macam yaitu :

1. Tumpang sari yang umurnya sama dimana menanam dan memanen bisa dilakukan bersamaan.
2. Tumpang sari yang umurnya berbeda disebut tanaman sela yaitu tanaman semusim yang ditanam diantara tanaman tahunan, seperti padi gogo dengan karet.

Tanaman Campuran adalah suatu penanaman pada sebidang lahan, dimana terdapat lebih dari satu tanaman dan tumbuh bersama tanpa jarak tanam dan larikan yang teratur (tercampur secara acak).

Skema Penghitungan Produksi, Nilai Produksi dan Ongkos/Biaya Produksi Usaha Perkebunan Terpilih Selama Setahun yang Lalu

A. Tanaman Tahunan



Keterangan:

TM = Tanaman Menghasilkan

TBM = Tanaman Belum Menghasilkan

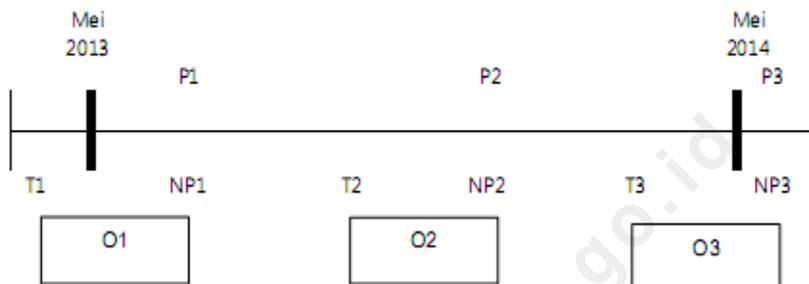
TTM = Tanaman Tidak Menghasilkan/rusak/tidak produktif lagi

Produksi setahun yang lalu = produksi panen (90 pohon TM)

Nilai produksi setahun yang lalu = nilai produksi dari tanaman yang dipanen (NP)

Ongkos/Biaya produksi setahun yang lalu = Ongkos/biaya produksi yang dikeluarkan (O)

B. Tanaman Semusim



Keterangan:

- T = Tanam,
- P = Produksi Panen,
- NP = Nilai Produksi Panen,
- O = Ongkos/Biaya Produksi
- Produksi setahun yang lalu = produksi panen (P1 + P2)
- Nilai produksi setahun yang lalu = Nilai produksi dari tanaman yang dipanen (NP1 + NP2)
- Ongkos/Biaya produksi setahun yang lalu = Ongkos/biaya produksi yang dikeluarkan (O1 + O2)

Pekerja Tetap adalah pekerja yang menerima upah/gaji secara tetap baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan dan biasanya apabila diberhentikan akan mendapat pesangon.

Pekerja Tidak Tetap adalah pekerja yang menerima upah/gaji berdasarkan pada banyaknya waktu kerja dan volume pekerjaan yang dikerjakan.

Pekerja dibayar adalah mereka yang bekerja pada suatu kegiatan dengan mendapat upah/gaji baik berupa uang maupun barang/makanan/minuman.

Pekerja tidak dibayar adalah mereka yang bekerja dengan tidak mendapat upah/gaji baik berupa uang maupun barang.

Termasuk pekerja tidak dibayar adalah:

- a. Petani yang ikut mengerjakan/terlibat dalam mengelola kegiatan pertaniannya.
- b. Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, misalnya istri dan anak.
- c. Bukan sebagai anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, misalnya keponakan, mertua yang tidak dibayar.
- d. Bukan sebagai anggota rumah tangga dan bukan keluarga orang yang dibantunya, misalnya pembantu RT yang tidak dibayar.

Upah pekerja atau upah buruh/karyawan adalah semua upah yang seharusnya dibayarkan baik berupa uang maupun barang/makanan/minuman untuk pekerja yang dibayar. Upah berupa barang/makanan/minuman dinilai berdasarkan harga pembelian atau harga setempat yang berlaku pada saat digunakan. Termasuk disini upah/gaji dari anggota rumah tangga yang bersangkutan bila anggota rumah tangga tersebut dibayar. Untuk pekerja tidak dibayar maka nilai upahnya harus diperkirakan sesuai nilai upah yang berlaku di daerah tersebut.

Bila petani/pekebun mengerjakan sendiri (hanya dibantu anggota rumah tangga yang bersangkutan) dalam mengelola kegiatan perkebunannya, isian upah pekerja, tetap diisi diperkirakan sesuai dengan upah setempat.

Sewa lahan adalah biaya yang dibayarkan untuk penggunaan lahan pertanian dalam waktu tertentu dari pihak lain, dimana besarnya sewa lahan sudah ditetapkan terlebih dahulu. Pembayaran sewa dapat berupa uang atau barang.

Perkiraan sewa lahan bebas sewa adalah nilai perkiraan sewa dari lahan milik orang/pihak lain yang digunakan tanpa membayar biaya sewa.

Perkiraan sewa lahan milik sendiri adalah perkiraan nilai sewa oleh petani yang menggarap lahan milik sendiri.

Sewa alat/sarana usaha, adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyewa alat-alat/sarana usaha mulai dari pengolahan lahan, penanaman sampai dengan pemanenan dan pengangkutan hasil. Sewa alat misalnya: traktor/hand traktor, penyemprot hama, bajak, dan sebagainya.

Perkiraan sewa alat/sarana usaha bebas sewa adalah nilai perkiraan sewa dari alat/sarana usaha milik orang/pihak lain yang digunakan tanpa membayar biaya sewa.

Perkiraan sewa alat/sarana usaha milik sendiri, adalah nilai perkiraan sewa oleh petani yang mempunyai alat/usaha milik sendiri.

Bunga kredit/pinjaman untuk usaha adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan yang biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari uang yang dipinjam dari pihak lain, baik perorangan maupun badan (Bank, Koperasi, dan lainnya).

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada konsumen melalui produsen terhadap pembelian barang/jasa. Pajak yang dimaksud adalah pajak yang berkaitan dengan usaha komoditas perkebunan terpilih, misalnya PBB lahan usaha perkebunan dan pajak atas kendaraan yang digunakan untuk usaha komoditas perkebunan terpilih.

<http://www.bps.go.id>



Lampiran

<http://www.bps.go.id>

Lampiran

Lampiran 1. Rata-rata Nilai Produksi dan Pengeluaran Per Hektar dari usaha Perkebunan Tanaman Teh

Rincian	Nilai (000Rp)	Persentase Biaya Terhadap Produksi	Persentase Biaya Terhadap Jumlah Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Produksi	21.369,30	100,00	
Jumlah pengeluaran	14.764,45	69,07	100,00
1. Bibit	448,38	2,10	3,04
2. Tanaman pelindung	216,38	1,01	1,47
3. Pupuk	1.618,02	7,56	10,95
A. Urea	928,17	4,34	6,29
B. TSP/SP36	257,28	1,20	1,74
C. Za	21,16	0,10	0,14
D. KCl	192,75	0,90	1,30
E. NPK	73,16	0,34	0,50
F. Pupuk organik (kandang/kompos)	122,87	0,57	0,83
G. Lainnya	22,63	0,11	0,15
4. Stimulan	12,67	0,05	0,09
A. Stimulan/zat pengatur tumbuh padat	1,04	0,00	0,01
B. Stimulan/zat pengatur tumbuh cair	11,63	0,05	0,08
5. Pestisida	207,17	0,97	1,41
A. Pestisida padat	25,93	0,12	0,18
B. Pestisida cair	181,24	0,85	1,23

Lanjutan

Rincian	Nilai (000Rp)	Persentase Biaya Terhadap Produksi	Persentase Biaya Terhadap Jumlah Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
6. Pekerja	8.351,86	39,08	56,56
A. Pengolahan lahan	288,97	1,35	1,96
B. Penanaman pohon pelindung	14,59	0,07	0,10
C. Penanaman tanaman perkebunan	103,09	0,48	0,70
D. Pemeliharaan (pemangkasan, penyiangan, dll)	1.814,94	8,49	12,29
E. Pemupukan	499,69	2,34	3,38
F. Pengendalian hama/opt	162,18	0,76	1,10
G. Pemanenan	5.435,55	25,44	36,81
H. Pengeringan/penjemuran	32,85	0,15	0,22
7. Pengeluaran lain	3.909,97	18,30	26,48
A. Sewa lahan	20,95	0,10	0,14
B. Perkiraan sewa lahan bebas sewa/milik sendiri	2.349,39	10,99	15,91
C. Sewa alat/sarana usaha	1,10	0,01	0,01
D. Perkiraan sewa alat/sarana bebas sewa/milik sendiri	112,14	0,52	0,76
E. Bunga kredit/pinjaman	45,03	0,21	0,30
F. Pajak tidak langsung (pbb lahan untuk perkebunan (milik sendiri), dll)	124,84	0,58	0,85
G. Retribusi/pungutan/iuran (pengairan, dll)	57,07	0,27	0,39
H. Penyusutan barang modal	55,31	0,26	0,37
I. Bahan bakar minyak (bbm)	29,42	0,14	0,20
J. Biaya transportasi/pengangkutan hasil	854,29	4,00	5,79
K. Jasa pertanian	193,98	0,91	1,31
L. Lainnya (wadah, dll)	66,45	0,31	0,45

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 2. Rata-rata Nilai Produksi dan Pengeluaran Per Hektar dari usaha Perkebunan Tanaman Kopi

Rincian	Nilai (000Rp)	Persentase Biaya Terhadap Produksi	Persentase Biaya Terhadap Jumlah Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Produksi	11.033,03	100,00	
Jumlah pengeluaran	7.599,97	68,88	100,00
1. Bibit	114,79	1,04	1,51
2. Tanaman pelindung	72,54	0,66	0,96
3. Pupuk	662,00	6,00	8,71
A. Urea	243,28	2,21	3,20
B. TSP/SP36	62,63	0,57	0,82
C. Za	52,23	0,47	0,69
D. KCl	28,37	0,26	0,37
E. NPK	124,99	1,13	1,65
F. Pupuk organik (kandang/kompos)	130,20	1,18	1,71
G. Lainnya	20,30	0,18	0,27
4. Stimulan	1,51	0,01	0,02
A. Stimulan/zat pengatur tumbuh padat	0,31	0,00	0,00
B. Stimulan/zat pengatur tumbuh cair	1,20	0,01	0,02
5. Pestisida	141,23	1,28	1,86
A. Pestisida padat	1,59	0,01	0,02
B. Pestisida cair	139,64	1,27	1,84
6. Pekerja	3.477,38	31,52	45,75
A. Pengolahan lahan	156,10	1,41	2,05
B. Penanaman pohon pelindung	15,14	0,14	0,20
C. Penanaman tanaman perkebunan	51,81	0,47	0,68
D. Pemeliharaan (pemangkasan, penyiangan, dll)	865,67	7,85	11,39
E. Pemupukan	188,48	1,71	2,48
F. Pengendalian hama/opt	115,09	1,04	1,51
G. Pemanenan	1.635,19	14,82	21,52
H. Pengeringan/penjemuran	449,90	4,08	5,92

Lanjutan

Rincian	Nilai (000Rp)	Persentase Biaya Terhadap Produksi	Persentase Biaya Terhadap Jumlah Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
7. Pengeluaran lain	3.130,52	28,37	41,19
A. Sewa lahan	94,57	0,86	1,24
B. Perkiraan sewa lahan bebas sewa/milik sendiri	2.084,75	18,90	27,43
C. Sewa alat/sarana usaha	7,86	0,07	0,10
D. Perkiraan sewa alat/sarana bebas sewa/milik sendiri	97,41	0,88	1,28
E. Bunga kredit/pinjaman	25,83	0,23	0,34
F. Pajak tidak langsung (pbb lahan untuk perkebunan (milik sendiri), dll)	54,78	0,50	0,72
G. Retribusi/pungutan/iuran (pengairan, dll)	50,27	0,46	0,66
H. Penyusutan barang modal	106,44	0,96	1,40
I. Bahan bakar minyak (bbm)	121,77	1,10	1,60
J. Biaya transportasi/pengangkutan hasil	195,77	1,77	2,58
K. Jasa pertanian	197,22	1,79	2,60
L. Lainnya (wadah, dll)	93,85	0,85	1,24

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 3. Rata-rata Nilai Produksi dan Pengeluaran Per Hektar dari usaha Perkebunan Tanaman Kakao

Rincian	Nilai (000Rp)	Persentase Biaya Terhadap Produksi	Persentase Biaya Terhadap Jumlah Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Produksi	14.720,50	100,00	
Jumlah pengeluaran	12.112,05	82,30	100,00
1. Bibit	86,58	0,59	0,72
2. Tanaman pelindung	21,08	0,14	0,17
3. Pupuk	627,75	4,26	5,19
A. Urea	217,86	1,48	1,80
B. TSP/SP36	64,40	0,44	0,53
C. Za	69,60	0,47	0,58
D. KCl	35,46	0,24	0,29
E. NPK	181,46	1,23	1,50
F. Pupuk organik (kandang/kompos)	33,76	0,23	0,28
G. Lainnya	25,21	0,17	0,21
4. Stimulan	51,94	0,35	0,43
A. Stimulan/zat pengatur tumbuh padat	10,30	0,07	0,09
B. Stimulan/zat pengatur tumbuh cair	41,64	0,28	0,34
5. Pestisida	366,70	2,50	3,02
A. Pestisida padat	12,61	0,09	0,10
B. Pestisida cair	354,09	2,41	2,92
6. Pekerja	5.973,92	40,59	49,33
A. Pengolahan lahan	163,59	1,11	1,35
B. Penanaman pohon pelindung	23,29	0,16	0,19
C. Penanaman tanaman perkebunan	71,75	0,49	0,59
D. Pemeliharaan (pemangkasan, penyiangan, dll)	1.317,89	8,95	10,88
E. Pemupukan	237,94	1,62	1,97
F. Pengendalian hama/opt	549,66	3,73	4,54
G. Pemanenan	2.400,26	16,31	19,82
H. Pengeringan/penjemuran	1.209,54	8,22	9,99

Lanjutan

Rincian	Nilai (000Rp)	Persentase Biaya Terhadap Produksi	Persentase Biaya Terhadap Jumlah Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
7. Pengeluaran lain	4.984,08	33,87	41,14
A. Sewa lahan	40,24	0,27	0,33
B. Perkiraan sewa lahan bebas sewa/milik sendiri	3.787,80	25,73	31,27
C. Sewa alat/sarana usaha	7,02	0,05	0,06
D. Perkiraan sewa alat/sarana bebas sewa/milik sendiri	257,22	1,75	2,12
E. Bunga kredit/pinjaman	18,61	0,13	0,15
F. Pajak tidak langsung (pbb lahan untuk perkebunan (milik sendiri), dll)	67,84	0,46	0,56
G. Retribusi/pungutan/iuran (pengairan, dll)	3,11	0,02	0,03
H. Penyusutan barang modal	282,31	1,92	2,33
I. Bahan bakar minyak (bbm)	235,42	1,60	1,94
J. Biaya transportasi/pengangkutan hasil	177,88	1,21	1,47
K. Jasa pertanian	44,98	0,31	0,37
L. Lainnya (wadah, dll)	61,65	0,42	0,51

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 4. Rata-rata Nilai Produksi dan Pengeluaran Per Hektar dari usaha Perkebunan Tanaman Cengkeh

Rincian	Nilai (000Rp)	Persentase Biaya Terhadap Produksi	Persentase Biaya Terhadap Jumlah Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Produksi	50.161,46	100,00	
Jumlah pengeluaran	19.096,42	38,08	100,00
1. Bibit	187,14	0,37	0,98
2. Tanaman pelindung	19,80	0,04	0,10
3. Pupuk	804,34	1,62	4,21
A. Urea	68,30	0,14	0,36
B. TSP/SP36	33,23	0,07	0,17
C. Za	40,84	0,08	0,21
D. KCl	25,89	0,05	0,14
E. NPK	188,34	0,38	0,99
F. Pupuk organik (kandang/kompos)	378,96	0,76	1,98
G. Lainnya	68,78	0,14	0,36
4. Stimulan	4,98	0,01	0,02
A. Stimulan/zat pengatur tumbuh padat	2,97	0,01	0,01
B. Stimulan/zat pengatur tumbuh cair	2,01	0,00	0,01
5. Pestisida	100,53	0,20	0,53
A. Pestisida padat	32,41	0,06	0,17
B. Pestisida cair	68,12	0,14	0,36
6. Pekerja	11.461,87	22,85	60,03
A. Pengolahan lahan	362,68	0,72	1,90
B. Penanaman pohon pelindung	6,86	0,01	0,04
C. Penanaman tanaman perkebunan	118,35	0,24	0,62
D. Pemeliharaan (pemangkasan, penyiangan, dll)	1.478,14	2,95	7,74
E. Pemupukan	347,56	0,69	1,82
F. Pengendalian hama/opt	106,18	0,21	0,56
G. Pemanenan	7.853,06	15,66	41,12
H. Pengeringan/penjemuran	1.189,04	2,37	6,23

Lanjutan

Rincian	Nilai (000Rp)	Persentase Biaya Terhadap Produksi	Persentase Biaya Terhadap Jumlah Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
7. Pengeluaran lain	6.517,76	12,99	34,13
A. Sewa lahan	318,50	0,63	1,67
B. Perkiraan sewa lahan bebas sewa/milik sendiri	4.600,74	9,17	24,09
C. Sewa alat/sarana usaha	18,70	0,04	0,10
D. Perkiraan sewa alat/sarana bebas sewa/milik sendiri	246,98	0,49	1,29
E. Bunga kredit/pinjaman	47,93	0,10	0,25
F. Pajak tidak langsung(pbb lahan untuk perkebunan (milik sendiri), dll)	93,79	0,19	0,49
G. Retribusi/pungutan/iuran (pengairan,dll)	36,19	0,07	0,19
H. Penyusutan barang modal	188,76	0,38	0,99
I. Bahan bakar minyak (bbm)	152,60	0,30	0,80
J. Biaya transportasi/pengangkutan hasil	297,54	0,59	1,56
K. Jasa pertanian	186,20	0,37	0,97
L. Lainnya(wadah.dll)	329,83	0,66	1,73

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 5. Rata-rata Nilai Produksi dan Pengeluaran Per Hektar dari usaha Perkebunan Tanaman Kelapa

Rincian	Nilai (000Rp)	Persentase Biaya Terhadap Produksi	Persentase Biaya Terhadap Jumlah Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Produksi	6.100,09	100,00	
Jumlah pengeluaran	4.162,99	68,21	100,00
1. Bibit	35,66	0,58	0,86
2. Tanaman pelindung	0,00	0,00	0,00
3. Pupuk	145,32	2,39	3,49
A. Urea	24,77	0,41	0,60
B. TSP/SP36	0,13	0,00	0,00
C. Za	0,18	0,00	0,00
D. KCl	15,63	0,26	0,38
E. NPK	81,56	1,34	1,96
F. Pupuk organik (kandang/kompos)	0,94	0,02	0,02
G. Lainnya	22,11	0,36	0,53
4. Stimulan	3,61	0,06	0,08
A. Stimulan/zat pengatur tumbuh padat	1,87	0,03	0,04
B. Stimulan/zat pengatur tumbuh cair	1,74	0,03	0,04
5. Pestisida	93,29	1,53	2,24
A. Pestisida padat	0,47	0,01	0,01
B. Pestisida cair	92,82	1,52	2,23
6. Pekerja	1.415,92	23,20	34,01
A. Pengolahan lahan	158,75	2,60	3,81
B. Penanaman pohon pelindung	0,79	0,01	0,02
C. Penanaman tanaman perkebunan	27,02	0,44	0,65
D. Pemeliharaan (pemangkasan, penyiangan, dll)	280,56	4,60	6,74
E. Pemupukan	31,79	0,52	0,76
F. Pengendalian hama/opt	40,69	0,67	0,98
G. Pemanenan	792,57	12,99	19,04
H. Pengeringan/penjemuran	83,75	1,37	2,01

Lanjutan

Rincian	Nilai (000Rp)	Persentase Biaya Terhadap Produksi	Persentase Biaya Terhadap Jumlah Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
7. Pengeluaran lain	2.469,19	40,45	59,32
A. Sewa lahan	0,70	0,01	0,02
B. Perkiraan sewa lahan bebas sewa/milik sendiri	1.607,99	26,36	38,63
C. Sewa alat/sarana usaha	6,29	0,10	0,15
D. Perkiraan sewa alat/sarana bebas sewa/milik sendiri	51,32	0,84	1,23
E. Bunga kredit/pinjaman	6,94	0,11	0,17
F. Pajak tidak langsung(pbb lahan untuk perkebunan (milik sendiri), dll)	6,17	0,10	0,15
G. Retribusi/pungutan/iuran (pengairan,dll)	55,20	0,90	1,33
H. Penyusutan barang modal	43,43	0,71	1,04
I. Bahan bakar minyak (bbm)	32,26	0,53	0,77
J. Biaya transportasi/pengangkutan hasil	147,89	2,42	3,55
K. Jasa pertanian	482,76	7,91	11,60
L. Lainnya(wadah.dll)	28,24	0,46	0,68

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 6. Rata-rata Nilai Produksi dan Pengeluaran Per Hektar dari usaha Perkebunan Tanaman Kelapa Sawit

Rincian	Nilai (000Rp)	Persentase Biaya Terhadap Produksi	Persentase Biaya Terhadap Jumlah Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Produksi	17.026,01	100,00	
Jumlah pengeluaran	9.712,16	57,05	100,00
1. Bibit	105,29	0,62	1,08
2. Tanaman pelindung	1,66	0,01	0,02
3. Pupuk	1.791,14	10,52	18,44
A. Urea	407,91	2,40	4,20
B. TSP/SP36	282,76	1,66	2,91
C. Za	51,51	0,30	0,53
D. KCl	323,91	1,90	3,34
E. NPK	532,12	3,13	5,48
F. Pupuk organik (kandang/kompos)	59,49	0,35	0,61
G. Lainnya	133,44	0,78	1,37
4. Stimulan	4,97	0,03	0,05
A. Stimulan/zat pengatur tumbuh padat	2,26	0,01	0,02
B. Stimulan/zat pengatur tumbuh cair	2,71	0,02	0,03
5. Pestisida	225,95	1,33	2,33
A. Pestisida padat	3,02	0,02	0,03
B. Pestisida cair	222,93	1,31	2,30
6. Pekerja	3.079,94	18,09	31,71
A. Pengolahan lahan	153,74	0,90	1,58
B. Penanaman pohon pelindung	0,62	0,00	0,01
C. Penanaman tanaman perkebunan	41,35	0,24	0,43
D. Pemeliharaan (pemangkasan, penyiangan, dll)	583,94	3,43	6,01
E. Pemupukan	244,93	1,44	2,52
F. Pengendalian hama/opt	127,14	0,75	1,31
G. Pemanenan	1.920,29	11,28	19,77
H. Pengeringan/penjemuran	7,93	0,05	0,08

Lanjutan

Rincian	Nilai (000Rp)	Persentase Biaya Terhadap Produksi	Persentase Biaya Terhadap Jumlah Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
7. Pengeluaran lain	4.503,21	26,45	46,37
A. Sewa lahan	116,97	0,69	1,20
B. Perkiraan sewa lahan bebas sewa/milik sendiri	2.891,33	16,98	29,77
C. Sewa alat/sarana usaha	5,17	0,03	0,05
D. Perkiraan sewa alat/sarana bebas sewa/milik sendiri	226,55	1,33	2,33
E. Bunga kredit/pinjaman	160,07	0,94	1,65
F. Pajak tidak langsung(pbb lahan untuk perkebunan (milik sendiri), dll)	46,28	0,27	0,48
G. Retribusi/pungutan/iuran (pengairan,dll)	55,91	0,33	0,58
H. Penyusutan barang modal	169,98	1,00	1,75
I. Bahan bakar minyak (bbm)	194,81	1,14	2,01
J. Biaya transportasi/pengangkutan hasil	433,87	2,55	4,47
K. Jasa pertanian	156,35	0,92	1,61
L. Lainnya(wadah.dll)	45,92	0,27	0,47

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 7. Rata-rata Nilai Produksi dan Pengeluaran Per Hektar dari usaha Perkebunan Tanaman Karet

Rincian	Nilai (000Rp)	Persentase Biaya Terhadap Produksi	Persentase Biaya Terhadap Jumlah Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Produksi	12.877,97	100,00	
Jumlah pengeluaran	9.211,69	71,54	100,00
1. Bibit	82,47	0,64	0,90
2. Tanaman pelindung	1,21	0,01	0,01
3. Pupuk	300,64	2,33	3,27
A. Urea	125,99	0,98	1,37
B. TSP/SP36	32,26	0,25	0,35
C. Za	5,47	0,04	0,06
D. KCl	38,70	0,30	0,42
E. NPK	71,38	0,55	0,78
F. Pupuk organik (kandang/kompos)	4,89	0,04	0,05
G. Lainnya	21,95	0,17	0,24
4. Stimulan	5,56	0,05	0,06
A. Stimulan/zat pengatur tumbuh padat	0,78	0,01	0,01
B. Stimulan/zat pengatur tumbuh cair	4,78	0,04	0,05
5. Pestisida	104,99	0,82	1,14
A. Pestisida padat	2,11	0,02	0,02
B. Pestisida cair	102,88	0,80	1,12
6. Pekerja	5.259,37	40,84	57,09
A. Pengolahan lahan	157,71	1,22	1,71
B. Penanaman pohon pelindung	1,72	0,01	0,02
C. Penanaman tanaman perkebunan	55,16	0,43	0,60
D. Pemeliharaan (pemangkasan, penyiangan, dll)	389,99	3,03	4,23
E. Pemupukan	100,22	0,78	1,09
F. Pengendalian hama/opt	74,12	0,58	0,80
G. Pemanenan	4.451,10	34,56	48,32
H. Pengeringan/penjemuran	29,35	0,23	0,32

Lanjutan

Rincian	Nilai (000Rp)	Persentase Biaya Terhadap Produksi	Persentase Biaya Terhadap Jumlah Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
7. Pengeluaran lain	3.457,45	26,85	37,53
A. Sewa lahan	72,51	0,56	0,79
B. Perkiraan sewa lahan bebas sewa/milik sendiri	2.172,23	16,87	23,58
C. Sewa alat/sarana usaha	2,94	0,02	0,03
D. Perkiraan sewa alat/sarana bebas sewa/milik sendiri	180,18	1,40	1,96
E. Bunga kredit/pinjaman	38,33	0,30	0,42
F. Pajak tidak langsung(pbb lahan untuk perkebunan (milik sendiri), dll)	49,71	0,39	0,54
G. Retribusi/pungutan/iuran (pengairan,dll)	16,24	0,13	0,18
H. Penyusutan barang modal	179,52	1,39	1,95
I. Bahan bakar minyak (bbm)	379,05	2,94	4,11
J. Biaya transportasi/pengangkutan hasil	198,30	1,54	2,15
K. Jasa pertanian	48,31	0,38	0,52
L. Lainnya(wadah.dll)	120,13	0,93	1,30

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 8. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Aceh Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	256.240.684,96	5.224.086,85	134.344.515,20	116.672.082,91
Sosial	271.588.285,95	29.804.201,74	136.967.188,24	104.816.895,97
Efek Divergensi	-15.347.600,99	-24.580.114,90	-2.622.673,04	11.855.186,94
NPCO	0,94			
NPCI	0,18			
Net Transfer	11.855.186,94			
EPC	1,04			
PCR	0,54			
DRC	0,57			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 9. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 (Rp/ Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	263.073.618,67	6.039.195,55	126.233.145,79	130.801.277,33
Sosial	272.342.073,15	24.015.601,18	127.055.120,95	121.271.351,03
Efek Divergensi	-9.268.454,48	-17.976.405,63	-821.975,16	9.529.926,31
NPCO	0,97			
NPCI	0,25			
Net Transfer	9.529.926,31			
EPC	1,04			
PCR	0,49			
DRC	0,51			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 10. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 (Rp/ Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	223.845.285,92	2.355.384,09	81.129.484,18	140.360.417,65
Sosial	350.679.154,76	12.675.685,64	81.766.991,05	256.236.478,06
Efek Divergensi	-126.833.868,84	-10.320.301,55	-637.506,87	-115.876.060,42
NPCO	0,64			
NPCI	0,19			
Net Transfer	-115.876.060,42			
EPC	0,66			
PCR	0,37			
DRC	0,24			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 11. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Riau Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	204.674.430,43	6.809.072,12	92.899.685,85	104.965.672,46
Sosial	214.424.599,89	28.134.221,37	94.237.328,69	92.053.049,83
Efek Divergensi	-9.750.169,47	-21.325.149,25	-1.337.642,85	12.912.622,63
NPCO	0,95			
NPCI	0,24			
Net Transfer	12.912.622,63			
EPC	1,06			
PCR	0,47			
DRC	0,51			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 12. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Jambi Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	274.392.257,02	3.870.858,46	149.232.580,38	121.288.818,18
Sosial	273.447.110,63	29.880.435,34	150.336.555,88	93.230.119,41
Efek Divergensi	945.146,39	--26.009.576,88	-1.103.975,50	28.058.698,77
NPCO	1,00			
NPCI	0,13			
Net Transfer	28.058.698,77			
EPC	1,11			
PCR	0,55			
DRC	0,62			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 13. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	332.039.423,37	12.645.028,67	144.595.715,03	174.798.679,66
Sosial	339.683.783,43	55.131.433,15	146.497.685,51	138.054.664,78
Efek Divergensi	-7.644.360,07	-42.486.404,47	-1.901.970,48	36.744.014,88
NPCO	0,98			
NPCI	0,23			
Net Transfer	36.744.014,88			
EPC	1,12			
PCR	0,45			
DRC	0,51			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 14. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Bengkulu Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	324.970.135,62	15.258.689,73	154.987.373,05	154.724.072,85
Sosial	385.184.669,97	68.663.330,11	156.529.917,31	159.991.422,56
Efek Divergensi	-60.214.534,35	-53.404.640,38	-1.542.544,26	-5.267.349,71
NPCO	0,84			
NPCI	0,22			
Net Transfer	-5.267.349,71			
EPC	0,98			
PCR	0,50			
DRC	0,49			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 15. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Lampung Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	296.470.855,20	20.803.790,09	112.642.388,04	163.024.677,08
Sosial	370.554.338,57	57.484.498,52	114.115.217,71	198.954.622,34
Efek Divergensi	-74.083.483,38	-36.680.708,44	-1.472.829,67	-35.929.945,27
NPCO	0,80			
NPCI	0,36			
Net Transfer	-35.929.945,27			
EPC	0,88			
PCR	0,41			
DRC	0,36			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 16. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	312.636.519,72	13.198.805,47	188.498.449,63	110.939.264,61
Sosial	400.760.385,95	46.818.171,55	189.663.161,80	164.279.052,59
Efek Divergensi	-88.123.866,24	-33.619.366,08	-1.164.712,17	-53.339.787,98
NPCO	0,78			
NPCI	0,28			
Net Transfer	-53.339.787,98			
EPC	0,85			
PCR	0,63			
DRC	0,54			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 17. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	62.267.239,61	1.089.150,70	26.235.747,66	34.942.341,25
Sosial	67.674.735,10	5.544.215,66	26.561.540,08	35.568.979,36
Efek Divergensi	-5.407.495,49	-4.455.064,96	-325.792,41	-626.638,12
NPCO	0,92			
NPCI	0,20			
Net Transfer	-626.638,12			
EPC	0,98			
PCR	0,43			
DRC	0,43			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 18. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	228.870.242,80	5.024.781,20	116.528.368,87	107.317.092,72
Sosial	255.447.869,38	33.765.611,35	117.225.257,59	104.457.000,43
Efek Divergensi	-26.577.626,58	-28.740.830,15	-696.888,72	2.860.092,29
NPCO	0,90			
NPCI	0,15			
Net Transfer	2.860.092,29			
EPC	1,01			
PCR	0,52			
DRC	0,53			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 19. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	521.315.982,47	27.113.601,75	188.210.476,33	305.991.904,39
Sosial	446.463.656,09	64.958.195,11	189.744.213,80	191.761.247,18
Efek Divergensi	74.852.326,38	-37.844.593,36	1.533.737,47	114.230.657,21
NPCO	1,17			
NPCI	0,42			
Net Transfer	114.230.657,21			
EPC	1,30			
PCR	0,38			
DRC	0,50			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 20. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Banten Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	237.903.730,57	2.839.513,70	107.514.310,99	127.549.905,88
Sosial	331.658.338,74	11.232.606,83	108.376.377,82	212.049.354,09
Efek Divergensi	-93.754.608,16	-8.393.093,13	-862.066,83	-84.499.448,20
NPCO	0,72			
NPCI	0,25			
Net Transfer	-84.499.448,20			
EPC	0,73			
PCR	0,46			
DRC	0,34			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 21. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	172.052.007,18	2.926.510,19	97.136.710,55	71.988.786,43
Sosial	191.189.871,39	27.287.704,01	97.931.953,35	65.970.214,02
Efek Divergensi	-19.137.864,21	-24.361.193,82	-795.242,80	6.018.572,41
NPCO	0,90			
NPCI	0,11			
Net Transfer	6.018.572,41			
EPC	1,03			
PCR	0,57			
DRC	0,60			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 22. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	234.142.377,73	4.282.920,61	115.602.089,04	114.257.368,08
Sosial	262.172.232,49	28.136.934,56	116.414.377,99	117.620.919,95
Efek Divergensi	-28.029.854,76	-23.854.013,95	-812.288,94	-3.363.551,87
NPCO	0,89			
NPCI	0,15			
Net Transfer	-3.363.551,87			
EPC	0,98			
PCR	0,50			
DRC	0,50			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 23. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	196.185.269,19	9.962.852,28	98.567.055,25	87.655.361,65
Sosial	233.027.595,46	37.286.485,86	99.676.081,42	96.065.028,18
Efek Divergensi	-36.842.326,28	-27.323.633,58	-1.109.026,17	-8.409.666,53
NPCO	0,84			
NPCI	0,27			
Net Transfer	-8.409.666,53			
EPC	0,95			
PCR	0,53			
DRC	0,51			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 24. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	142.894.070,56	7.445.808,69	62.045.821,45	73.402.440,42
Sosial	171.466.849,39	35.696.706,00	63.007.644,39	72.762.498,99
Efek Divergensi	-28.572.778,83	-28.250.897,31	-961.822,95	639.941,43
NPCO	0,83			
NPCI	0,21			
Net Transfer	639.941,43			
EPC	1,00			
PCR	0,46			
DRC	0,46			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 25. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	489.299.151,44	11.702.809,08	446.656.976,31	30.939.366,05
Sosial	501.451.321,56	57.673.160,25	447.887.929,78	-4.109.768,48
Efek Divergensi	-12.152.170,12	-45.970.351,17	-1.230.953,47	35.049.134,53
NPCO	0,98			
NPCI	0,20			
Net Transfer	35.049.134,53			
EPC	1,08			
PCR	0,94			
DRC	1,01			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 26. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	332.814.987,92	10.581.455,22	223.479.225,25	98.754.307,44
Sosial	394.765.399,92	31.168.902,49	224.794.747,89	138.801.749,54
Efek Divergensi	-61.950.412,00	-20.587.447,27	-1.315.522,64	-40.047.442,10
NPCO	0,84			
NPCI	0,34			
Net Transfer	-40.047.442,10			
EPC	0,89			
PCR	0,69			
DRC	0,62			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 27. Hasil Analisis PAM Usahatani Karet di Provinsi Papua Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	132.648.757,34	-	51.108.311,43	81.540.445,91
Sosial	93.699.844,94	-	51.480.887,94	42.218.957,00
Efek Divergensi	38.948.912,40	-	-372.576,51	39.321.488,91
NPCO	1,42			
NPCI	-			
Net Transfer	39.321.488,91			
EPC	1,42			
PCR	0,39			
DRC	0,55			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 28. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Aceh Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	138.423.904,93	3.472.665,65	58.739.659,65	76.211.579,62
Sosial	79.612.076,70.	18.715.013,87.	58.817.791,27	2.079.271,56
Divergensi	58.811.828,23	-15.242.348,22	-78.131,62	74.132.308,06
NCPO	1,74			
NPCI	0,19			
Net Transfer	74.132.308,06			
EPC	2,22			
PCR	0,44			
DRC	0,97			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 29. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 (Rp/ Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	181.269.038,75	13.230.833,06	97.420.049,57	76.211.579,62
Sosial	74.286.721,02	39.421.442,90	97.524.582,46	-62.659.304,34
Divergensi	106.982.317,73	-26.190.609,84	-104.532,89	138.870.883,97
NCPO	2,44			
NCPI	0,34			
<i>Net Transfer</i>	138.870.883,97			
EPC	4,82			
PCR	0,58			
DRC	2,80			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 30. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 (Rp/ Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	30782586,14	1145572,758	10.894.287,41	76.211.579,62
Sosial	17.885.147,57	3.285.008,38	10.901.142,51	3.698.996,67
Divergensi	12.897.438,57	-2.139.435,63	-6.855,10	72.512.582,95
NCPO	1,72			
NCPI	0,35			
<i>Net Transfer</i>	72.512.582,95			
EPC	2,03			
PCR	0,37			
DRC	0,75			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 31. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Riau Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	119.197.935,28	5.459.598,97	112.993.845,54	76.211.579,62
Sosial	185.362.208,49	1.031.372,13	112.995.768,04	71.335.068,32
Divergensi	-66.164.273,22	4.428.226,84	-1.922,50	4.876.511,30
NCPO	0,64			
NCPI	5,29			
<i>Net Transfer</i>	4.876.511,30			
EPC	0,62			
PCR	0,99			
DRC	0,61			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 32. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Jambi Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	93.724.194,20	3.168.965,90	39.306.034,01	51.249.194,28
Sosial	34.776.961,43	21.707.080,54	39.358.913,82	-26.289.032,92
Divergensi	58.947.232,76	-18.538.114,63	-52.879,80	77.538.227,20
NCPO	2,70			
NCPI	0,15			
<i>Net Transfer</i>	77.538.227,20			
EPC	6,93			
PCR	0,43			
DRC	3,01			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 33. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	51.527.620,22	2.784.338,02	18.076.931,97	30.666.350,22
Sosial	19.490.204,77	2.581.220,10	18.408.567,15	-1.499.582,48
Divergensi	32.037.415,45	203.117,92	-331.635,17	32.165.932,70
NCPO	2,64			
NCPI	1,08			
<i>Net Transfer</i>	32.165.932,70			
EPC	2,88			
PCR	0,37			
DRC	1,09			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 34. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Bengkulu Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	51.796.858,39	2.580.027,00	19.990.327,22	29.226.504,17
Sosial	18.185.540,91	4.592.466,10	20.170.889,72	-6.577.814,91
Divergensi	33.611.317,48	-2.012.439,11	-180.562,49	35.804.319,08
NCPO	2,85			
NCPI	0,56			
<i>Net Transfer</i>	35.804.319,08			
EPC	3,62			
PCR	0,41			
DRC	1,48			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 35. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Lampung Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	49.583.353,65	3.238.692,28	18.240.667,51	28.103.993,86
Sosial	16.529.011,67	4.429.551,57	19.407.687,36	-7.308.227,26
Divergensi	33.054.341,98	-1.190.859,29	-1.167.019,85	35.412.221,12
NCPO	3,00			
NCPI	0,73			
<i>Net Transfer</i>	35.412.221,12			
EPC	3,83			
PCR	0,39			
DRC	1,60			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 36. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	49.184.731,11	4.371.693,56	21.434.293,47	23.378.744,08
Sosial	26.771.377,94	17.521.548,99	21.654.532,46	-12.404.703,50
Divergensi	22.413.353,17	-13.149.855,43	-220.238,99	35.783.447,59
NCPO	1,84			
NCPI	0,25			
<i>Net Transfer</i>	35.783.447,59			
EPC	4,84			
PCR	0,48			
DRC	2,34			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 37. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Rp/ Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	9.0916.995,16	10.287.749,41	36.538.446,52	44.090.799,23
Sosial	45.118.525,63	20.816.202,31	36.739.801,55	-12.437.478,22
Divergensi	45.798.469,53	-10.528.452,89	-201.355,02	56.528.277,45
NCPO	2,02			
NCPI	0,49			
<i>Net Transfer</i>	56.528.277,45			
EPC	3,32			
PCR	0,45			
DRC	1,51			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 38. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 (Rp/ Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	103.514.785,5	8.067.748,223	43.497.478,84	51.949.558,39
Sosial	42.605.133,69	23.923.755,40	43.796.074,57	-25.114.696,28
Divergensi	60.909.651,76	-15.856.007,18	-298.595,73	77.064.254,67
NCPO	2,43			
NCPI	0,34			
<i>Net Transfer</i>	77.064.254,67			
EPC	5,11			
PCR	0,46			
DRC	2,34			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 39. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Banten Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	60.713.028,17	480.153,65	36.333.226,63	23.899.647,89
Sosial	23.099.222,40	840.172,94	36.333.893,83	-14.074.844,37
Divergensi	37.613.805,77	-360.019,29	-667,20	37.974.492,26
NCPO	2,63			
NCPI	0,57			
<i>Net Transfer</i>	37.974.492,26			
EPC	2,71			
PCR	0,60			
DRC	1,63			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 40. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Bali Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	152.385.094,3	14.262.415,4	66.800.961,28	71.321.717,61
Sosial	75.401.622,65	16.481.923,75	67.030.613,46	-8.110.914,56
Divergensi	76.983.471,64	-2.219.508,35	-229.652,18	79.432.632,16
NCPO	2,02			
NCPI	0,87			
<i>Net Transfer</i>	79.432.632,16			
EPC	2,34			
PCR	0,48			
DRC	1,14			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 41. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014
(Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	140.714.595,8	831.781,31	75.995.526,83	63.887.287,61
Sosial	109.040.473,64	6.164.090,34	76.083.263,19	26.793.120,11
Divergensi	31.674.122,12	-5.332.309,02	-87.736,35	37.094.167,50
NCPO	1,29			
NCPI	0,13			
<i>Net Transfer</i>	37.094.167,50			
EPC	1,36			
PCR	0,54			
DRC	0,74			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 42. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014
(Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	122.806.346,1	134.865,57	41.912.298,86	80.759.181,62
Sosial	37.148.884,64	1.223.725,62	41.937.964,50	-6.012.805,48
Divergensi	85.657.461,41	-1.088.860,05	-25.665,64	86.771.987,10
NCPO	3,31			
NCPI	0,11			
<i>Net Transfer</i>	86.771.987,10			
EPC	3,41			
PCR	0,34			
DRC	1,17			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 43. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	87495931,81	3719101,124	66.567.996,90	17.208.833,79
Sosial	23.837.061,43	546.020,92	66.569.123,10	-43.278.082,60
Divergensi	63.658.870,38	3.173.080,20	-1.126,20	60.486.916,38
NCPO	3,67			
NCPI	6,81			
<i>Net Transfer</i>	60.486.916,38			
EPC	3,60			
PCR	0,79			
DRC	2,86			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 44. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	117.000.000,00	24.37.500,00	76.762.500,00	37.800.000,00
Sosial	39.368.155,61	17.616.000,00	76.762.552,10	-55.010.396,49
Divergensi	77.631.844,39	-15.178.500,00	-52,10	92.810.396,49
NCPO	2,97			
NCPI	0,14			
<i>Net Transfer</i>	92.810.396,49			
EPC	5,27			
PCR	0,67			
DRC	3,53			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 45. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	13.339.4871,8	16.615.384,62	76.461.538,46	40.317.948,72
Sosial	54.546.473,36	7.227.076,92	76.461.616,46	-29.142.220,03
Divergensi	78.848.398,44	9.388.307,69	-78,00	69.460.168,75
NCPO	2,45			
NCPI	2,30			
<i>Net Transfer</i>	69.460.168,75			
EPC	2,47			
PCR	0,65			
DRC	1,62			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 46. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	65.742.019,54	25.830.401,74	29.781.324,65	10.130.293,16
Sosial	23.454.925,68	306.032,57	29.783.413,95	-6.634.520,84
Divergensi	42.287.093,86	25.524.369,16	-2.089,30	16.764.814,00
NCPO	2,80			
NCPI	84,40			
<i>Net Transfer</i>	16.764.814,00			
EPC	1,72			
PCR	0,75			
DRC	1,29			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 47. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	125.419.132,28	243.332,89	49.594.710,54	75.581.088,85
Sosial	33.344.254,43	1.073.087,20	49.600.821,34	-17.329.654,11
Divergensi	92.074.877,85	-829.754,31	-6.110,80	92.910.742,96
NCPO	3,76			
NCPI	0,23			
<i>Net Transfer</i>	92.910.742,96			
EPC	3,88			
PCR	0,40			
DRC	1,54			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 48. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	121.347.865,36	8.132.474,26	64.203.179,38	49.012.211,72
Sosial	39.122.421,01	36.390.780,99	64.218.384,33	-61.486.744,31
Divergensi	82.225.444,35	-28.258.306,73	-15.204,95	110.498.956,03
NCPO	3,10			
NCPI	0,22			
<i>Net Transfer</i>	110.498.956,03			
EPC	41,45			
PCR	0,57			
DRC	23,51			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 49. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	70.274.011,53	3.390.218,162	30.972.541,77	35.911.251,60
Sosial	47.911.632,22	19.053.685,82	31.064.579,05	-2.206.632,65
Divergensi	22.362.379,32	-15.663.467,66	-92.037,29	38.117.884,26
NCPO	1,47			
NCPI	0,18			
<i>Net Transfer</i>	38.117.884,26			
EPC	2,32			
PCR	0,46			
DRC	1,08			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 50. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	66.641.650,36.	611.773,07.	65.777.343,06	252.534,23
Sosial	23.259.098,84.	383.142,70.	65.779.090,36	-42.903.134,21
Divergensi	43.382.551,52	228.630,38	-1.747,30	43.155.668,44
NCPO	2,87			
NCPI	1,60			
<i>Net Transfer</i>	43.155.668,44			
EPC	2,89			
PCR	0,996			
DRC	2,88			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 51. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Gorontalo Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	25.955.585	0	24.362.853	1.592.732
Sosial	8.103.780	289.961	24.363.085	-16.549.266
Divergensi	17.851.806	-289.961	-231	18.141.998
NCPO	3,20			
NCPI	0,00			
<i>Net.Transfer</i>	18.141.998,28			
EPC	3,32			
PCR	0,94			
DRC	3,12			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 52. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	47.213.515,43	1.119.526,56.	33.903.516,16	12.190.472,71
Sosial	18.113.826,26.	119.828,17.	33.910.147,84	-15.916.149,75
Divergensi	29.099.689,16	999.698,39	-6.631,68	28.106.622,46
NCPO	2,61			
NCPI	9,34			
<i>Net.Transfer</i>	28.106.622,46			
EPC	2,56			
PCR	0,74			
DRC	1,88			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 53. Hasil Analisis PAM Usahatani Kopi di Provinsi Papua Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	46.778.561,35	0	28.564.174,89	18.214.386,46
Sosial	.35.184.535,16	2.127.046,37.	28.564.333,89	4.493.154,89
Divergensi	11.594.026,19	-2.127.046,37	-159,00	13.721.231,57
NCPO	1,33			
NCPI	0,00			
<i>Net.Transfer</i>	13.721.231,57			
EPC	1,42			
PCR	0,61			
DRC	0,86			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 54. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Provinsi Aceh Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	1.006.316.331,12	121.473.755,39	352.583.838,53	532.258.737,20
Sosial	1.464.247.012,76	407.497.055,78	358.828.164,90	697.921.792,09
Efek Divergensi	-457.930.681,65	-286.023.300,39	-6.244.326,37	-165.663.054,89
NPCO	0,69			
NCPI	0,30			
<i>Net Transfer</i>	-165.663.054,89			
EPC	0,84			
PCR	0,40			
DRC	0,34			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 55. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	1.439.977.351,43	134.856.991,69	342.378.672,28	962.741.687,46
Sosial	2.038.941.859,15	287.733.070,17	348.070.917,73	1.403.137.871,24
Efek Divergensi	-598.964.507,72	-152.876.078,49	-5.692.245,45	-440.396.183,78
NPCO	0,71			
NPCI	0,47			
Net Transfer	-440.396.183,78			
EPC	0,75			
PCR	0,26			
DRC	0,20			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 56. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	460.106.597,69	32.344.652,67	87.573.055,35	340.188.889,67
Sosial	699.992.415,62	87.580.244,94	89.738.783,49	522.673.387,19
Efek Divergensi	-239.885.817,93	-55.235.592,27	-2.165.728,14	-182.484.497,52
NPCO	0,66			
NPCI	0,37			
Net Transfer	-182.484.497,52			
EPC	0,70			
PCR	0,20			
DRC	0,15			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 57. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Provinsi Riau Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	1.479.321.826,27	231.191.581,01	343.816.276,41	904.313.968,85
Sosial	2.041.112.373,55	801.327.424,19	352.303.380,23	887.481.569,13
Efek Divergensi	-561.790.547,27	-570.135.843,18	-8.487.103,83	16.832.399,73
NPCO	0,72			
NPCI	0,29			
<i>Net Transfer</i>	16.832.399,73			
EPC	1,01			
PCR	0,28			
DRC	0,28			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 58. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	722.977.539,63	89.779.373,04	192.947.861,82	440.250.304,77
Sosial	993.491.658,14	195.212.809,20	197.081.337,81	601.197.511,12
Efek Divergensi	-270.514.118,51	-105.433.436,17	-4.133.475,99	-160.947.206,35
NPCO	0,73			
NPCI	0,46			
<i>Net Transfer</i>	-160.947.206,35			
EPC	0,79			
PCR	0,30			
DRC	0,25			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 59. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	1.101.813.503,33	116.789.046,56	254.974.128,60	730.050.328,16
Sosial	1.582.971.266,92	285.547.195,75	261.722.907,25	1.035.701.163,92
Efek Divergensi	-481.157.763,59	-168.758.149,19	-6.748.778,64	-305.650.835,76
NPCO	0,70			
NPCI	0,41			
Net Transfer	-305.650.835,76			
EPC	0,76			
PCR	0,26			
DRC	0,20			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 60. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Provinsi Bengkulu Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	1.280.429.836,94	137.746.469,92	330.809.415,87	811.873.951,14
Sosial	1.955.459.764,44	420.174.958,91	341.072.983,95	1.194.211.821,59
Efek Divergensi	-675.029.927,51	-282.428.488,98	-10.263.568,08	-382.337.870,45
NPCO	0,65			
NPCI	0,33			
Net Transfer	-382.337.870,45			
EPC	0,74			
PCR	0,29			
DRC	0,22			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 61. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Provinsi Lampung Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	1.042.442.090,48	129.706.891,36	219.256.445,98	693.478.753,13
Sosial	1.461.098.921,78	317.231.779,59	225.785.224,30	918.081.917,89
Efek Divergensi	-418.656.831,30	-187.524.888,22	-6.528.778,32	-224.603.164,76
NPCO	0,71			
NPCI	0,41			
<i>Net Transfer</i>	-224.603.164,76			
EPC	0,80			
PCR	0,24			
DRC	0,20			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 62. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	953.952.739,03	214.235.860,12	330.891.009,70	408.825.869,21
Sosial	1.538.634.891,83	428.224.035,19	336.311.155,41	774.099.701,23
Efek Divergensi	-584.682.152,79	-213.988.175,07	-5.420.145,70	-365.273.832,02
NPCO	0,62			
NPCI	0,50			
<i>Net Transfer</i>	-365.273.832,02			
EPC	0,67			
PCR	0,45			
DRC	0,30			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 63. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Provinsi Banten Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	771.259.925,82	32.322.902,52	174.602.053,08	564.334.970,22
Sosial	1.413.805.453,31	64.578.114,38	175.582.371,23	1.173.644.967,70
Efek Divergensi	-642.545.527,49	-32.255.211,87	-980.318,15	-609.309.997,48
NPCO	0,55			
NPCI	0,50			
Net Transfer	-609.309.997,48			
EPC	0,55			
PCR	0,24			
DRC	0,13			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 64 Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	688.613.793,81	88.515.891,17	166.977.831,12	433.120.071,52
Sosial	848.837.671,03	228.972.033,21	170.613.560,31	449.252.077,52
Efek Divergensi	-160.223.877,23	-140.456.142,04	-3.635.729,19	-16.132.006,00
NPCO	0,81			
NPCI	0,39			
Net Transfer	-16.132.006,00			
EPC	0,97			
PCR	0,28			
DRC	0,28			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 65. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	839.854.858,24	146.764.824,61	205.300.164,93	487.789.868,70
Sosial	1.134.327.025,15	446.758.616,80	209.964.636,81	477.603.771,54
Efek Divergensi	-294.472.166,91	-299.993.792,19	-4.664.471,88	10.186.097,16
NPCO	0,74			
NPCI	0,33			
<i>Net Transfer</i>	10.186.097,16			
EPC	1,01			
PCR	0,30			
DRC	0,31			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 66. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	1.146.625.299,29	136.506.278,19	305.620.602,83	704.498.418,27
Sosial	1.681.532.843,14	442.493.799,46	310.689.603,39	928.349.440,30
Efek Divergensi	-534.907.543,85	-305.987.521,27	-5.069.000,56	-223.851.022,03
NPCO	0,68			
NPCI	0,31			
<i>Net Transfer</i>	-223.851.022,03			
EPC	0,82			
PCR	0,30			
DRC	0,25			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 67. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	765.393.465,78	85.481.085,79	225.367.399,38	454.544.980,61
Sosial	1.681.532.843,14	314.169.939,10	229.714.621,03	1.137.648.283,02
Efek Divergensi	-916.139.377,37	-228.688.853,31	-4.347.221,65	-683.103.302,41
NPCO	0,46			
NPCI	0,27			
Net Transfer	-683.103.302,41			
EPC	0,50			
PCR	0,33			
DRC	0,17			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 68. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	1.247.418.836,20	150.400.281,07	454.937.867,71	642.080.687,42
Sosial	1.750.739.574,97	432.758.210,34	3.149.139.217,37	-1.831.157.852,75
Efek Divergensi	-503.320.738,77	-282.357.929,28	-2.694.201.349,67	2.473.238.540,17
NPCO	0,71			
NPCI	0,35			
Net Transfer	2.473.238.540,17			
EPC	0,83			
PCR	0,41			
DRC	2,39			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 69. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	864.812.754,80	82.208.914,03	200.513.296,78	582.090.543,99
Sosial	1.360.319.816,49	417.340.414,30	203.970.109,68	739.009.292,51
Efek Divergensi	-495.507.061,69	-335.131.500,27	-3.456.812,90)	-156.918.748,52
NPCO	0,64			
NPCI	0,20			
<i>Net Transfer</i>	-156.918.748,52			
EPC	0,83			
PCR	0,26			
DRC	0,22			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 70. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	552.811.758,26	41.871.462,48	249.652.980,65	261.287.315,14
Sosial	1.526.573.738,62	182.683.748,04	252.062.564,36	1.091.827.426,23
Efek Divergensi	-973.761.980,36	-140.812.285,56	-2.409.583,71	-830.540.111,09
NPCO	0,36			
NPCI	0,23			
<i>Net Transfer</i>	-830.540.111,09			
EPC	0,38			
PCR	0,49			
DRC	0,19			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 71. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014
(Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	1.893.422.489,01	166.731.174,35	563.400.554,34	1.163.290.760,32
Sosial	2.618.399.241,57	613.577.572,41	581.813.656,80	1.423.008.012,37
Efek Divergensi	-724.976.752,57	-446.846.398,06	-18.413.102,46	-259.717.252,05
NPCO	0,72			
NPCI	0,27			
Net Transfer	-259.717.252,05			
EPC	0,86			
PCR	0,33			
DRC	0,29			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 72. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat Tahun 2014
(Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	594.810.126,58	34.211,43	99.684.621,96	495.091.293,19
Sosial	1.383.218.832,66	89.794,74	101.487.830,17	1.281.641.207,74
Efek Divergensi	-788.408.706,08	-55.583,31	-1.803.208,21	-786.549.914,55
NPCO	0,43			
NPCI	0,38			
Net Transfer	-786.549.914,55			
EPC	0,43			
PCR	0,17			
DRC	0,07			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 73. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa Sawit di Provinsi Papua Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	748.513.530,21	1.390.090,20	276.456.196,71	470.667.243,30
Sosial	1.463.100.380,83	1.977.527,11	276.873.347,34	1.184.249.506,38
Efek Divergensi	-714.586.850,62	-587.436,91	-417.150,62	-713.582.263,08
NPCO	0,51			
NPCI	0,70			
<i>Net Transfer</i>	-713.582.263,08			
EPC	0,51			
PCR	0,37			
DRC	0,19			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 74. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Aceh Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	250.329.934,09.	11.117.954,17.	94.936.416,15	144.275.563,76
Sosial	161.518.393,92.	41.527.495,41.	95.985.903,47	24.004.995,03
Divergensi	88.811.540,17	-30.409.541,24	-1.049.487,33	120.270.568,73
NCPO	1,55			
NPCI	0,27			
<i>Net Transfer</i>	120.270.568,73			
EPC	1,99			
PCR	0,40			
DRC	0,80			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 75. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	319.537.571,78	26.335.337,02	151.464.140,50	141.738.094,25
Sosial	179.740.642,04	76.417.807,98	145.272.472,79	-41.949.638,73
Divergensi	139.796.929,73	-50.082.470,96	6.191.667,71	183.687.732,98
NCPO	1,78			
NCPI	0,34			
Net Transfer	183.687.732,98			
EPC	2,84			
PCR	0,52			
DRC	1,41			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 76. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	200.760.582,81	5.762.069,55	63.183.942,48	131.814.570,77
Sosial	127.149.196,74	20.537.419,73	60.077.864,73	46.533.912,28
Divergensi	73.611.386,06	-14.775.350,18	3.106.077,75	85.280.658,50
NCPO	1,58			
NCPI	0,28			
Net Transfer	85.280.658,50			
EPC	1,83			
PCR	0,32			
DRC	0,56			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 77. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Riau Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	408.000.000,00	101.333.333,33	170 000 000,00	136 666 666,67
Sosial	295.101.827,48	64.396.061,62	156 670 752,08	74 035 013,79
Divergensi	112.898.172,52	36.937.271,71	13 329 247,92	62 631 652,88
NCPO	1,38			
NCPI	1,57			
<i>Net Transfer</i>	62.631.652,88			
EPC	1,33			
PCR	0,55			
DRC	0,68			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 78. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Jambi Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	250.696.905,09	21.605.528,19	370 542 656,03	-141 451 279,13
Sosial	136.875.815,73	110.411.677,56	358 937 310,40	-332 473 172,23
Divergensi	113.821.089,37	-88.806.149,37	11 605 345,63	191 021 893,10
NCPO	1,83			
NCPI	0,20			
<i>Net Transfer</i>	191.021.893,10			
EPC	8,66			
PCR	1,62			
DRC	13,56			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 79. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	163.947.500,31	7.924.758,80	67 051 121,41	88 971 620,10
Sosial	136.887.587,70	87.767.382,28	56 399 904,95	-7 279 699,53
Divergensi	27.059.912,62	-79.842.623,48	10 651 216,47	96 251 319,62
NCPO	1,20			
NCPI	0,09			
<i>Net Transfer</i>	96.251.319,62			
EPC	3,18			
PCR	0,43			
DRC	1,15			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 80. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Bengkulu Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	192.798.592,22	8.174.874,57	82 445 766,67	102 177 950,98
Sosial	120.438.312,28	48.472.768,16	78 039 141,57	-6 073 597,45
Divergensi	72.360.279,94	-40.297.893,59	4 406 625,10	108 251 548,43
NCPO	1,60			
NCPI	0,17			
<i>Net Transfer</i>	108.251.548,43			
EPC	2,57			
PCR	0,45			
DRC	1,08			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 81. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Lampung Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	146.536.961,56	7.247.391,01	49.330.935,51	89.958.635,04
Sosial	98.269.070,57	34.685.239,18	54.061.977,16	9.521.854,23
Divergensi	48.267.891,00	-27.437.848,16	-4.731.041,65	80.436.780,80
NCPO	1,49			
NCPI	0,21			
<i>Net Transfer</i>	80.436.780,80			
EPC	2,19			
PCR	0,35			
DRC	0,85			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 82. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	506.000.000,00	60.000.000,00	45.333.333,33	400.666.666,67
Sosial	67.627.502,13	64.033.333,33	42.334.252,55	-38.740.083,75
Divergensi	438.372.497,87	-4.033.333,33	2.999.080,78	439.406.750,42
NCPO	7,48			
NCPI	0,94			
<i>Net Transfer</i>	439.406.750,42			
EPC	124,09			
PCR	0,10			
DRC	11,78			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 83. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	112.878.048,78	7.440.650,41	39 141 463,41	66 295 934,96
Sosial	67.894.525,42	6.187.327,98	26 562 463,28	35 144 734,15
Divergensi	44.983.523,36	1.253.322,42	12 579 000,13	31 151 200,81
NCPO	1,66			
NCPI	1,20			
Net Transfer	31.151.200,81			
EPC	1,71			
PCR	0,37			
DRC	0,43			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 84. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	120.410.853,21	1.716.067,64	62 826 464,35	55 868 321,22
Sosial	60.565.160,92	4.211.669,83	60 160 059,03	-3 806 567,93
Divergensi	59.845.692,29	-2.495.602,19	2 666 405,32	59 674 889,16
NCPO	1,99			
NCPI	0,41			
Net Transfer	59.674.889,16			
EPC	2,11			
PCR	0,53			
DRC	1,07			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 85. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	342.894.509,30	23.065.283,18	240 888 456,55	78 940 769,56
Sosial	154.448.224,39	52.928.601,01	229 492 060,42	-127 972 437,03
Divergensi	188.446.284,90	-29.863.317,83	11 396 396,13	206 913 206,60
NCPO	2,22			
NCPI	0,44			
<i>Net Transfer</i>	206.913.206,60			
EPC	3,15			
PCR	0,75			
DRC	2,26			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 86. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Banten Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	178.782.197,70	1.663.764,45	37 224 383,18	139 894 050,07
Sosial	102.149.064,47	1.845.274,58	35 032 230,06	65 271 559,83
Divergensi	76.633.133,23	-181.510,14	2 192 153,13	74 622 490,24
NCPO	1,75			
NCPI	0,90			
<i>Net Transfer</i>	74.622.490,24			
EPC	1,77			
PCR	0,21			
DRC	0,35			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 87. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Bali Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	222.878.484,18	20.133.260,26	103 355 974,01	99 389 249,92
Sosial	365.679.137,80	65.857.327,47	83 358 232,41	216 463 577,92
Divergensi	-142.800.653,62	-45.724.067,21	19 997 741,60	-117 074 328,00
NCPO	0,61			
NCPI	0,31			
<i>Net Transfer</i>	-117.074.328,00			
EPC	0,68			
PCR	0,51			
DRC	0,28			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 88. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	185.909.796,83	4.736.623,76	95 741 099,35	85 432 073,72
Sosial	128.573.739,07	14.299.760,53	80 435 948,24	33 838 030,30
Divergensi	57.336.057,76	-9.563.136,77	15 305 151,11	51 594 043,42
NCPO	1,45			
NCPI	0,33			
<i>Net Transfer</i>	51.594.043,42			
EPC	1,59			
PCR	0,53			
DRC	0,70			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 89. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	187.497.717,14	1.630.767,58	93.241.392,28	92.625.557,29
Sosial	111.829.135,81	10.304.726,95	89.845.837,85	11.678.571,02
Divergensi	75.668.581,33	-8.673.959,37	3.395.554,43	80.946.986,27
NCPO	1,68			
NCPI	0,16			
<i>Net Transfer</i>	80.946.986,27			
EPC	1,83			
PCR	0,50			
DRC	0,88			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 90. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	87.363.636,36	833.333,33	18.475.757,58	68.054.545,45
Sosial	78.020.043,73	1.455.303,03	16.875.110,14	59.689.630,56
Divergensi	9.343.592,63	-621.969,70	1.600.647,44	8.364.914,89
NCPO	1,12			
NCPI	0,57			
<i>Net Transfer</i>	8.364.914,89			
EPC	1,13			
PCR	0,21			
DRC	0,22			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 91. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014
(Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	219.931.508,21	13.959.183,67	70 694 076,66	135 278 247,88
Sosial	164.808.911,73	105.404.785,48	61 923 701,66	-2 519 575,41
Divergensi	55.122.596,49	-91.445.601,81	8 770 375,00	137 797 823,30
NCPO	1,33			
NCPI	0,13			
<i>Net Transfer</i>	137.797.823,30			
EPC	3,47			
PCR	0,34			
DRC	1,04			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 92. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014
(Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	97.020.918,98	7.266.765,73	50 020 502,79	39 733 650,46
Sosial	60.490.372,11	25.541.238,10	48 098 186,81	-13 149 052,80
Divergensi	36.530.546,87	-18.274.472,37	1 922 315,98	52 882 703,26
NCPO	1,60			
NCPI	0,28			
<i>Net Transfer</i>	52.882.703,26			
EPC	2,57			
PCR	0,56			
DRC	1,38			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 93. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	252.031.057,94	16.095.359,06	122.541.379,85	113.394.319,02
Sosial	146.774.592,88	48.363.316,41	102.657.762,10	-4.246.485,64
Divergensi	105.256.465,06	-32.267.957,35	19.883.617,75	117.640.804,66
NCPO	1,72			
NCPI	0,33			
<i>Net Transfer</i>	117.640.804,66			
EPC	2,40			
PCR	0,52			
DRC	1,04			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 94. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	172.097.978,48	12.212.708,50	90.511.261,77	69.374.008,20
Sosial	94.776.254,45	13.330.168,10	180.539.302,93	-99.093.216,59
Divergensi	77.321.724,03	-1.117.459,60	-90.028.041,16	168.467.224,79
NCPO	1,82			
NCPI	0,92			
<i>Net Transfer</i>	168.467.224,79			
EPC	1,96			
PCR	0,57			
DRC	2,22			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 95. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	194.306.679,06	18.261.532,45	100 273 422,90	75 771 723,71
Sosial	120.747.835,95	33.939.063,64	111 969 285,37	-25 160 513,07
Divergensi	73.558.843,11	-15.677.531,19	-11 695 862,47	100 932 236,77
NCPO	1,61			
NCPI	0,54			
Net Transfer	100.932.236,77			
EPC	2,03			
PCR	0,57			
DRC	1,29			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 96. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	92.155.192,69	9.486.721,26	90 399 773,17	-7 731 301,75
Sosial	59.746.202,29	14.438.435,99	101 338 451,05	-56 030 684,75
Divergensi	32.408.990,39	-4.951.714,73	-10 938 677,88	48 299 383,00
NCPO	1,54			
NCPI	0,66			
Net Transfer	48.299.383,00			
EPC	1,82			
PCR	1,09			
DRC	2,24			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 97. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Gorontalo Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	144.151.381,43	14.008.599,16	56 507 397,65	73 635 384,61
Sosial	99.270.010,41	43.187.881,34	53 019 146,63	3 062 982,43
Divergensi	44.881.371,02	-29.179.282,18	3 488 251,02	70 572 402,17
NCPO	1,45			
NCPI	0,32			
<i>Net Transfer</i>	70.572.402,17			
EPC	2,32			
PCR	0,43			
DRC	0,95			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 98. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	155.038.361,65	12.195.751,69	76 646 022,50	66 196 587,46
Sosial	89.664.799,63	65.342.290,26	84 078 412,07	-59 755 902,70
Divergensi	65.373.562,02	-53.146.538,57	-7 432 389,57	125 952 490,16
NCPO	1,73			
NCPI	0,19			
<i>Net Transfer</i>	125.952.490,16			
EPC	5,87			
PCR	0,54			
DRC	3,46			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 99. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Maluku Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	120.703.452,69	516.492,14	100 475 214,56	19 711 746,00
Sosial	63.195.059,21	9.402.642,79	99 089 093,32	-45 296 676,90
Divergensi	57.508.393,48	-8.886.150,65	1 386 121,24	65 008 422,89
NCPO	1,91			
NCPI	0,05			
<i>Net Transfer</i>	65.008.422,89			
EPC	2,23			
PCR	0,84			
DRC	1,84			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 100. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	186.447.378,72	5.046.395,99	58 757 111,12	122 643 871,62
Sosial	127.467.384,37	35.480.165,26	52 738 529,43	39 248 689,68
Divergensi	58.979.994,35	-30.433.769,27	6 018 581,69	83 395 181,93
NCPO	1,46			
NCPI	0,14			
<i>Net Transfer</i>	83.395.181,93			
EPC	1,97			
PCR	0,32			
DRC	0,57			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 101. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Papua Barat Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	202.969.547,30	5.579.512,92	107 532 627,89	89 857 406,50
Sosial	138.040.518,69	22.339.116,48	94 521 202,31	21 180 199,90
Divergensi	64.929.028,62	-16.759.603,56	13 011 425,58	68 677 206,59
NCPO	1,47			
NCPI	0,25			
<i>Net Transfer</i>	68.677.206,59			
EPC	1,71			
PCR	0,54			
DRC	0,82			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 102. Hasil Analisis PAM Usahatani Kakao di Provinsi Papua Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	87.303.519,48	4.076.671,72	37 118 522,98	46 108 324,78
Sosial	64.767.107,26	11.178.035,21	36 290 627,55	17 298 444,50
Divergensi	22.536.412,22	-7.101.363,49	827 895,43	28 809 880,28
NCPO	1,35			
NCPI	0,36			
<i>Net Transfer</i>	28.809.880,28			
EPC	1,55			
PCR	0,45			
DRC	0,68			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 103. Hasil Analisis PAM Usahatani Cengkeh di Provinsi Aceh Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	801.831.828,60	7.047.233,80	335.847.778,27	458.936.816,52
Sosial	727.433.856,18	24.377.674,17	338.653.581,68	364.402.600,33
Divergensi	74.397.972,42	-17.330.440,37	-2.805.803,41	94.534.216,19
NPCO	1,10			
NPCI	0,29			
<i>Net Transfer</i>	94.534.216,19			
EPC	1,13			
PCR	0,42			
DRC	0,48			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 104. Hasil Analisis PAM Usahatani Cengkeh di Provinsi Jambi Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	2.676.530.612,24	69.081.632,65	1.496.428.571,43	1.111.020.408,16
Sosial	3.323.412.532,22	167.692.978,49	1.505.469.387,76	1.650.250.165,98
Divergensi	-646.881.919,98	-98.611.345,83	-9.040.816,33	-539.229.757,82
NPCO	0,81			
NPCI	0,41			
<i>Net Transfer</i>	-539.229.757,82			
EPC	0,83			
PCR	0,57			
DRC	0,47			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 105. Hasil Analisis PAM Usahatani Cengkeh di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	3.009.992.812,56	45.767.353,89	1.378.643.086,82	1.585.582.371,86
Sosial	3.141.581.803,61	117.959.189,69	1.398.132.438,06	1.625.490.175,87
Divergensi	-131.588.991,06	-72.191.835,80	-19.489.351,24	-39.907.804,02
NPCO	0,96			
NPCI	0,39			
<i>Net Transfer</i>	-39.907.804,02			
EPC	0,98			
PCR	0,47			
DRC	0,46			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 106. Hasil Analisis PAM Usahatani Cengkeh di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	2.653.302.362,96	85.239.391,69	524.871.038,67	2.043.191.932,60
Sosial	15.379.520.441,04	125.218.604,45	533.948.378,67	14.720.353.457,93
Divergensi	-12.726.218.078,08	-39.979.212,76	-9.077.340,00	-12.677.161.525,32
NPCO	0,17			
NPCI	0,68			
<i>Net Transfer</i>	-12.677.161.525,32			
EPC	0,17			
PCR	0,20			
DRC	0,04			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 107. Hasil Analisis PAM Usahatani Cengkeh di Provinsi Banten Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	3.510.425.668,71	31.627.739,41	712.597.831,75	2.766.200.097,55
Sosial	7.702.424.971,27	107.959.426,35	720.353.520,88	6.874.112.024,05
Divergensi	-4.191.999.302,56	-76.331.686,94	-7.755.689,13	-4.107.911.926,50
NPCO	0,46			
NPCI	0,29			
<i>Net Transfer</i>	-4.107.911.926,50			
EPC	0,46			
PCR	0,20			
DRC	0,1			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 108. Hasil Analisis PAM Usahatani Cengkeh di Provinsi Bali Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	5.576.832.469,39	169.526.304,18	1.519.617.183,19	3.887.688.982,02
Sosial	12.007.252.573,02	184.109.050,50	1.542.424.692,95	10.280.718.829,57
Divergensi	-6.430.420.103,62	-14.582.746,32	-22.807.509,76	-6.393.029.847,54
NPCO	0,46			
NPCI	0,92			
<i>Net Transfer</i>	-6.393.029.847,54			
EPC	0,46			
PCR	0,28			
DRC	0,13			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 109. Hasil Analisis PAM Usahatani Cengkeh di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	4.312.316.091,42	52.097.714,44	751.270.010,18	3.508.948.366,80
Sosial	3.811.417.450,80	119.725.947,80	764.121.336,17	2.927.570.166,82
Divergensi	500.898.640,63	-67.628.233,36	-12.851.325,99	581.378.199,98
NPCO	1,13			
NPCI	0,44			
Net Transfer	581.378.199,98			
EPC	1,15			
PCR	0,18			
DRC	0,21			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 110. Hasil Analisis PAM Usahatani Cengkeh di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	5.954.541.914,00	3.535.763,21	1.661.605.530,34	4.289.400.620,45
Sosial	6.035.160.716,36	7.744.437,78	1.666.315.922,00	4.361.100.356,58
Divergensi	-80.618.802,36	-4.208.674,57	-4.710.391,66	-71.699.736,13
NPCO	0,99			
NPCI	0,46			
Net Transfer	-71.699.736,13			
EPC	0,99			
PCR	0,28			
DRC	0,27			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 111. Hasil Analisis PAM Usahatani Cengkeh di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	3.549.816.402,52	19.801.259,91	1.124.437.220,12	2.405.577.922,50
Sosial	3.578.379.530,35	50.448.379,44	1.138.460.427,61	2.389.470.723,30
Divergensi	-28.563.127,83	-30.647.119,54	-14.023.207,50	16.107.199,20
NPCO	0,99			
NPCI	0,39			
<i>Net Transfer</i>	16.107.199,20			
EPC	1,00			
PCR	0,32			
DRC	0,33			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 112. Hasil Analisis PAM Usahatani Cengkeh di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	3.776.856.856,78	83.077.681,61	1.325.729.786,93	2.368.049.388,24
Sosial	3.715.189.139,57	467.465.377,64	1.344.175.973,24	1.903.547.788,70
Divergensi	61.667.717,21	-384.387.696,02	-18.446.186,31	464.501.599,54
NPCO	1,02			
NPCI	0,18			
<i>Net Transfer</i>	464.501.599,54			
EPC	1,14			
PCR	0,36			
DRC	0,42			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 113. Hasil Analisis PAM Usahatani Cengkeh di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	2.654.678.815,49	106.080.485,95	1.187.726.651,48	1.360.871.678,06
Sosial	2.757.834.536,69	628.669.920,97	1.200.882.460,14	928.282.155,58
Divergensi	-103.155.721,20	-522.589.435,02	-13.155.808,66	432.589.522,48
NPCO	0,96			
NPCI	0,17			
<i>Net Transfer</i>	432.589.522,48			
EPC	1,20			
PCR	0,47			
DRC	0,56			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 114. Hasil Analisis PAM Usahatani Cengkeh di Provinsi Maluku Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	4.065.457.462,71	273.862,20	1.556.816.003,87	2.508.367.596,64
Sosial	4.011.445.676,07	18.897.189,62	1.562.416.543,09	2.430.131.943,36
Divergensi	54.011.786,64	-18.623.327,41	-5.600.539,23	78.235.653,28
NPCO	1,01			
NPCI	0,01			
<i>Net Transfer</i>	78.235.653,28			
EPC	1,02			
PCR	0,38			
DRC	0,39			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 115. Hasil Analisis PAM Usahatani Cengkeh di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	4.753.721.258,16	2.285.864,26	1.949.663.468,27	2.801.771.925,63
Sosial	4.504.520.270,03	43.644.490,37	1.962.312.974,52	2.498.562.805,14
Divergensi	249.200.988,13	-41.358.626,11	-12.649.506,25	303.209.120,48
NPCO	1,06			
NPCI	0,05			
Net Transfer	303.209.120,48			
EPC	1,07			
PCR	0,41			
DRC	0,44			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 116. Hasil Analisis PAM Usahatani Teh di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	13.445.003,08	1.474.356,13	6.033.385,71	5.937.261,24
Sosial	47.042.317,83	2.418.670,20	6.069.586,52	38.554.061,11
Divergensi	-33.597.314,74	-944.314,07	-36.200,81	-32.616.799,87
NPCO	0,29			
NPCI	0,61			
Net Transfer	-32.616.799,87			
EPC	0,27			
PCR	0,50			
DRC	0,14			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 117. Hasil Analisis PAM Usahatani Teh di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 (Rp/ Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	19.911.756,84	1.831.862,93	8.697.109,09	9.382.784,82
Sosial	46.925.159,61	5.487.765,14	8.776.046,63	32.661.347,84
Divergensi	-27.013.402,77	-3.655.902,21	-78.937,53	-23.278.563,02
NPCO	0,42			
NPCI	0,33			
<i>Net Transfer</i>	-23.278.563,02			
EPC	0,44			
PCR	0,48			
DRC	0,21			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 118. Hasil Analisis PAM Usahatani Teh di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Rp/ Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	23.765.323,22	1.314.469,29	6.896.915,20	15.553.938,74
Sosial	44.906.105,18	354,98	6.965.303,90	37.940.446,30
Divergensi	-21.140.781,96	1.314.114,31	-68.388,70	-22.386.507,56
NPCO	0,53			
NPCI	3.702,93			
<i>Net Transfer</i>	-22.386.507,56			
EPC	0,50			
PCR	0,31			
DRC	0,16			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 119. Hasil Analisis PAM Usahatani Teh di Provinsi Yogyakarta (DIY) Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	10.042.194,09	3.629.053,65	8.484.448,46	-2.071.308,02
Sosial	38.100.717,85	5.297.948,99	8.591.635,93	24.211.132,93
Divergensi	-28.058.523,75	-1.668.895,35	-107.187,46	-26.282.440,95
NPCO	0,26			
NPCI	0,68			
<i>Net Transfer</i>	-26.282.440,95			
EPC	0,20			
PCR	1,32			
DRC	0,26			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 120. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa di Provinsi Riau Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	425.639.152,44	14.564.190,89	281.566.699,45	129.508.262,10
Sosial	17.679.188.692,33	84.887.433,32	289.171.652,70	17.305.129.606,31
Efek Divergensi	-17.253.549.539,89	-70.323.242,43	-7.604.953,25	-17.175.621.344,21
NPCO	0,02			
NPCI	0,17			
<i>Net Transfer</i>	-17.175.621.344,21			
EPC	0,02			
PCR	0,68			
DRC	0,02			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 121. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa di Provinsi Jambi Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	717.278.653,38	20.618.253,59	265.361.794,90	431.298.604,89
Sosial	1.702.511.876,76	127.319.249,41	267.611.655,10	1.307.580.972,25
Efek Divergensi	-985.233.223,37	-106.700.995,82	-2.249.860,20	-876.282.367,36
NPCO	0,42			
NPCI	0,16			
<i>Net Transfer</i>	-876.282.367,36			
EPC	0,44			
PCR	0,38			
DRC	0,17			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 122. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	82.981.198,35	668.854,91	30.387.118,14	51.925.225,30
Sosial	213.611.581,92	6.358.176,84	30.513.705,34	176.739.699,74
Efek Divergensi	-130.630.383,56	-5.689.321,93	-126.587,20	-124.814.474,43
NPCO	0,39			
NPCI	0,11			
<i>Net Transfer</i>	-124.814.474,43			
EPC	0,40			
PCR	0,37			
DRC	0,15			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 123. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa di Provinsi Banten Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	485.732.587,93	559.049,62	141.052.876,78	344.120.661,54
Sosial	1.167.617.678,04	-	142.103.890,05	1.025.513.787,98
Efek Divergensi	-681.885.090,10	559.049,62	-1.051.013,28	-681.393.126,44
NPCO	0,42			
NPCI	-			
Net Transfer	-681.393.126,44			
EPC	0,42			
PCR	0,29			
DRC	0,12			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 124. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	577.852.160,77	3.496.567,17	424.050.008,20	150.305.585,40
Sosial	1.020.203.166,63	16.151.785,76	426.375.152,52	577.676.228,35
Efek Divergensi	-442.351.005,86	-12.655.218,58	-2.325.144,32	-427.370.642,95
NPCO	0,57			
NPCI	0,22			
Net Transfer	-427.370.642,95			
EPC	0,57			
PCR	0,74			
DRC	0,42			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 125. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	720.000.000,00	145.000.000,00	550.000.000,00	25.000.000,00
Sosial	1.170.848.284,44	102.820.000,00	552.500.000,00	515.528.284,44
Efek Divergensi	-450.848.284,44	42.180.000,00	-2.500.000,00	-490.528.284,44
NPCO	0,61			
NPCI	1,41			
<i>Net Transfer</i>	-490.528.284,44			
EPC	0,54			
PCR	0,96			
DRC	0,52			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 126. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014(Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	390.857.142,86	-	203.428.571,43	187.428.571,43
Sosial	448.755.766,86	-	203.628.571,43	245.127.195,43
Efek Divergensi	-57.898.624,00	-	-200.000,00	-57.698.624,00
NPCO	0,87			
NPCI	-			
<i>Net Transfer</i>	-57.698.624,00			
EPC	0,87			
PCR	0,52			
DRC	0,45			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 127. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	48.919.577,58	2.261.575,95	53.733.346,87	-7.075.345,25
Sosial	76.055.655,72	1.151.371,36	54.291.585,70	20.612.698,66
Efek Divergensi	-27.136.078,15	1.110.204,59	-558.238,83	-27.688.043,91
NPCO	0,64			
NPCI	1,96			
Net Transfer	-27.688.043,91			
EPC	0,62			
PCR	1,15			
DRC	0,72			

Sumber: ST2013-SKB, diolah

Lampiran 128. Hasil Analisis PAM Usahatani Kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 (Rp/Hektar)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradable	Faktor Domestik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Privat	517.758.957,10	5.689.941,64	205.733.938,99	306.335.076,47
Sosial	730.017.415,02	16.091.323,72	207.990.152,35	505.935.938,95
Efek Divergensi	-212.258.457,92	-10.401.382,08	-2.256.213,35	-199.600.862,48
NPCO	0,71			
NPCI	0,35			
Net Transfer	-199.600.862,48			
EPC	0,72			
PCR	0,40			
DRC	0,29			

Sumber: ST2013-SKB, diolah



Kuesioner

<http://www.bps.go.id>



REPUBLIK INDONESIA



SENSUS PERTANIAN 2013

SURVEI RUMAH TANGGA USAHA PERKEBUNAN TAHUN 2014

RAHASIA

Komoditas perkebunan terpilih:.....

3			
---	--	--	--

I. PENGENALAN TEMPAT		
101. Provinsi		□ □
102. Kabupaten/Kota*)		□ □
103. Kecamatan		□ □ □
104. Desa/Kelurahan*)		□ □ □
105. Klasifikasi Desa/Kelurahan	Perkotaan - 1 Perdesaan - 2	□
106. Nomor Blok Sensus		□ □ □ □
107. Nomor Kode Sampel (NKS)		E □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
108. Satuan Lingkungan Setempat		□ □ □
109. Nomor Bangunan Fisik		□ □ □ □
110. Nomor Bangunan Sensus		□ □ □ □ □
111. Nomor Urut Rumah Tangga		□ □ □ □
112. Nomor Urut Sampel		□ □
113. Nama Kepala Rumah Tangga		
114. Nama Pemberi Informasi		
115. Nomor Telp/HP Pemberi Informasi		

*) Coret salah satu

II. KETERANGAN PETUGAS		
Rincian	Pencacah (PCS)	Pengawas/Pemeriksa (PMS)
(1)	(2)	(3)
201. Kode Petugas	□ □ □ □	□ □ □ □ 0
202. Nama Petugas		
203. Tanggal Pencacahan/Pemeriksaan s.d s.d s.d
204. Tanda Tangan		

III. KETERANGAN PENCACAHAN	
301. Hasil Pencacahan	1. Berhasil diwawancarai 2. Pindah ke luar blok sensus 3. Tidak dapat diwawancarai sampai dengan batas waktu pencacahan 4. Menolak diwawancarai
302. Jika rincian 301 berkode 2, 3, atau 4 : "STOP"	□

IV. KETERANGAN DEMOGRAFI PEKEBUN TERPILIH																											
401. Banyaknya anggota rumah tangga pada saat pencacahan: orang	<input type="text"/> <input type="text"/>																										
402. Banyaknya anggota rumah tangga (10 tahun keatas) yang menjadi pekebun komoditas terpilih: orang Anggota rumah tangga dikategorikan sebagai pekebun komoditas terpilih apabila anggota rumah tangga tersebut mengusahakan/membudidayakan tanaman perkebunan terpilih di lahan yang dikuasai rumah tangga dan menanggung risiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga).	<input type="checkbox"/>																										
403. Keterangan pekebun terpilih : Apabila dalam 1 rumah tangga lebih dari 1 orang pekebun komoditas terpilih (rincian 402 ≥ 2), isikan untuk pekebun dengan nilai produksi paling besar selama setahun yang lalu.																											
a. Nama :																											
b. Hubungan dengan kepala rumah tangga:																											
1. Kepala rumah tangga	5. Cucu																										
2. Istri/suami	6. Orang tua/mertua																										
3. Anak	7. Famili lain																										
4. Menantu	8. Lainnya																										
c. Jenis kelamin:	1. Laki-laki 2. Perempuan																										
d. Umur : tahun	<input type="text"/> <input type="text"/>																										
e. Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki:																											
1. Tidak/belum tamat SD	5. Tamat D1/D2																										
2. Tamat SD/ sederajat	6. Tamat Akademi/D3																										
3. Tamat SLTP/ sederajat	7. Tamat D4/S1																										
4. Tamat SLTA/ sederajat	8. Tamat S2/S3																										
	<input type="checkbox"/>																										
	<input type="checkbox"/>																										
	<input type="checkbox"/>																										
	<input type="checkbox"/>																										
V. KOMPOSISI KOMODITAS PERKEBUNAN TERPILIH YANG DIKUASAI RUMAH TANGGA																											
501. Tanaman Semusim (selama setahun yang lalu) Luas tanam m ²	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																										
502. Tanaman Tahunan (pada saat pencacahan)																											
Kondisi Tanaman	Jumlah Pohon / Lajar																										
(1)	(2) (3) (4) (5)																										
a. Tanaman belum menghasilkan	Umur (tahun) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																										
b. Tanaman menghasilkan	Umur (tahun) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																										
c. Tanaman tidak menghasilkan/ tua/rusak	Umur (tahun) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																										
VIA. KETERANGAN PANEN USAHA KOMODITAS PERKEBUNAN TERPILIH SELAMA SETAHUN YANG LALU																											
601. a. Bulan panen selama setahun yang lalu (beri tanda "√" pada baris panen untuk bulan yang sesuai)	<table border="1"> <tr> <td>Bulan</td> <td>01</td> <td>02</td> <td>03</td> <td>04</td> <td>05</td> <td>06</td> <td>07</td> <td>08</td> <td>09</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Panen</td> <td></td> </tr> </table>	Bulan	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Panen												
Bulan	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12															
Panen																											
b. Panen besar selama setahun yang lalu pada bulan :	<input type="text"/> <input type="text"/>																										
c. Rata-rata frekuensi panen per bulan : hari	<input type="text"/> <input type="text"/>																										

VIA. KETERANGAN PANEN USAHA KOMODITAS PERKEBUNAN TERPILIH SELAMA SETAHUN YANG LALU (lanjutan)	
<p>602. Tanaman yang dipanen sendiri :</p> <p>a. Luas panen (m²) untuk tanaman semusim / Jumlah pohon/lajar untuk tanaman tahunan</p> <p>b. Bentuk produksi primer/utama : 1.</p> <p style="margin-left: 40px;">(i). Jumlah produksi kode satuan* <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;">(ii). Nilai produksi (000 Rp)</p> <p>2.</p> <p style="margin-left: 40px;">(i). Jumlah produksi kode satuan* <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;">(ii). Nilai produksi (000 Rp)</p> <p>3. Nilai produksi primer lainnya (000 Rp)</p> <p>c. Nilai hasil ikutan (000 Rp)</p> <p>d. Nilai produksi yang dipanen sendiri (rincian 602b[1(ii)+2(ii)+3]+602c) (000 Rp)</p>	<p><input type="text"/></p> <p>kode prod. <input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>kode prod. <input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>
<p>603. Tanaman yang ditebaskan/dijonkan :</p> <p>a. Nilai tebasan (000 Rp)</p> <p>b. Nilai ijon (000 Rp)</p>	<p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>
<p>604. NILAI PRODUKSI SELURUHNYA (rincian 602d + 603a + 603b) (000 Rp)</p>	<p><input type="text"/></p>

*) Kode satuan produksi : 1.liter 2.kg 3.ton 4.butir

VIB. KETERANGAN USAHA KOMODITAS PERKEBUNAN TERPILIH SELAMA SETAHUN YANG LALU	
<p>605. Jenis lahan :</p> <p>1. Lahan pertanian sawah (langsung ke rincian 607)</p> <p>2. Lahan pertanian bukan sawah</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>606. Jika rincian 605 berkode 2, jenis tanah: 1. Gambut 2. Bukan Gambut</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>607. Status lahan: 1. Milik Sendiri 2. Sewa/Gadai 3. Bebas Sewa</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>608. Sistem penanaman: 1. Tunggal 2. Tumpang Sari / Sela 3. Campuran</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>609. a. Cara penanaman: 1. Teratur 2. Tidak teratur (langsung ke rincian 610)</p> <p>b. Jika rincian 609.a berkode 1, maka jarak tanam: m x m</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="text"/>, <input type="text"/> x <input type="text"/>, <input type="text"/></p>
<p>610. Varietas benih yang utama digunakan: 1. Bersertifikat 2. Tidak bersertifikat</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>611. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)</p> <p>a. Apakah terkena serangan OPT seperti hama, penyakit, gulma, dll ?</p> <p>1. Ya 2. Tidak (langsung ke rincian 612)</p> <p>b. Cara pengendalian yang utama dilakukan jika terkena serangan OPT:</p> <p>1. Agronomis (pemupukan, pengolahan lahan, pengaturan irigasi, dll)</p> <p>2. Mekanis (pemagaran/penghalang (seperti plastik), pemakaian perangkap, dll)</p> <p>3. Hayati (memanfaatkan agen hayati/pemangsa alami yang sesuai)</p> <p>4. Kimiawi (pestisida, dll)</p> <p>5. Tidak melakukan pengendalian serangan OPT</p> <p>c. Jika rincian 611b. berkode 5 (tidak melakukan pengendalian serangan OPT), alasan utamanya adalah :</p> <p>1. Harga pestisida mahal 3. Tidak ada biaya</p> <p>2. Sulit mendapatkan pestisida 4. Tidak tahu</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>612. Dampak perubahan iklim atau bencana alam</p> <p>a. Apakah terkena dampak perubahan iklim atau bencana alam ?</p> <p>1. Ya 2. Tidak (langsung ke Blok VII rincian 701)</p> <p>b. Jika ya, jenis dampak perubahan iklim atau bencana alam yang utama :</p> <p>1. Kekeringan 2. Kebanjiran 3. Lainnya (tanah longsor, gempa bumi, dll)</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>

VII. KETERANGAN ONGKOS/BIAYA PRODUKSI USAHA PERKEBUNAN TERPILIH SELAMA SETAHUN YANG LALU					
Ongkos Produksi	Satuan	Banyaknya Penggunaan		Nilai (000 Rp)	
		Pembelian	Bukan Pembelian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
701. Benih / Penyisipan	batang	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
702. Tanaman pelindung	batang	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
703. Pupuk					
a. Urea	Kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
b. TSP/SP36	Kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
c. ZA	Kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
d. KCL	Kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
e. NPK	Kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
f. Pupuk organik (kandang/kompos)	Kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
g. Lainnya (.....)	Kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
704. a. Stimulan/Zat pengatur tumbuh padat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
b. Stimulan/Zat pengatur tumbuh cair	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
705. a. Pestisida padat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
b. Pestisida cair	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
706. a. Jumlah pekerja (orang)					
Jenis Kelamin	Pekerja Dibayar		Pekerja Tidak Dibayar	Total Pekerja	
	Pekerja Tetap	Pekerja Tidak Tetap			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1) Laki-laki	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2) Perempuan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
b. Upah (000 Rp)					
Jenis Kegiatan	Upah Pekerja Dibayar (000 Rp)		Perkiraan Upah Pekerja Tidak Dibayar (000 Rp)		Total Upah (000 Rp)
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1) Pengolahan lahan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2) Penanaman pohon pelindung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3) Penanaman tanaman perkebunan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4) Pemeliharaan (pemangkasan, penyiangan, dll)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5) Pemupukan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6) Pengendalian hama/OPT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7) Pemanenan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8) Pengeringan/ Penjemuran	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

X. CATATAN



KODE KOMODITAS PERKEBUNAN

Kode Tanaman	Jenis Tanaman	Kode Produksi Primer	Bentuk Produksi Primer/Utama		Kode Tanaman	Jenis Tanaman	Kode Produksi Primer	Bentuk Produksi Primer/Utama
Tanaman Perkebunan Unggulan Nasional					Tanaman Perkebunan Tahunan Unggulan Provinsi (lanjutan)			
3107	Kakao	31071 31072	Buah masak/gelondong Biji kering		3112	Kelapa	31121 31122	Buah kelapa Kopra
3109	Karet	31091 31092 31093 31094 31095 31096	Lateks Lump mangkok Lump tahu Lump tanah Sheet Slab		3120	Lada	31201 31202	Lada basah Lada kering
3111	Kelapa sawit	31111	Tandan buah segar		3124	Pala	31241 31242 31243 31244	Biji pala basah Biji pala kering Fulli basah Fulli kering
3119	Kopi	31191 31192	Buah/biji masak Biji kering/kopi berasan		3127	Sagu	31271 31272	Batang sagu Tepung sagu
Tanaman Perkebunan Tahunan Unggulan Provinsi					3129	Teh	31291 31292	Daun teh basah Daun teh kering
3101	Aren/Enau	31011	Nira		Tanaman Perkebunan Semusim Unggulan Provinsi			
3103	Cengkeh	31031 31032	Bunga basah Bunga kering		3120	Tebu	32101	Batang
3105	Jambu mete	31051 31052	Biji basah Biji kering		3211	Tembakau	32111 32112 32113	Daun basah Daun kering Rajangan

LEMBAR KERJA

<http://www.bps.go.id>

LEMBAR KERJA

<http://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telp.: 021 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: 021 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id

ISBN 978-979-064-870-8



9 789790 648739